



Biro Perencanaan
SEKRETARIAT JENDERAL
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

LAPORAN KINERJA

Menuntun akuntabilitas
kinerja menuju birokrasi
kelas dunia

2022



Biro Perencanaan
SEKRETARIAT JENDERAL
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

LAPORAN KINERJA

Menuntun akuntabilitas
kinerja menuju birokrasi
kelas dunia

2022



Sang surya mulai tenggelam di ufuk barat, diiringi perahu nelayan akan bersandar di pelabuhan kota Makassar, Sulawesi selatan. Petang menandakan akan berakhirnya suatu hari, sama halnya dengan Laporan Kinerja ini menandakan akhir dari suatu tahun ini.

Foto oleh: Ajian Yogo Pratopo

KEBERLANJUTAN TEMA LAPORAN KINERJA



2019

Mendukung pemenuhan prioritas nasional dan mendorong geliatnya di tingkat tapak.

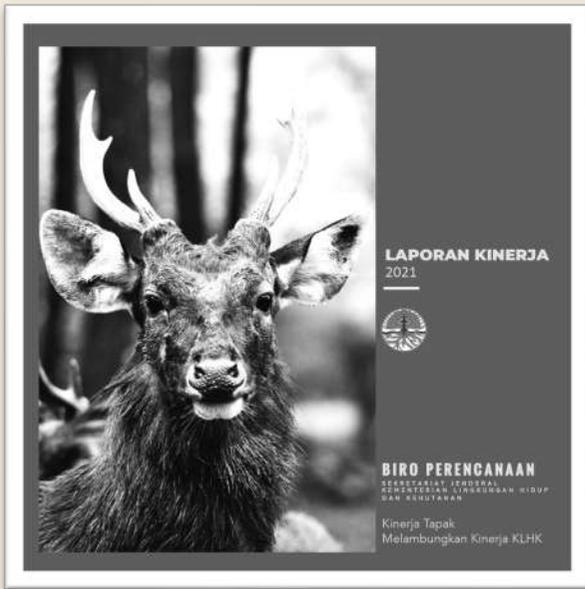
Biro Perencanaan senantiasa mendorong setiap rupiah yang dibelanjakan untuk mendukung pemenuhan visi-misi Presiden Republik Indonesia, dan membawa arti yang mendalam bagi perbaikan tapak, mengungkit ekonomi masyarakat sekitar hutan dan membantu merawat hubungan antara manusia dengan sumberdaya.



2020

Melabuhkan geliat tapak ke dalam perbaikan kinerja

Pandemi yang melanda dunia, mengajarkan kita betapa sebuah perubahan adalah keniscayaan. Sedari awal, Biro Perencanaan bertekad memanfaatkan gelombang pandemi ini sebagai pendulum perubahan. Karenanya, niat kami untuk memodernisasi akuntabilitas kinerja seperti menemukan momentum perubahan : membawa geliat tapak ke dalam perbaikan bilangan kinerja.



2021

Kinerja Tapak Melambungkan Kinerja KLHK

Tahun 2021 menjadi titik tengah dari perubahan hidup manusia akibat pandemi, adaptasi terhadap tatanan hidup baru menjadi pancingan bagi Kementerian LHK, tidak terkecuali Biro Perencanaan untuk terus berinovasi dan berkinerja dengan baik.



2022

Menuntun akuntabilitas kinerja menuju birokrasi kelas dunia

Memasuki tahun ketiga hidup berdampingan dengan situasi pandemi, secara tidak langsung memaksa untuk terus berinovasi dan mencari jalan terbaik dalam membangun negeri. Integrasi anggaran dan kinerja yang lincah menyangga fiskal, menyuluh kerja birokrasi yang semakin tanggap perubahan jaman.

LAPORAN KINERJA 2022

BIRO PERENCANAAN

Disusun dan diterbitkan oleh Biro Perencanaan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

ISBN

Biro Perencanaan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak berikut ini yang telah menyumbangkan foto-foto untuk menghiasi Laporan Kinerja ini. Mereka adalah (diurut sesuai abjad):

Abdul Kholik (Biro Perencanaan), Agustina Sandrasari (Biro Perencanaan), Ajiyan Yogo Pratopo (Biro Perencanaan), Amaliah Kurniasih (Biro Perencanaan), Anny Meilani (Biro Perencanaan), Asriyanto (Biro Perencanaan), Chindy Chesarah (Biro Perencanaan), Dyastri Intan Pratiwi Prayoga (Biro Perencanaan), Erwin Febriyanto (Biro Perencanaan), Hairatunisa (Biro Perencanaan), Ineke Tya Claudya Sarwono Putri (Biro Perencanaan), Khulfi M. Khalwani (Biro Perencanaan), Lastri Simanjuntak (Biro Perencanaan), Mahardhika Cahaya Utama (Biro Perencanaan), Marwedhi Nurratyo (Biro Perencanaan), Muhayar (Biro Perencanaan), Rd. M. Darajat Ali (Biro Perencanaan), Raka Majid (Biro Perencanaan), Rifqi Alif Nugraha (Biro Perencanaan), Siti Rahmatun (Biro Perencanaan), Yeyen Angraeni (Biro Perencanaan), dan Zamthomi (Biro Perencanaan).

Foto sampul merupakan potret lukisan alam berupa air terjun yang terdapat di Geopark Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat. Foto tersebut diambil oleh Ineke Tya Claudya Sarwono Putri (Biro Perencanaan).



Dokumen ini dapat diunduh melalui tautan:
http://bit.ly/LKj_Birocan2022

©copyright Biro Perencanaan 2022



Deras arus air mengalir menyerbu dari hulu menuju hilir, menjadi salah satu atraksi desa wisata yang dikelola oleh KUPS Way Kalam, Kabupaten Lampung Selatan. Biro Perencanaan mendapatkan kesempatan untuk melakukan *deskstudy* perihal pengembangan KUPS di Provinsi Lampung

Foto oleh: Mahardhika Cahaya Utama

KATA PENGANTAR

Kepala Biro Perencanaan



Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships

– Michael Jordan

Pada kondisi saat ini, dengan dinamisnya perubahan lingkungan dan kemajuan teknologi khususnya informasi dan komunikasi yang demikian pesat, serta tuntutan persaingan global yang semakin ketat, membuat publik sangat peka terhadap kinerja pemerintahan dalam menyediakan pelayanan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah dituntut untuk mampu menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Biro Perencanaan sebagai Koordinator Layanan Perencanaan di lingkup Kementerian LHK memiliki peran yang strategis dalam mendorong modernisasi birokrasi dari aspek akuntabilitas dan peningkatan kinerja pembangunan LHK yang efektif dan efisien.

Pada kerangka siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, komponen utama yang dikawal oleh Biro Perencanaan meliputi aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja.

Implementasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KLHK menjadi kinerja utama yang dikawal oleh Biro Perencanaan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kementerian LHK memperoleh nilai 71,98 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kerjanya. Kinerja akuntabilitas tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil di Kementerian LHK sudah mulai berjalan dengan baik, meskipun sangat perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut. Beberapa catatan utama yang menjadi perhatian bersama adalah bagaimana agar hasil analisis capaian kinerja pada tahun sebelumnya bisa menjadi dasar untuk pengambilan keputusan strategis, salah satunya dalam penetapan target kinerja yang lebih baik dari capaian sebelumnya (*challenging*) dan merepresentasikan terwujudnya kinerja *outcome*. Selain itu, perlu dibangun *reasoning* yang memadai jika terdapat kondisi tertentu yang memerlukan penyesuaian target.

Selain aspek Sistem Akuntabilitas Kinerja, nilai atas kualitas pelayanan perencanaan juga dijadikan ukuran komitmen dari standar cara kerja yang dilakukan oleh Biro Perencanaan. Survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap pelayanan Biro Perencanaan menunjukkan nilai yang memuaskan. Kinerja Biro Perencanaan baik dari aspek Perencanaan Program, Anggaran, pengelolaan dana hibah

dan dana transfer hingga aspek Pengelolaan Kinerja yang meliputi evaluasi kinerja, pelaporan, pengelolaan kerja sama dalam negeri serta layanan ketatausahaan menunjukkan peningkatan tingkat kepuasan.

Puji syukur pada Allah SWT, sebagai bagian dari pertanggungjawaban organisasi, maka Laporan Kinerja 2022 ini akan kami sajikan untuk menggambarkan seluruh kinerja yang ada di Biro Perencanaan. Kinerja tersebut terdiri atas kinerja layanan utama maupun layanan pendukung yang telah melekat sebagai komitmen organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2022. Segala pencapaian kinerja, kekurangan maupun kelebihan tentunya merupakan buah dari kerja sama dan koordinasi tim yang ada di Biro Perencanaan, baik secara internal maupun eksternal. Semoga niat tulus dalam memberikan pelayanan birokrasi tetap mewarnai setiap langkah di Biro Perencanaan ke depannya. Untuk menuju birokrasi yang lincah (*agile*), responsif, dinamis, berjejaring, dan berkolaborasi.

Jakarta, 16 Januari 2023

Kepala Biro Perencanaan,



Dr. Ir. Apik Karyana, M.Sc

IKHTISAR KINERJA

NILAI KINERJA BIRO PERENCANAAN

96,48%

Nilai kinerja Biro Perencanaan pada tahun 2022 senilai **96,48%**

REALISASI ANGGARAN

99,81%

Realisasi anggaran keseluruhan termasuk dengan pelaksanaan hibah luar negeri sebesar **99,81%**

EFISIENSI PENGUNAAN ANGGARAN

1,03

Efisiensi penggunaan anggaran Biro Perencanaan senilai **1,03**

MENJADI suatu kewajiban bagi setiap entitas penyelenggara pemerintahan untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja. Hal tersebut menjadi pertanggungjawaban kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan anggaran yang bersumber dari pajak rakyat maupun pendapatan negara yang lain.

Seluruh capaian beserta kendala yang dialami

termasuk penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, disajikan dalam sebuah laporan kinerja.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP

dilaksanakan secara berjenjang untuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LKj disusun selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Biro Perencanaan sebagai salah satu entitas penyelenggara pemerintahan memiliki tugas dan fungsi terkait dengan koordinasi akuntabilitas kinerja KLHK, yang mencakup: Penyiapan koordinasi penyusunan bahan rencana dan program Nasional, Kementerian dan Sekretariat Jenderal, serta penyusunan rencana dan program Biro; Penyiapan koordinasi penyusunan program anggaran di lingkungan Kementerian; Penyiapan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan program anggaran Kementerian, Sekretariat Jenderal, serta di Biro; Penyiapan koordinasi kerja sama dalam negeri dan penyiapan koordinasi pengelolaan hibah; serta Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Seluruh proses bisnis tersebut di atas dirangkum dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yang menunjukkan ukuran keberhasilan dan prestasi kerja yang dilakukan dalam satu tahun anggaran, yaitu Nilai Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan dan Nilai SAKIP Kementerian LHK. Beberapa terobosan dan inovasi telah dilakukan untuk mengawal SAKIP KLHK untuk tetap dalam tren yang positif meskipun Pandemi Covid-19 masih membayangi di tahun 2022. *Refocusing* dan penghematan dilakukan untuk memastikan efisiensi belanja negara dan memulihkan ekonomi nasional.

Sasaran kegiatan dari kinerja Biro Perencanaan yaitu “Meningkatnya layanan

perencanaan dan evaluasi pembangunan LHK yang efektif. Milestone 2022 ialah terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai SAKIP yang selalu meningkat dengan diimbangi perbaikan kinerja di tapak. Untuk capaian Nilai SAKIP, dari target yang direncanakan sebesar 76 poin, KLHK memperoleh nilai sebesar 71,98 poin. Meskipun prestasi ini bernilai 94,71 %, namun secara tren nilai per tahun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Beberapa catatan perbaikan yang diperlukan dari penilaian SAKIP akan menjadi prioritas umpan balik untuk proses ke depan.

Untuk capaian kualitas layanan koordinasi perencanaan yang diberikan Biro Perencanaan sebagai salah satu pengampu kegiatan di Program Dukungan Manajemen di KLHK, hasil pengukuran menunjukkan nilai 3,93 dari skala 4 atau memuaskan. Layanan rutin yang dilakukan mencakup koordinasi perencanaan program, anggaran, pengelolaan hibah dan dana transfer daerah bidang LHK, pengelolaan kinerja yang meliputi evaluasi dan pelaporan, layanan koordinasi kerja sama dalam negeri lingkup KLHK dan layanan tata usaha internal Biro Perencanaan.

Masih dalam kerangka pencapaian SAKIP dan peningkatan kualitas layanan koordinasi perencanaan, pada tahun 2022 Biro Perencanaan telah memberikan layanan koordinasi terkait dengan Pengelolaan Hibah Luar Negeri, Dana Transfer Daerah Bidang LHK, dan Koordinasi Kerja Sama Dalam

Negeri. Koordinasi dalam negeri di Kementerian LHK bertujuan untuk mendukung pencapaian IKU, IKP, IKK setiap satuan kerja di KLHK dengan melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal serta sebagai *creative financing* dan *filling the gap* untuk program kegiatan yang tidak di dani APBN.

Pada tahun 2022, sebagai bagian dari upaya pengarusutamaan dalam RPJMN 2020 - 2024, Biro Perencanaan juga mengawal koordinasi terkait Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Pada tahun 2022, KLHK telah berhasil meraih peringkat Terbaik 1 dari kategori Kementerian/Lembaga pada ajang kompetisi Indonesia SDGs *Action Award* 2022.

Seluruh pencapaian kinerja Biro Perencanaan tahun 2022 disajikan pada laporan kinerja ini sebagai wujud dari penerapan *good governance* melalui sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, tertelusur, dan sah. Seluruh pencapaian tersebut akan dijadikan umpan balik bagi perencanaan ke depan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

ARSITEKTUR KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA

BIRO PERENCANAAN

Meningkatkan koordinasi perencana dan evaluasi

BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

BAGIAN PENGELOLAAN KINERJA

97,83%	Meningkatkan Nilai perencanaan kinerja
100%	Mempertahankan jumlah dokumen perencanaan yang holistik, integratif, dan berbasis spasial
100%	Mempertahankan persentase jumlah anggaran yang diblokir menurun
44,32%	Meningkatkan nilai indikator jumlah revisi anggaran seluruh satuan kerja
100%	Mempertahankan nilai indikator deviasi rencana penarikan dana
99,25%	Meningkatkan tingkat kepuasan layanan perencanaan pembangunan LHK
99,25%	Tingkat kepuasan layanan penyusunan anggaran

96,56%	Meningkatkan nilai capaian kinerja
66,43%	Meningkatkan nilai pengukuran kinerja
96,17%	Meningkatkan nilai pelaporan kinerja
90,13%	Meningkatkan nilai evaluasi kinerja
100%	Mempertahankan persentase capaian dokumen laporan dan evaluasi kinerja yang dapat digunakan untuk Evaluasi AKIP
100%	Mempertahankan persentase Kerjasama dalam Negeri yang sesuai dengan Renstra KLHK
96,75%	Meningkatkan tingkat kepuasan layanan Evaluasi dan laporan kinerja pembangunan LHK
89%	Meningkatkan tingkat kepuasan internal layanan ketatausahaan Biro Perencanaan



Scan barcode di samping untuk membaca Risalah Perjalanan Lapangan Biro Perencanaan Bersama tentang pengelolaan tanaman mangrove bersama BRGM

Tegakan mangrove tumbuh di wilayah tambak milik masyarakat yang dianggap dapat menjaga daerah pesisir dari hempasan air laut. Mangrove ini ditanam dalam kegiatan Padat Karya Rehabilitasi Mangrove di Desa Tambakbulusan, Kabupaten Demak.

Foto Oleh : Erwin Febriyanto

KALEIDOSKOP TAHUN 2022

1 Januari

- Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Sekretariat Jenderal Tahun 2021
- TM Penyusunan Pagu Indikatif HLN TA 2023 dan Jangka Menengah 2024–2027
- MoU kerjasama KLHK dan PBNU
- Laporan capaian e-Monev dan RKP BAPPENAS TA 2021 lingkup KLHK



3 Maret

- Diskusi IKN dan *Workshop FoLU Net Sink* 2030 di Balikpapan
- *Virtual Meeting Series* Infografis Pencapaian SDGs KLHK 2021 dan Strategi Tindak Lanjut
- Bimbingan Teknis Fungsional Perencanaan dan Analisis Anggaran lingkup KLHK



5 Mei

- Rapat Verifikasi Capaian Aksi Tematik Periode B04 Pantauan Kantor Staf Presiden
- Rapat Monev Kinerja KLHK dan SETJEN KLHK TW I TA 2022



2 Februari

- Laporan Kinerja Kementerian LHK Tahun 2021
- Kunjungan Presiden RI untuk pengesahan SK Hutan Sosial dan SK TORA serta penanaman rehabilitasi hutan dan lahan

4 April

- Laporan DAK 2021
- Kunjungan tim ke tingkat tapak dalam rangka pemantauan pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) KLHK dan DAK bidang Lingkungan Hidup



6 Juni

- Kongres Kehutanan Indonesia ke-VII
- TM Pembahasan Pagu Indikatif Kementerian LHK TA 2023

7 Juli

- Bahan Pidato Kenegaraan dan Bahan Lampid disusun
- Rapat Verifikasi Capaian Aksi Tematik Periode B06 dan Revisi Target Periode B09 B012 Pantauan Kantor Staf Presiden
- Rapat Monev Kinerja KLHK dan SETJEN KLHK TW II TA 2022
- Penelitian RKA-K/L



8 Agustus

- MoU Kerjasama KLHK dan PT. Adaro
- *Entry meeting* Pelaksanaan Evaluasi SAKIP-RB Tahun 2021
- Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan DAK Fisik TA 2023

9 September

- Pertemuan tiga pihak penyusunan data pada aplikasi Krisna
- *Gleads Goes To Campus*
- MoU kerjasama KLHK dan Unsyiah
- Persiapan SDGs *Award*
- Rapat Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Forclime FC
- Rapat Kerja tentang persetujuan alokasi anggaran TA 2023



10 Oktober

- Rapat Verifikasi Capaian Aksi Tematik Periode B09 Pantauan Kantor Staf Presiden
- Rapat Monev Kinerja KLHK dan Setjen KLHK TW III TA 2022 dan Sosialisasi E-SAKIP
- Pemantapan Rencana Kerja KLHK Tahun 2023
- Bimtek Menuju Efektifitas Pengawasan Ontern Atas Pengarusutamaan Gender Kementerian LHK

11 November

- Evaluasi Pelaksanaan Program FORCLIME FC
- Penilaian SPIIP Terintegrasi 2022 oleh BPKP
- Peningkatan Kualitas Kerja Sama dalam Negeri dan Bimtek Aplikasi SIKERJA
- Renja KLHK dan SETJEN KLHK 2023
- Pembahasan RKP DBH DR TA 2023
- Penetapan Rencana Kerja DAK Fisik Penugasan LHK TA 2023
- Penelaahan RKA-K/L



12 Desember

- SDGs *Annual Conference* dan Pengumuman Pemenang SDGs *Award*
- Rapat Monev Kinerja KLHK dan Setjen KLHK TW IV TA 2022
- Festival Perempuan Cinta Ibu Bumi
- Suplemen Revisi Renja KLHK dan Setjen KLHK 2022
- Penyerahan DIPA dan penandatanganan PK Menteri dan Eselon I 2023
- PK Revisi Eselon I 2022
- PK lingkup Setjen 2023

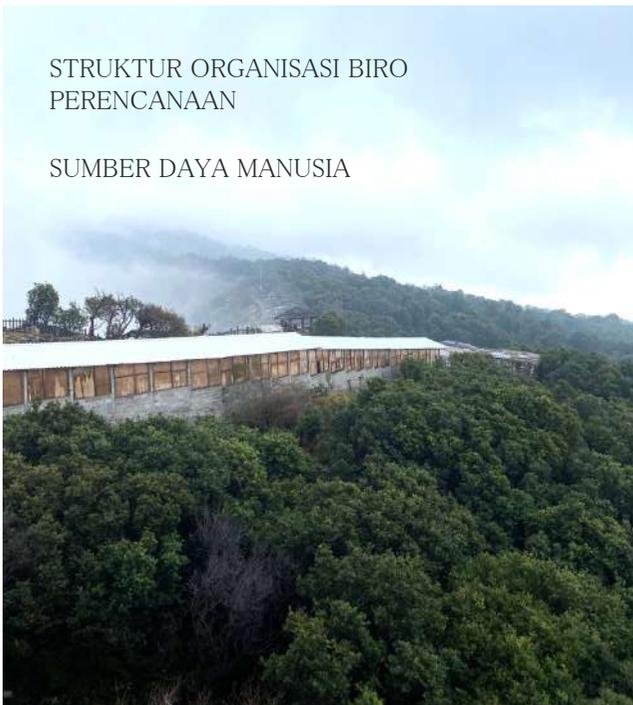
DAFTAR ISI

- VII** KATA PENGANTAR
- IX** IKHTISAR EKSEKUTIF
- XIII** KALEIDOSKOP BIROCAN 2022

1

PENDAHULUAN

- 3** STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN
- 5** SUMBER DAYA MANUSIA



2

PERENCANAAN KINERJA

- 11** RENCANA STRATEGIS
- 13** RENCANA KERJA
- 14** PERJANJIAN KINERJA
- 15** POHON KINERJA

3

AKUNTABILITAS KINERJA

- 21** TINGKAT KEPUASAN LAYANAN PERENCANAAN
- 35** NILAI SAKIP KLHK
- 47** KINERJA ANGGARAN BIRO PERENCANAAN
- 51** KINERJA BAGIAN BIRO PERENCANAAN

4

PENUTUP

- 57** CATATAN PENUTUP
- 61** LAMPIRAN



- 63** CAPAIAN KERJASAMA, HIBAH, DANA TRANSFER DAN SPIP
- 75** PENGARUSUTAMAAN TPB/SDGs
- 79** PENGARUSUTAMAAN GENDER
- 85** GLOSARIUM

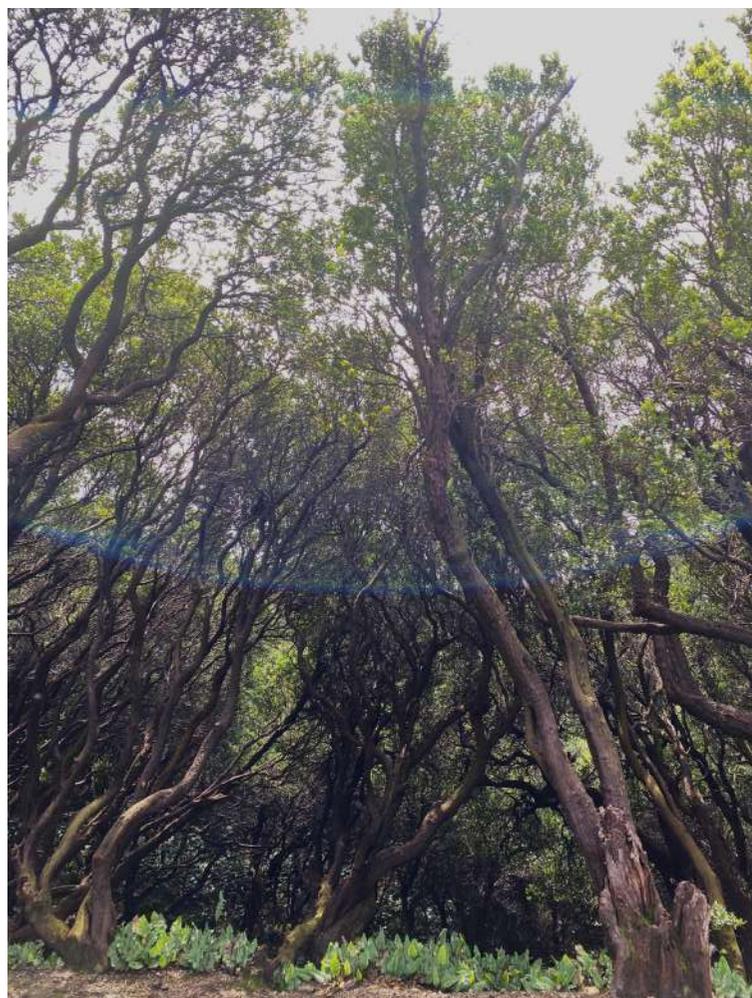
DAFTAR GAMBAR



- 6 **Gambar 1.** Grafik sebaran pegawai biro perencanaan berdasarkan lokus kegiatan
- 6 **Gambar 2.** Grafik sebaran pegawai biro perencanaan berdasarkan Pekerjaan
- 6 **Gambar 3.** Grafik sebaran pegawai satker biro perencanaan berdasarkan pendidikan
- 6 **Gambar 4.** Grafik sebaran pegawai tenaga FORCLIME berdasarkan pendidikan
- 7 **Gambar 5.** Grafik struktur sumber daya manusia biro perencanaan berdasarkan kelas golongan dan umur
- 22 **Gambar 6.** Grafik kecenderungan nilai layanan Biro Perencanaan per tahun
- 23 **Gambar 7.** Grafik profil responden survei layanan kepuasan berdasarkan jenis kelamin dan kelas pendidikan pada semester 1
- 23 **Gambar 8.** Grafik profil responden survei layanan kepuasan berdasarkan jenis kelamin dan kelas pendidikan pada semester 2
- 26 **Gambar 9.** Grafik sebaran nilai indeks layanan per Ekoregion
- 27 **Gambar 10.** Grafik capaian layanan kepuasan berdasarkan bagian lingkup Biro Perencanaan
- 27 **Gambar 11.** Grafik capaian layanan kepuasan berdasarkan indikator survei kepuasan berdasarkan bagian lingkup Biro Perencanaan
- 28 **Gambar 12.** Grafik tingkat layanan kepuasan berdasarkan unit kerja eselon 1
- 29 **Gambar 13.** Grafik capaian indeks layanan kepentingan berdasarkan bagian lingkup Biro Perencanaan
- 29 **Gambar 14.** Grafik capaian per komponen layanan kepentingan berdasarkan pedoman kuesioner MenPan-RB 14/2017
- 37 **Gambar 15.** Grafik capaian SAKIP KLHK per tahun
- 38 **Gambar 16.** Grafik capaian komponen nilai SAKIP
- 38 **Gambar 17.** Grafik capaian komponen nilai SAKIP per tahun
- 39 **Gambar 18.** Grafik capaian SAKIP KLHK per tahun
- 44 **Gambar 19.** Grafik hasil evaluasi SAKIP internal per eselon I
- 45 **Gambar 20.** Grafik hasil evaluasi SAKIP per unit kerja eselon 1 berdasarkan penilaian internal
- 48 **Gambar 21.** Grafik perkembangan pagu dan realisasi anggaran per tahun pada Biro Perencanaan
- 49 **Gambar 22.** Grafik kinerja anggaran Biro Perencanaan T.A 2022
- 50 **Gambar 23.** Grafik kinerja anggaran Biro Perencanaan per bulan T.A 2022
- 54 **Gambar 24.** Grafik nilai indeks kepuasan layanan internal dan komponen penyusunnya
- 62 **Gambar 25.** Grafik sebaran surat masuk setiap Bagian lingkup Biro Perencanaan
- 62 **Gambar 26.** Grafik sebaran surat masuk per bulan di Biro Perencanaan
- 69 **Gambar 27.** Grafik sebaran kerjasama di Unit Kerja Eselon 1
- 69 **Gambar 28.** Grafik status dokumen kerjasama KLHK
- 74 **Gambar 29.** Grafik penilaian mandiri maturitas SPIP berdasarkan unit kerja eselon 1

DAFTAR TABEL

16	Tabel 1. Indikator kinerja bagian di biro perencanaan
31	Tabel 2. Saran dan masukan yang disampaikan oleh responden
32	Tabel 3. Saran dan masukan oleh responden pada tahun sebelumnya yang telah ditindak lanjuti
37	Tabel 4. Perbandingan komponen nilai SAKIP tahun 2021 dengan tahun 2022
45	Tabel 5. Komponen implementasi SAKIP per eselon I
53	Tabel 6. Sasaran dan capaian kinerja bagian rencana, program dan anggaran Biro Perencanaan
53	Tabel 7. Sasaran dan capaian kinerja bagian pengelolaan kinerja Biro Perencanaan
65	Tabel 8. Tabel penurunan emisi di 3 kabupaten wilayah kerja FORCLIME



PENDAHULUAN

View salah satu jalur *trekking* di Tangkuban Perahu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Biro Perencanaan berkesempatan untuk melakukan kunjungan dalam rangka bimbingan pengelolaan kawasan konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tangkuban Perahu

Foto oleh: Ineke Tya Claudya Sarwono Putri



Merajut simpul-simpul keberhasilan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Biro perencanaan senantiasa merajut simpul-simpul keberhasilan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nyatanya melalui pemantapan tata kelola perencanaan, penganggaran dan pengelolaan kinerja sebagaimana tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 “Pemulihan Ekonomi dan dan Reformasi Struktural”. Kinerja Kementerian LHK tampak terlihat perannya dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terdampak oleh pandemi Covid-19 sembari tetap meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menjaga keanekaragaman hayati. Kementerian LHK juga turut menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar hutan, mengentaskan kemiskinan ekstrem serta menjaga kesetimbangan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Merujuk pada Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Biro Perencanaan memiliki tugas dan fungsi yaitu: (a) Melaksanakan koordinasi dan integrasi penyusunan bahan rencana program, kegiatan, dan anggaran Kementerian; (b) Melaksanakan pengelolaan Kerja sama dalam negeri; (c) Melaksanakan koordinasi dan

integrasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dana transfer ke daerah dan hibah; (d) Melaksanakan koordinasi dan harmonisasi pemantauan dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan; (e) Menyiapkan koordinasi Kerja sama dalam negeri dan pengelolaan hibah; (f) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga biro.

Biro Perencanaan dalam pelaksanaannya bergerak dinamis, adaptif dan responsif dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional dengan pembangunan bidang LHK serta menjembatani kebijakan tersebut dengan kebutuhan tapak.

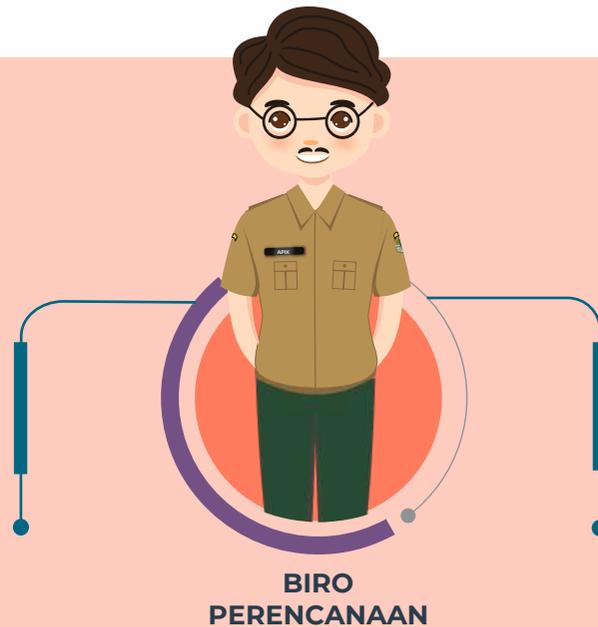
Kinerja Biro Perencanaan dituangkan ke dalam dokumen laporan kinerja. Laporan Kinerja Biro Perencanaan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Biro Perencanaan atas penggunaan anggaran.

Laporan kinerja Biro Perencanaan tahun 2022 berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), didasarkan pada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Laporan kinerja ini juga merupakan

ikhtisar kinerja yang meliputi nilai kinerja (1. Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan dan 2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah KLHK), realisasi anggaran, dan efisiensi kinerja. Laporan kinerja Biro Perencanaan tahun 2022 memuat serangkaian keberhasilan dan/atau kegagalan atas pencapaian rencana, tindakan dan kegiatan atas perencanaan dan perjanjian kinerja Biro Perencanaan dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional melalui program Reformasi Birokrasi. Laporan kinerja Biro Perencanaan tahun 2022 ini juga menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tahun 2022. Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Perencanaan untuk meningkatkan kinerjanya.

Selanjutnya sebuah harapan yang dititipkan pada dokumen laporan kinerja ini yaitu menjadi bagian masukan dalam penyusunan dokumen dan strategis perencanaan tahun berikutnya.

STRUKTUR ORGANISASI



MENINDAKLANJUTI arahan Presiden Joko Widodo di tahun 2019 mengenai 5 fokus kerja yang akan dituju sampai tahun 2024, dimana salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi. Hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menetapkan Peraturan Menteri LHK No. 15 tahun 2021 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang dibentuk sebagai upaya pencapaian dari fokus kerja pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Sesuai dengan SOTK baru yang telah ditetapkan, dalam hal ini Biro

Perencanaan mengalami transformasi jumlah bagian serta pengalihan pejabat Eselon III dan Eselon IV menjadi jabatan fungsional.

Biro Perencanaan berdasarkan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) sesuai Peraturan Menteri LHK No. 15 tahun 2021 memiliki 6 fungsi yaitu :

1. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi penyusunan bahan rencana program, kegiatan, dan anggaran Kementerian
2. Pelaksanaan pengelolaan Kerjasama dalam negeri
3. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dana transfer ke daerah dan hibah

4. Pelaksanaan koordinasi dan harmonisasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan
5. Penyiapan koordinasi Kerjasama dalam negeri dan pengelolaan hibah
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

Melihat sejarah struktur organisasi Biro Perencanaan yang sebelumnya, untuk Bagian Rencana Program dan Bagian Penyusunan Anggaran kini melebur menjadi Bagian Rencana, Program, dan Anggaran. Serta sebelumnya untuk bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hibah kini bergabung dengan Bagian Evaluasi menjadi Bagian Pengelolaan Kinerja yang juga membawahi subbagian Tata Usaha.

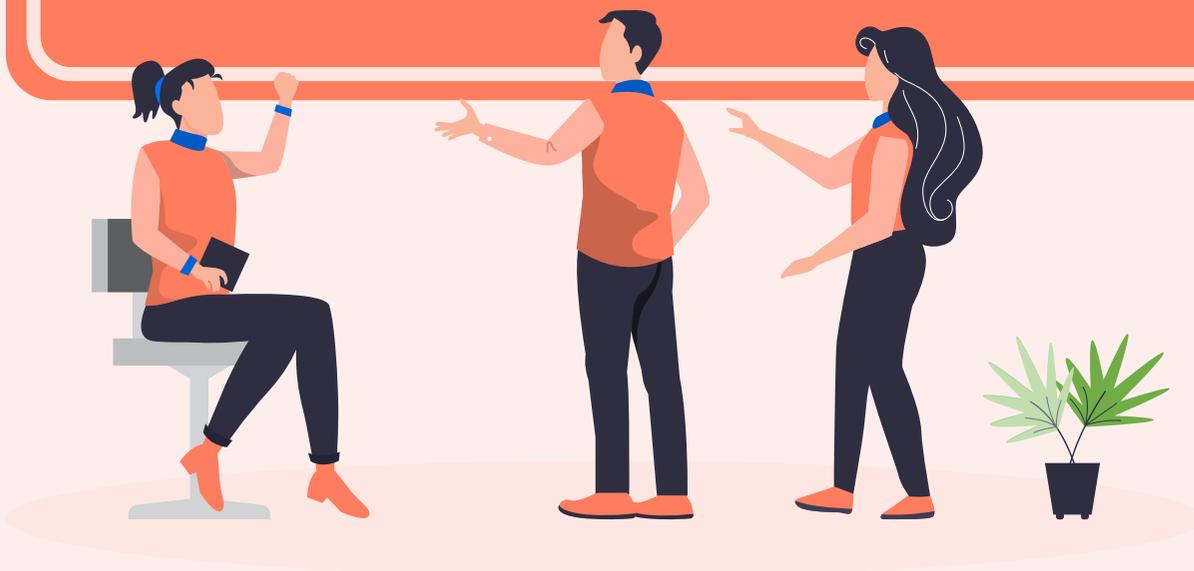
Bagian Rencana, Program, dan Anggaran

Bagian ini melebur untuk tugas dan fungsi dari Bagian Rencana Program dan Bagian Penyusunan Anggaran. Adapun tugas yang diampu adalah melaksanakan koordinasi dan integrasi penyusunan bahan rencana program, kegiatan, dan anggaran kementerian, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dana transfer ke daerah dan hibah. Kinerja tahun 2022 Bagian ini terus mengawal anggaran kementerian di tahun 2022 dimana terdapat penyesuaian APBN, serta Menyusun rencana anggaran dan kegiatan tahun 2023.

Bagian Pengelolaan Kinerja

Bagian ini mengampu tugas yaitu melaksanakan koordinasi dan harmonisasi pemantauan dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, penyiapan koordinasi dan pengelolaan Kerjasama dalam negeri, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. Di tahun 2022 Bagian ini terus mengawal dan mengelola kinerja kementerian yang semakin positif. Memantau kinerja kementerian melalui tematik dalam hal program prioritas nasional dan pengentasan kemiskinan ekstrem serta dalam pemulihan ekonomi nasional.

Biro Perencanaan dalam kinerjanya terus mengawal segala kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari entitas tapak untuk dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat atau *outcome* yang senantiasa diharapkan dari setiap adanya kegiatan. Segala koordinasi dilakukan secara internal dengan seluruh unit kerja Eselon I maupun eksternal dengan Kementerian / Lembaga terkait serta pemangku kepentingan dalam hal kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan lingkungan dan hutan yang sehat bagi masyarakat Indonesia.



SUMBER DAYA MANUSIA BIRO PERENCANAAN DAN TENAGA FORCLIME

138 Pegawai Total Sumber Daya Manusia

Sebaran Pegawai Biro Perencanaan per Jenis Kelamin



73,20%

Jumlah pegawai Biro Perencanaan sejumlah 101 orang (satker Biro Perencanaan 42 orang dan tenaga Project FORCLIME 59 orang)



26,80%

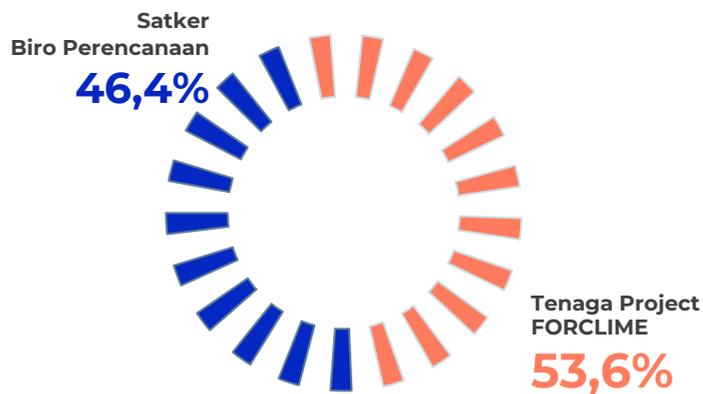
Jumlah pegawai Biro Perencanaan sejumlah 37 orang (satker Biro Perencanaan 22 orang dan tenaga Project FORCLIME 15 orang)

TOTAL PEGAWAI Biro Perencanaan memiliki jumlah sebanyak 138 Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional. SDM tersebut terdiri dari 64 orang pegawai di satuan kerja (Satker) Biro perencanaan dan 74 tenaga pelaksana program Forclime. Sumber daya manusia satker Biro Perencanaan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian ditambah satu bagian sub bagian tata usaha. Bagian Rencana Program dan Anggaran (RPA) sebanyak 26; Bagian Pengelolaan Kinerja (PK) sebanyak 22 orang dan Sub bagian Tata usaha sebanyak 16 orang. Sebanyak 74 orang tenaga pelaksana program Forclime. Dengan pembagian personil Forclime yaitu: sebanyak 15 orang pada unit National Program Management Unit (NPMU) Pusat dan 69 personil berada di District Program Management Unit (DPMU). DPMU Forclime tersebar kembali pada 3 (tiga) lokus: 1. Kabupaten yaitu Kapuas Hulu sebanyak 26 orang, Berau 27 orang, dan Malinau sebanyak 6 orang.

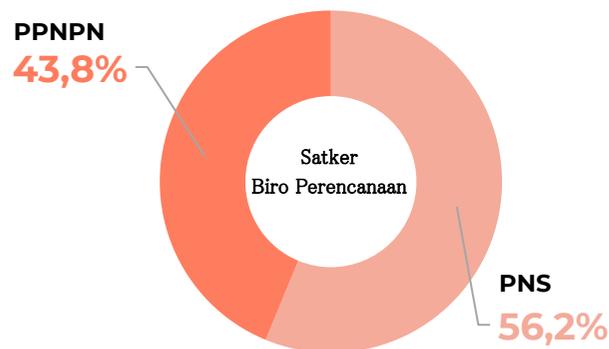


SEBARAN PEGAWAI BIRO PERENCANAAN

Sebaran Pegawai Biro Perencanaan per Lokus Kegiatan



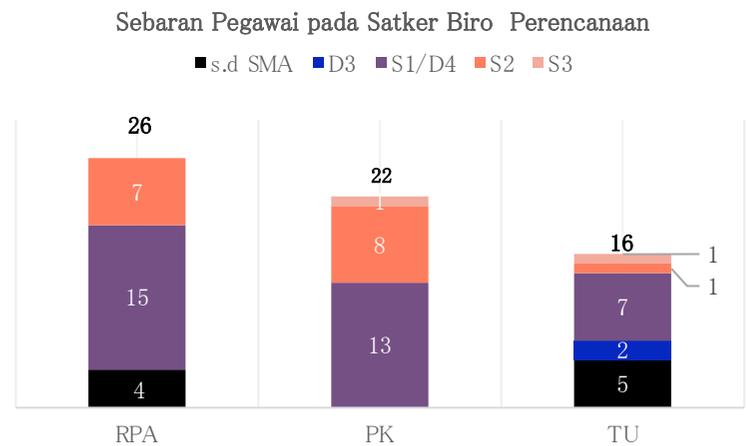
Gambar 1. Grafik sebaran pegawai biro perencanaan berdasarkan lokus kegiatan



Gambar 2. Grafik sebaran pegawai biro perencanaan berdasarkan Pekerjaan

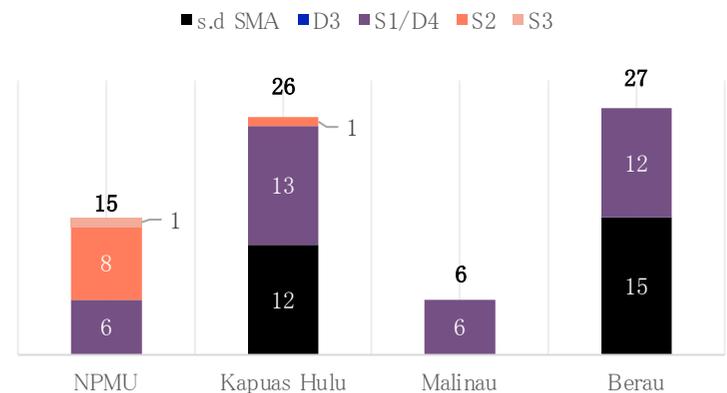
Pegawai satker Biro Perencanaan berjumlah 64 orang dengan rincian sebanyak 56,2% atau 36 orang sebagai ASN dan sebanyak 43,8% atau 28 orang sebagai PPNPN.

Sebaran Pegawai Biro Perencanaan per Tingkat Pendidikan



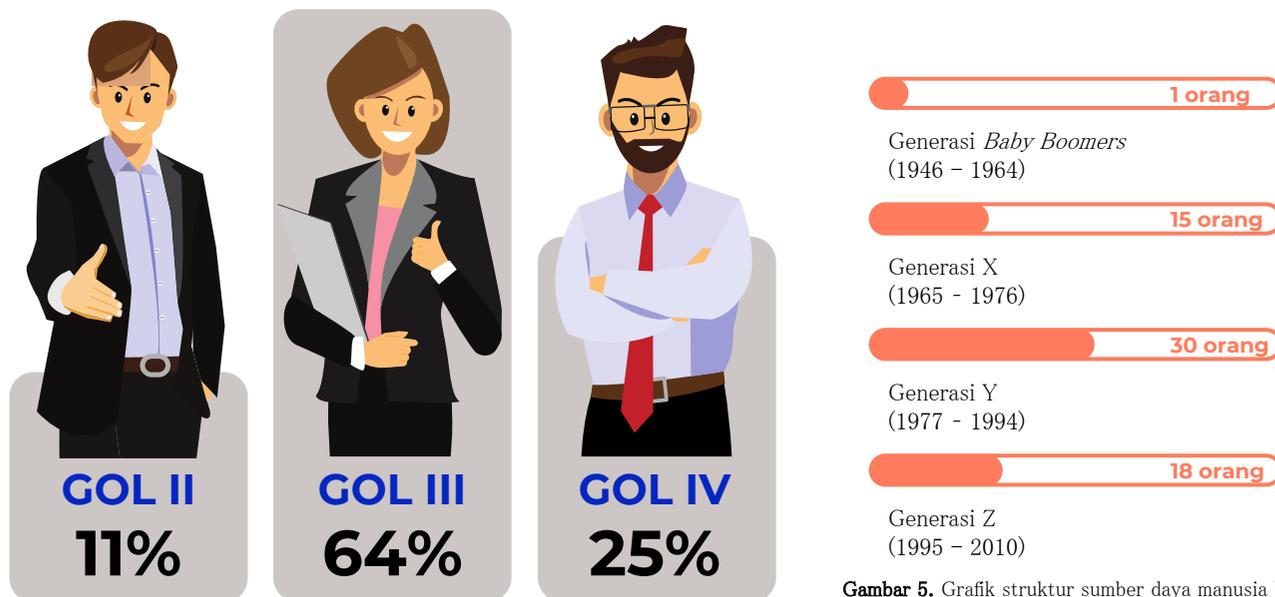
Gambar 3. Grafik Sebaran Pegawai Satker Biro Perencanaan Berdasarkan Pendidikan

Sebaran Pegawai pada Tenaga Project FORCLIME



Gambar 4. Grafik Sebaran Pegawai Tenaga Forclime berdasarkan pendidikan

STRUKTUR SUMBER DAYA MANUSIA BIRO PERENCANAAN



Gambar 5. Grafik struktur sumber daya manusia biro perencanaan berdasarkan kelas golongan dan umur

TIDAK DAPAT dipungkiri bahwa suatu organisasi yang baik pasti didukung dengan sumber daya manusia yang baik pula. Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugasnya pada tahun 2022 didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 64 orang. Sebagai organisasi pemerintahan, sumber daya manusia yang ada di satuan kerja Biro Perencanaan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Berdasarkan dari tingkat Golongannya, dari 36 ASN di Biro Perencanaan terbagi ke dalam 3 golongan.

Sebanyak 4 orang atau 11% ada pada golongan II, kemudian sebanyak 23 orang atau 64% ada pada golongan III, dan sebanyak 9 orang atau 25% menduduki golongan IV.

Jika dilihat dari segi usia, sumber daya manusia di Biro Perencanaan dapat diklasifikasikan berdasarkan 4 generasi. Pada generasi Boomers sebanyak 1 orang, generasi X sebanyak 15 orang, kemudian generasi Y sebanyak 30 orang, dan generasi Z sebanyak 18 orang. Dapat dilihat bahwa pada generasi Y atau sering disebut generasi Milenial, sumber daya manusia di Biro Perencanaan memiliki

jumlah yang paling banyak. Hal ini menandakan bahwa dalam setiap melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan telah terbiasa dalam memanfaatkan teknologi dalam segala aspek serta lebih inovatif dan kreatif dalam berkinerja. Pemetaan jumlah dan potensi sumber daya manusia yang ada merupakan suatu awalan untuk mencapai keberhasilan kinerja. Sehingga sumber daya manusia yang ada tersebar ke dalam dua bagian sesuai kapasitasnya dan dapat berkinerja secara optimal.



Bimbingan dan arahan oleh Bapak Kepala Biro Perencanaan perihal persiapan pelaporan akhir tahun dan penyusunan dokumen perencanaan salah satunya Laporan Kinerja di ruang rapat Biro Perencanaan, Gedung Manggalawanabakti

Foto oleh: Abdul Kholik

PERENCANAAN KINERJA

Berjajar rapi tempat singgah wisatawan untuk sekedar melepas lelah setelah *trekking* di jalur Gunung Tangkuban Perahu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Biro Perencanaan berkesempatan untuk melakukan kunjungan dalam rangka bimbingan pengelolaan kawasan konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tangkuban Perahu

Foto oleh: Ineke Tya Claudya Sarwono Putri



Lincah dan antisipatif terhadap segala perkembangan yang terjadi sangat cepat di zaman ini menjadi sebuah keharusan.

Waktu berlalu tak kenal tunggu. Ia membawa perkembangan dalam setiap detik dan menitnya. Hingga kini kita dihadapkan pada sebuah zaman dimana perubahan terjadi secara cepat, kompleks dan penuh risiko. Oleh karena itu, menjadi sebuah keharusan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk dapat beradaptasi dengan menggunakan model dan nilai-nilai baru untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi.

Jika berkaca ke belakang, KLHK sudah banyak melaksanakan program dan kegiatan penguatan pengelolaan tapak lingkungan hidup dan kehutanan untuk meningkatkan produktivitas nasional serta membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing. Berangkat dari hal tersebut, agar KLHK dapat terus merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan dengan lebih baik, KLHK melakukan perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no.15 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja lingkungan hidup dan kehutanan.

Perubahan tata Kelola dan ketentuan yang dilakukan KLHK bertujuan untuk memperkuat

pesan pembangunan LHK dalam transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Selain itu, transformasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi dan upaya KLHK agar lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat. Perencanaan efektif yang didukung dengan penganggaran tepat sasaran dapat menghantarkan kinerja berjalan baik seiring dengan suasana perubahan. Biro perencanaan dengan perannya untuk membantu penyelenggaraan pembangunan LHK harus dapat mengimplementasikan perubahan dalam aspek struktural, perencanaan program dan anggaran, serta tata kelola kinerja. Secara struktural, terdapat beberapa perubahan dengan maksud meningkatkan debirokratisasi dan kemudahan berusaha. Perencanaan program dibuat dengan lebih menajamkan sasaran dan target kinerja. Penganggaran akan diintervensi secara tepat dan efisien terhadap kinerja berorientasi hasil dengan menciptakan standar-standar biaya kegiatan serta instrumen pengendaliannya. Tata Kelola kinerja disusun dengan sebuah pedoman kinerja dan pengendaliannya sebagai tata aturan yang disepakati agar tercipta kinerja lebih akuntabel. Aksi kolaboratif juga diperlukan dalam proses perencanaan dan penganggaran dengan kerjasama lintas sektor.

Sebagai upaya dalam menghadapi tantangan global, dimana permasalahan lingkungan hidup menjadi risiko jangka panjang teratas dalam survei persepsi risiko global *World Economic Forum 2020*. Tugas besar KLHK dalam menghadapi mitigasi, adaptasi akan perubahan iklim, dan menjaga keanekaragaman hayati akan semakin berat. Biro perencanaan sebagai bagian penting dari KLHK tentunya selalu berusaha meningkatkan perencanaan kinerja, antisipatif terhadap masalah yang mungkin berkembang, dan mendorong struktur pengelolaan penganggaran yang mampu merubah cara kerja. Untuk mendukung segala upaya tersebut, dibutuhkan sebuah pedoman agar pelaksanaan dari setiap rencana berjalan dengan baik.

Rencana Strategi Biro Perencanaan 2020–2024 ini disusun sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan kinerja Biro Perencanaan untuk mendukung seluruh kegiatan Sekretariat Jenderal dan pembangunan KLHK yang lebih baik.

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

2023

IKK 1. Nilai SAKIP 78 Poin
IKK 2. Tingkat Kepuasan Layanan
Perencanaan 4 Poin

Terwujudnya budaya kerja melayani dalam Aparatur Sipil Negara Biro Perencanaan dengan penilaian kepuasan para *stakeholder* yang memuaskan.

4

2021

IKK 1. Nilai SAKIP 74 Poin
IKK 2. Tingkat Kepuasan Layanan
Perencanaan 4 Poin

Perbaiki tata kelola perencanaan kinerja, pelayanan dan sistem data informasi.

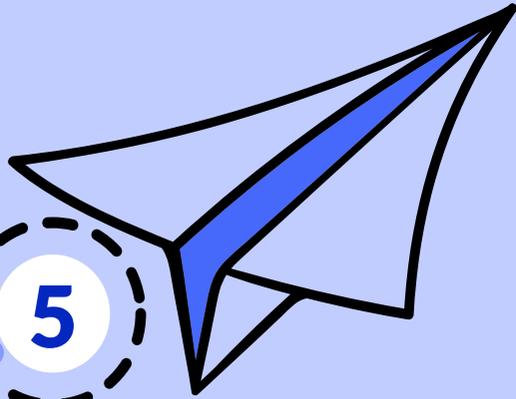
2

2020

IKK 1. Nilai SAKIP 72 Poin
IKK 2. Tingkat Kepuasan
Layanan Perencanaan 4 Poin

Penataan kelembagaan dan penguatan manajemen SDM Perencana menuju SDM yang profesional dan kompeten

1



5

2024

IKK 1. Nilai SAKIP 80 Poin

IKK 2. Tingkat Kepuasan Layanan
Perencanaan 4 Poin

Terwujudnya pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel dan profesional dalam mendukung reformasi birokrasi KLHK

3

2022

IKK 1. Nilai SAKIP 76 Poin

IKK 2. Tingkat Kepuasan Layanan
Perencanaan 4 Poin

Terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai SAKIP yang selalu meningkat dengan dibarengi perbaikan kinerja di tapak.



Rencana Strategis
(RENSTRA) Rev.
BIRO PERENCANAAN
TAHUN 2020-2024

RENCANA KERJA TAHUN 2022

Tahun 2022, Biro Perencanaan memiliki tujuan “Membangun nilai SAKIP yang selalu meningkat dengan perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan diikuti perbaikan kinerja di tapak”. Tentu saja dalam mewujudkan tujuan tersebut ditentukan oleh tugas dan fungsi dari Biro Perencanaan yaitu Mewujudkan kualitas dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran pembangunan Kementerian LHK; dan Mewujudkan layanan perencanaan yang baik di lingkungan Kementerian LHK. Biro Perencanaan mempunyai tugas inti untuk melaksanakan koordinasi dan pembinaan rencana, program dan anggaran pembangunan, hingga pemantauan evaluasi dan pelaporan rencana, program, anggaran diharapkan mampu memberikan pelayanan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian LHK dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional. Keseluruhan layanan tersebut dicirikan dari kepuasan pihak yang diberikan pelayanan.

Pembangunan tahun 2022 juga masih berhadapan dengan tantangan berat pandemi covid-19 serta pengaruh yang diberikan. Dalam penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2022, peran serta Kementerian LHK terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional masih menjadi peran utama. Mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Kementerian LHK dituntut untuk mendongkrak Kembali perekonomian nasional yang sempat anjlok akibat efek pandemi dengan sumbangan pendapatan dari sektor kehutanan dan lingkungan. Dalam konteks reformasi struktural, kinerja seluruh kementerian dan Lembaga termasuk Kementerian LHK diajak untuk meningkatkan kompetisi serta produktivitas dengan melakukan pengembangan infrastruktur, meningkatkan sumber daya manusia (SDM), serta memaksimalkan dukungan kelembagaan yang meliputi peningkatan kepastian hukum dan peningkatan efisiensi dari birokrasi.

Seorang fotografer terlihat sedang mengabadikan momen wisatawan saat sedang trekking menuju Curug Ngumpet yang terletak di daerah Sentul, Bogor

Foto Oleh : Erwin Febriyanto



Rencana Kerja (RENJA)
BIRO PERENCANAAN
TAHUN 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Peran Biro Perencanaan sesuai tugasnya mendukung target kinerja Kementerian LHK harus tepat sasaran dan efisien dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan integrasi penyusunan bahan rencana program, anggaran, dan kerja sama, pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada penyusunan perencanaan dan strategi, diperlukan indikator pengukur kinerja untuk menilai apakah seluruh kegiatan yang dilakukan sudah tepat sasaran. Sesuai yang tercantum di Rencana Kerja Kementerian LHK 2022, sasaran kegiatan dari kinerja Biro Perencanaan yaitu **“Meningkatnya layanan perencanaan dan evaluasi pembangunan LHK yang efektif.”**

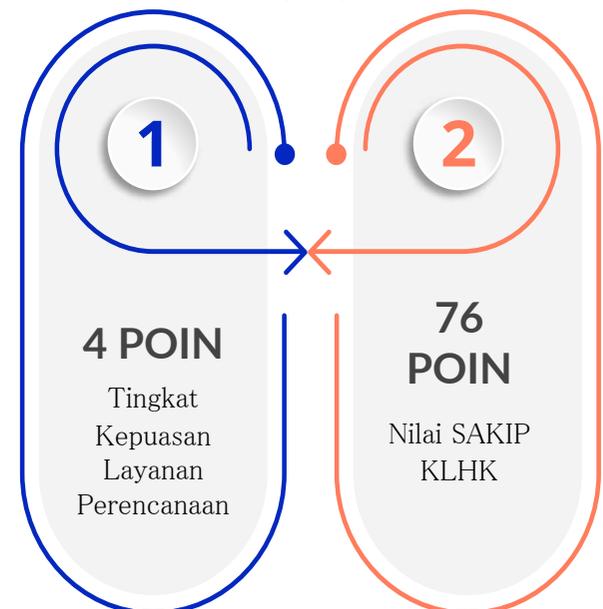
Upaya mencapai budaya berkinerja yang maksimal, diperlukan juga perencanaan yang baik, pemetaan dan pembagian peran bagi setiap Unit Kerja Eselon II (UKE II) di lingkup SETJEN dengan proses tersebut menjadi lebih efisien hingga ke tingkat individu yang mempermudah pencapaian indikator program Sekretariat Jenderal. Biro Perencanaan sebagai salah satu dari UKE II memiliki posisi di bawah Sekretariat Jenderal. Pada rancangan kinerja, Biro Perencanaan memiliki dua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) KLHK: target 76 poin
2. Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan : Target 4 Poin pada skala 1-5

Tercapainya layanan koordinasi perencanaan sangat mengungkit pencapaian dari Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal. Sedangkan untuk pencapaian dari IKK nilai-nilai SAKIP KLHK memiliki peranan penting dalam pencapaian IKP Sekretariat Jenderal yang berupa Nilai Reformasi Birokrasi KLHK. Kedua indikator tersebut merupakan hasil dari koordinasi dari seluruh bagian Biro Perencanaan yang melakukan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang berperan sebagai penjamin Akuntabilitas Kinerja di Kementerian LHK.

Tercapainya layanan koordinasi perencanaan sangat mengungkit pencapaian dari Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal. Sedangkan untuk pencapaian dari IKK nilai-nilai SAKIP KLHK memiliki peranan penting dalam pencapaian IKP Sekretariat Jenderal yang berupa Nilai Reformasi Birokrasi KLHK.

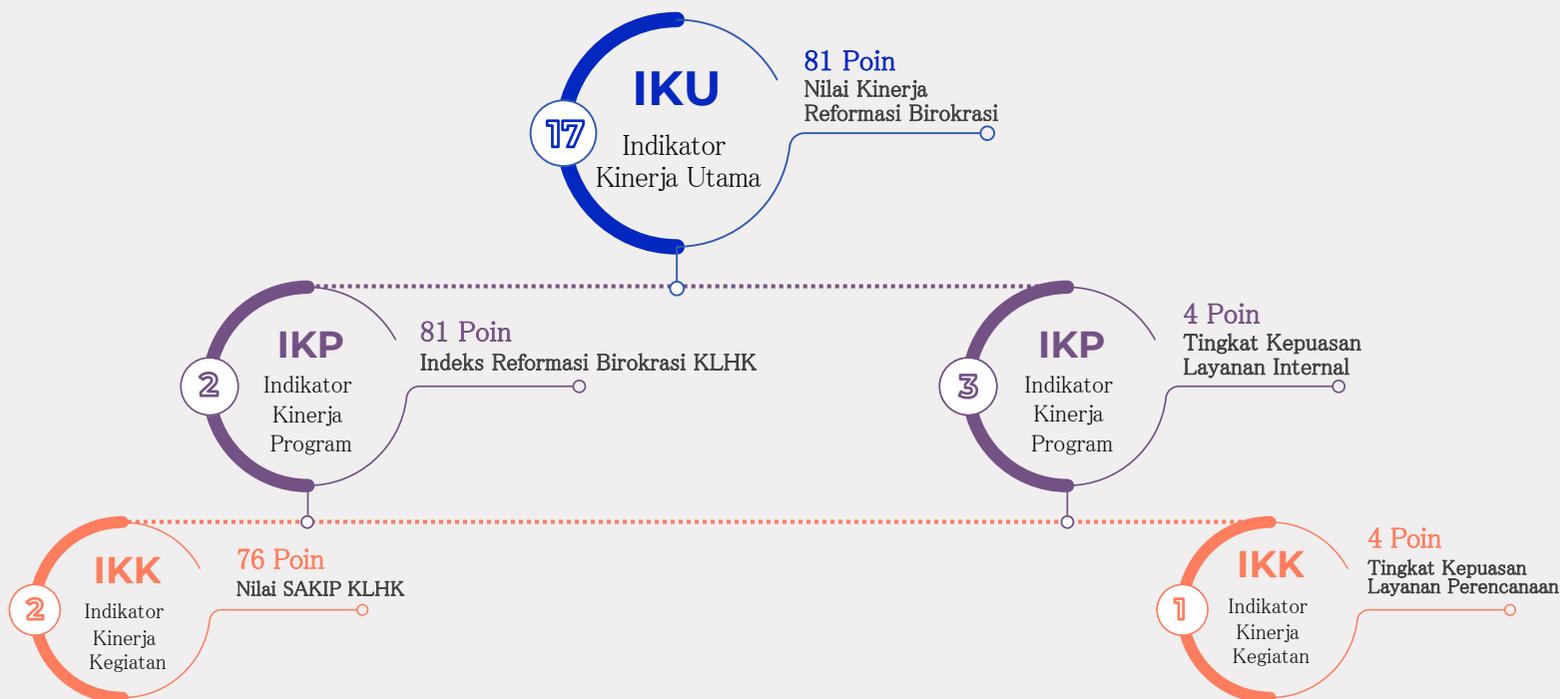
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)



Perjanjian Kinerja (PK)
BIRO PERENCANAAN
TAHUN 2022



POHON KINERJA



PELAKSANAAN kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi melalui proses *cascading* dijabarkan hingga Indikator Kinerja Utama Bagian di lingkup Biro Perencanaan yang digambarkan melalui Pohon Kinerja di atas:

Dimulai dari upaya Biro Perencanaan untuk menginternalisasi salah satu indikator kinerja utama Sekretariat Jenderal, yaitu

meningkatkan nilai reformasi birokrasi. Bentuk internalisasinya adalah penguatan akuntabilitas dan kepuasan layanan perencanaan dan evaluasi pada indikator kinerja utama peningkatan kepuasan layanan internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Biro Perencanaan mempunyai peran untuk mendongkrak Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui 2 IKK, yaitu Nilai SAKIP KLHK dan Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan”

TARGET KINERJA 2022

TAHUN 2022, Biro Perencanaan menargetkan untuk mencapai nilai SAKIP sebesar 76. Pencapaian nilai 76 merupakan akumulasi poin dari setiap komponen pembangun nilai SAKIP. Di tahun 2022, untuk target nilai perencanaan

kinerja adalah 23 poin dari 30, nilai pengukuran kinerja sebesar 17 poin dari 25, nilai capaian kinerja sebesar 16 poin dari 20, nilai pelaporan kinerja sebesar 12 poin dari 15, serta nilai evaluasi kinerja 8 poin dari 10.

Setiap tahunnya untuk target nilai per komponen dibuat meningkat dengan harapan dapat memancing upaya Biro Perencanaan untuk berkinerja lebih baik lagi dari tahun ke tahunnya.

Tabel 1. Indikator Kinerja Bagian di Biro Perencanaan

SASARAN: Terselenggaranya Koordinasi dan pembinaan penyusunan dokumen, perencanaan dan penganggaran pembangunan KLHK (**Bagian Rencana, Program dan Anggaran**)

Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Bagian	Target 2022	Satuan
Layanan Perencanaan (IKK 1)	Tingkat kepuasan layanan perencanaan pembangunan LHK	4	Poin
	Tingkat kepuasan layanan penyusunan anggaran	4	Poin
Nilai SAKIP KLHK (IKK 2)	Nilai Perencanaan Kinerja	23	Poin
	Jumlah dokumen perencanaan yang holistik integratif dan berbasis spasial	14	Dok
	Persentase jumlah anggaran yang diblokir menurun	8	Persen
	Nilai indikator jumlah revisi anggaran seluruh satker	79	Poin
	Nilai indikator deviasi rencana penarikan dana	92	Poin

SASARAN: Terselenggaranya koordinasi dan harmonisasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan LHK, penyiapan koordinasi dan pengelolaan Kerjasama dalam negeri, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro (**Bagian Pengelolaan Kinerja**)

Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Bagian	Target 2022	Satuan
Layanan Perencanaan (IKK 1)	Tingkat kepuasan layanan evaluasi dan laporan kinerja pembangunan LHK	4	Poin
	Tingkat kepuasan internal layanan ketatausahaan Biro Perencanaan	4	Poin
Nilai SAKIP KLHK (IKK 2)	Nilai pengukuran kinerja	17	Poin
	Nilai capaian kinerja	16	Poin
	Nilai pelaporan kinerja	12	Poin
	Nilai evaluasi kinerja	8	Poin
	Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi AKIP	14	Dok





Scan Barcode disamping untuk membaca Risalah Perjalanan Lapangan Biro Perencanaan Bersama BPTH Wilayah II tentang Pengelolaan Persemaian Permanen

Menyortir bibit merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh dua wanita perkasa dalam foto ini. Dengan tangan terampil mereka menyulap setiap tanah yang menempel di tangan menjadi pundi rupiah. Biro perencanaan dalam kunjungan lapangan berkesempatan untuk mendengarkan cerita mereka tentang manfaat persemaian permanen Gowa, Sulawesi Selatan

Foto oleh: Asriyanto

AKUNTABILITAS KINERJA

Kawah Ratu yang berada dalam Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu terbentang luas menyemburkan uap belerang dari panas bumi Pasundan. Belerang ini dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan kulit.

Foto oleh Anny Meilani



Capaian sasaran kegiatan Biro Perencanaan

SASARAN KEGIATAN dari kinerja Biro Perencanaan yaitu “Meningkatnya layanan perencanaan dan evaluasi pembangunan LHK yang efektif. Milestone 2022 ialah terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai SAKIP yang selalu meningkat dengan diimbangi perbaikan kinerja di tapak. Untuk capaian Nilai SAKIP, dari target yang direncanakan sebesar 76 poin, KLHK memperoleh nilai sebesar 71,98 poin. Untuk capaian kualitas layanan koordinasi perencanaan yang diberikan Biro Perencanaan sebagai salah satu pengampu kegiatan di Program Dukungan Manajemen di KLHK, hasil pengukuran menunjukkan nilai 3,93 dari skala 4 atau memuaskan.

98,25%

Pemenuhan Tingkat
kepuasan layanan
perencana senilai
3,93 poin.



94,71%

Pemenuhan nilai SAKIP
Kementerian LHK
senilai **71,98 Poin.**

1 IKK

Indikator Kinerja Kegiatan



Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan



Data Pendukung
IKK 1 Biro
Perencanaan

IKK 1 TINGKAT KEPUASAN LAYANAN PERENCANAAN TAHUN 2022



Tingkat Layanan Kepuasan Perencanaan merupakan indikator kinerja yang menggambarkan kepuasan *stakeholder* terhadap layanan yang disediakan oleh Biro Perencanaan dalam menyediakan layanan koordinasi di bidang Rencana, Program, Anggaran, maupun Pengelolaan Kinerja. Lebih spesifik, layanan tersebut meliputi koordinasi perencanaan program dan kegiatan, penganggaran, pengelolaan dana transfer, hibah, evaluasi kegiatan, pelaporan, kerja sama dalam negeri, maupun pengarusutamaan program yang menjadi tugas Biro Perencanaan.

Dalam menangkap persepsi *stakeholder* terhadap layanan yang disediakan, Biro Perencanaan melaksanakan survei layanan kepuasan. Survei tersebut dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun pada setiap semester. Responden dalam survei ini adalah satuan kerja pada seluruh Unit Eselon I.

Dalam menjangkau pendapat, kuesioner yang

disusun menggunakan *skala likert* dimana responden diminta untuk mengukur tingkat layanan kepuasan dengan rentang 1 sd 5 (Sangat Tidak Puas– Sangat Puas).

Pengolahan indeks kepuasan layanan Biro Perencanaan diolah menggunakan dua media pengolahan yaitu aplikasi SPSS untuk analisis *missing value* untuk mengetahui kualitas data serta keakuratan data, serta Microsoft Excel untuk pengolahan hasil akhir. Pada hasil analisis *missing value*, keseluruhan data standar deviasi responden menghasilkan angka yang tidak lebih besar dari nilai rata-rata, yang berarti bahwa data kuesioner seluruhnya valid (dapat digunakan).

Dari hasil survei tersebut, diperoleh nilai indeks kepuasan layanan perencanaan tahun 2022 sebesar 3,93 poin dengan target 4 poin, sehingga persentase capaian sebesar 98,25% atau meningkat sebesar 0,77% dari 3,9 poin pada tahun 2021

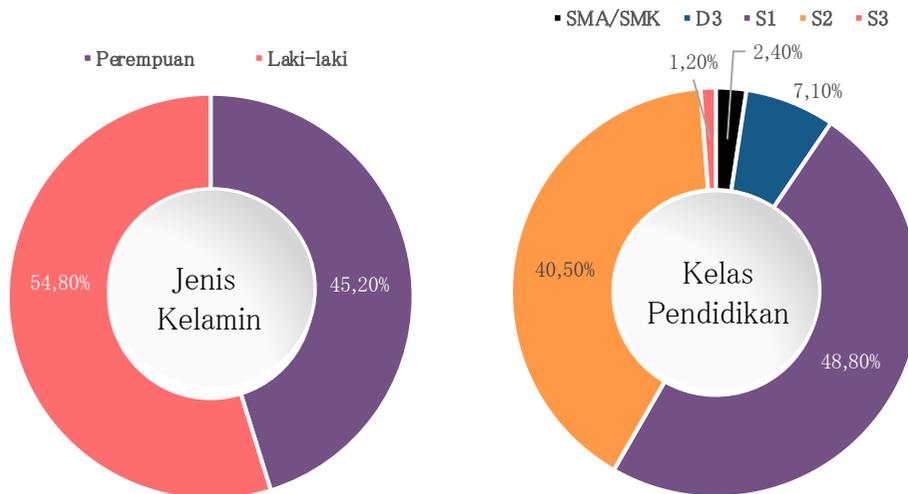
Apabila diurutkan dari nilai kepuasan paling tinggi, berturut-turut adalah Bagian Rencana Program dan Anggaran sebesar 3,97 poin atau 99,25%, kemudian Bagian Pengelolaan Kinerja dan Kerja Sama Dalam Negeri sebesar 3,87 poin atau 96,75%



Gambar 6. Grafik kecenderungan nilai layanan Biro Perencanaan per tahun

PROFIL RESPONDEN SURVEY LAYANAN KEPUASAN

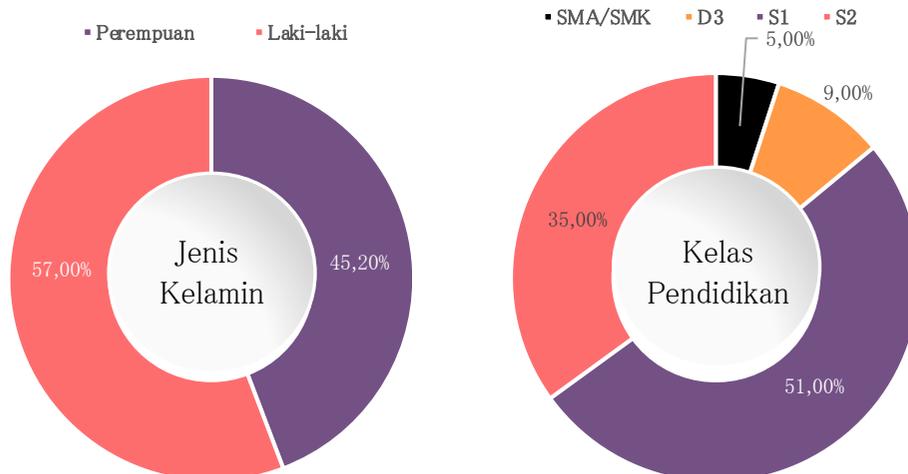
Semester I



Pada semester I, terdapat jumlah responden sebesar 84 orang dengan komposisi jumlah responden laki-laki sebesar 54,8% atau 46 orang lebih banyak daripada perempuan dengan tingkat Pendidikan tertinggi lulusan S1 sebesar 40,5% atau 34 orang.

Gambar 7. Grafik profil responden survei layanan kepuasan berdasarkan jenis kelamin dan kelas pendidikan pada semester 1

Semester II



Sedangkan Pada semester II, memiliki jumlah peningkatan terhadap responden dari semester I. Terdapat jumlah responden sebesar 100 orang dengan komposisi jumlah responden laki-laki sebesar 57% atau 57 orang lebih banyak daripada perempuan dengan tingkat Pendidikan tertinggi lulusan S1 sebesar 51% atau 51 orang.

Gambar 8. Grafik profil responden survei layanan kepuasan berdasarkan jenis kelamin dan kelas pendidikan pada semester 2



**KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN
KEHUTANAN**

Manggala Wanabakti. Sesuai namanya, gedung yang diresmikan tahun 1983 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto ini menjadi rumah bakti bagi para rimbawan

Foto Oleh : **Hairatunnisa**

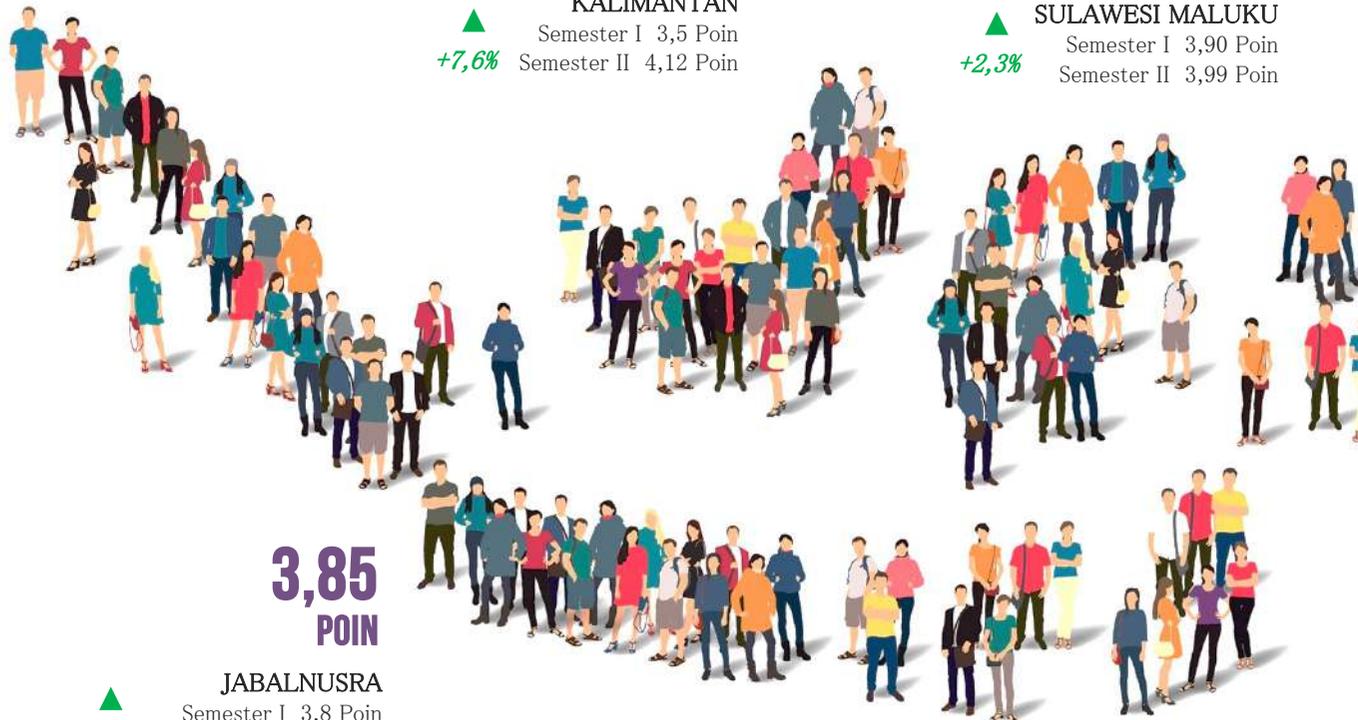
SEBARAN INDEKS LAYANAN KEPUASAN PER EKOREGION

Sebaran Indeks layanan kepuasan ini berdasarkan responden pada seluruh unit kerja Eselon I yang berada dalam wilayah Ekoregion

4,05
POIN
SUMATRA
Semester I 4,1 Poin
Semester II 4 Poin
▼ -2,2%

3,81
POIN
KALIMANTAN
Semester I 3,5 Poin
Semester II 4,12 Poin
▲ +7,6%

3,94
POIN
SULAWESI MALUKU
Semester I 3,90 Poin
Semester II 3,99 Poin
▲ +2,3%



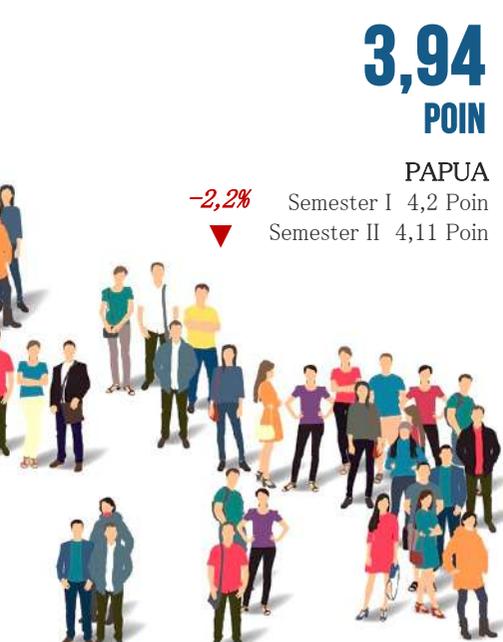
3,85
POIN
JABALNUSRA
Semester I 3,8 Poin
Semester II 3,89 Poin
▲ +2,4%

EKSPRESI KEPUASAN layanan perencanaan berdasarkan wilayah ekoregion dapat dilihat pada figur di samping, dimana terlihat pada Ekoregion Sumatera dan Papua terjadi penurunan tingkat kepuasan sebesar -2,2% dibandingkan pada wilayah ekoregion lainnya. Namun demikian, meski mengalami penurunan, kedua ekoregion tersebut memiliki hasil survei diatas 4 poin dibandingkan ekoregion yang lain yang hasil surveinya masih di bawah 4 poin.

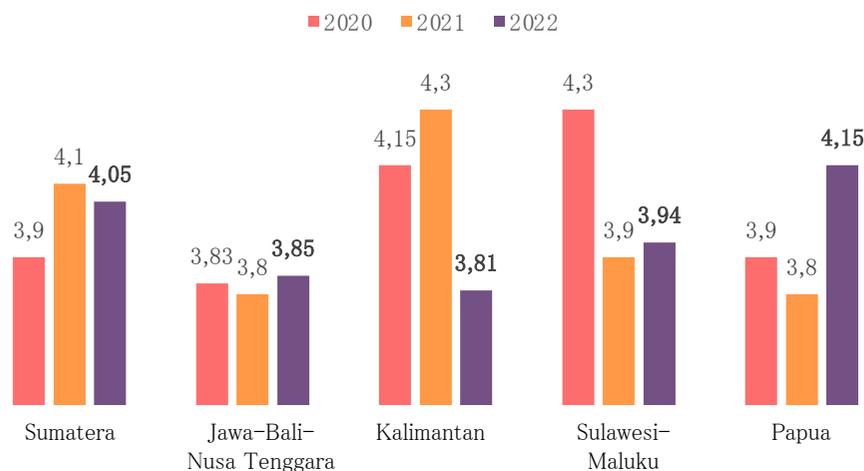
Kemudian, apabila layanan kepuasan dibandingkan antara paruh tahun pertama dan kedua, dapat dilihat bahwa peningkatan tertinggi terletak pada Ekoregion Kalimantan sebesar 17,6%. Dari figur di samping juga dapat

dilihat bahwa wilayah ekoregion yang menunjukkan nilai kepuasan tertinggi adalah Ekoregion Papua yaitu sebesar 4,15 poin, disusul dengan Ekoregion Sumatera sebesar 4,05 poin. Sedangkan tingkat kepuasan terendah ditemukan pada Ekoregion Kalimantan sebesar 3,81 poin.

Dari data disamping dapat disimpulkan bahwa ekspresi kepuasan responden berdasarkan ekoregion rata-rata menyampaikan kepuasan terhadap kinerja layanan perencanaan.



Trend Sebaran Nilai Indeks Layanan Per Ekoregion



Gambar 9. Grafik sebaran nilai indeks layanan per Ekoregion

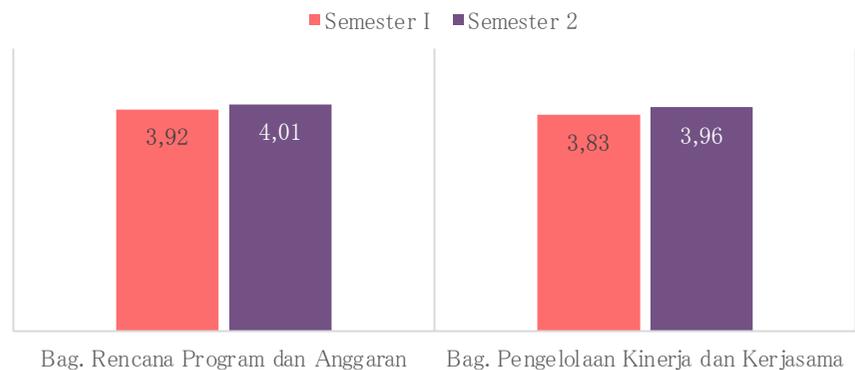
Diagram di atas menunjukkan trend ekspresi nilai kepuasan layanan perencanaan dari tahun ke tahun berdasarkan wilayah ekoregion. Jika dilihat secara keseluruhan, nilai kepuasan mengalami tren penurunan dari tahun 2020 ke 2021 dan kemudian mengalami peningkatan kembali di 2022. Ekspresi penurunan 2020 ke 2021 tersebut salah satunya dikarenakan menurunnya alokasi anggaran pada seluruh satuan kerja akibat kebijakan refocusing untuk

penanganan Covid-19 pada tahun 2021, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Pada tahun 2022, seiring dengan semakin terkendalinya pandemi, perencanaan kembali on the track untuk mencapai target-target kinerja dan hal ini mendapatkan persepsi positif dari seluruh stakeholder.

KOMPONEN LAYANAN KEPUASAN

INDEKS LAYANAN kepuasan perencanaan merupakan IKK yang baru dimulai pada tahun 2020. Grafik di samping merupakan perbandingan ekspresi tingkat layanan kepuasan dari semester I dan semester II. Ekspresi indeks layanan kepuasan pada semester II secara keseluruhan (2 komponen penilaian pendukung) mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin. Ekspresi pada kedua periode survei baik paruh pertama maupun kedua menunjukkan pada kategori “PUAS”.

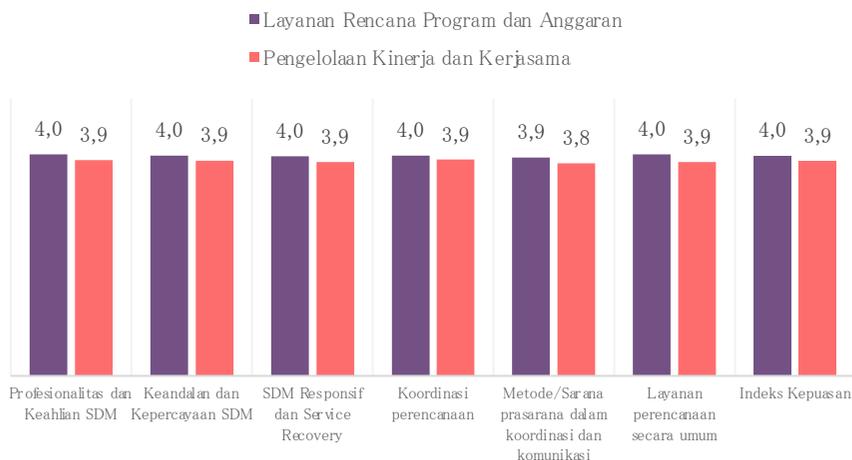
Capaian Indeks Layanan Kepuasan Per Bagian di Biro Perencanaan



*Penilaian menggunakan skala likert, dimana angka 1 menunjukkan sangat tidak puas/sangat tidak penting, dan 5 menunjukkan sangat puas/sangat penting.

Gambar 10. Grafik capaian layanan kepuasan berdasarkan Bagian lingkup Biro Perencanaan

Ekspresi Kepuasan Layanan Berdasarkan Indikator Survey Kepuasan



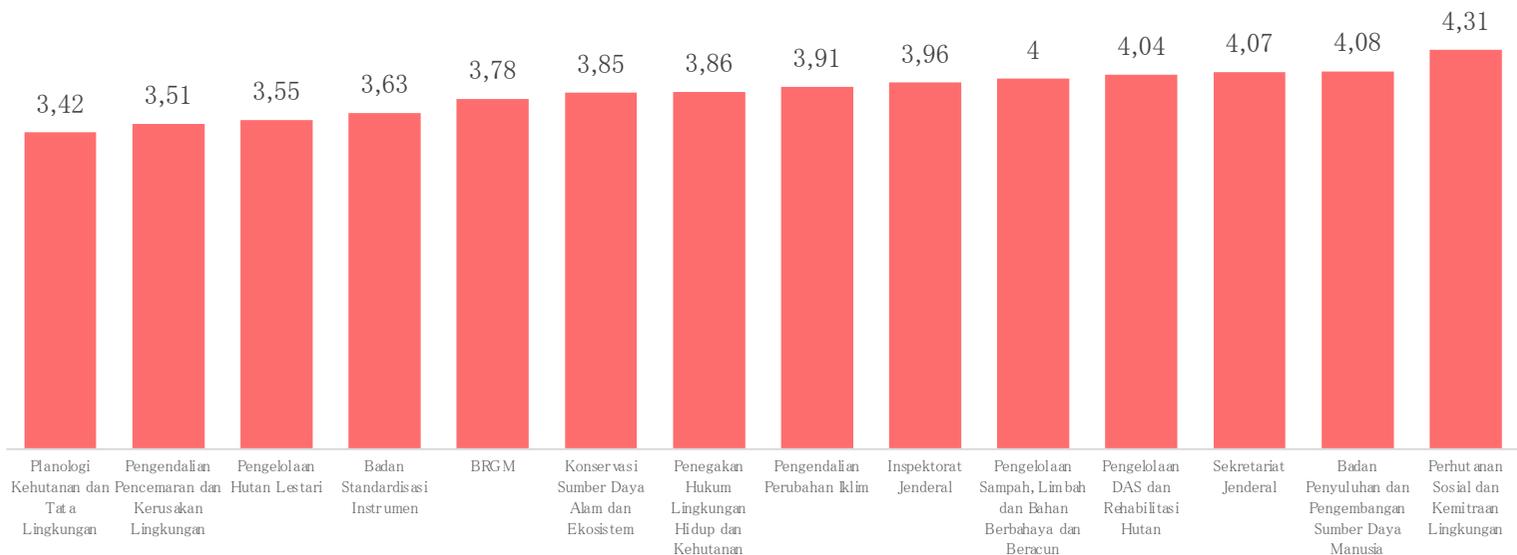
Gambar 11. Grafik capaian layanan kepuasan berdasarkan Indikator Survei Kepuasan berdasarkan Bagian lingkup Biro Perencanaan

Dari beberapa parameter yang digunakan dalam survei, didapatkan ekspresi bahwa kedua bagian baik Bagian Rencana, Program dan Anggaran serta Bagian Pengelolaan Kinerja (termasuk layanan kerja sama dalam negeri) sama-sama menunjukkan ekspresi kepuasan di seluruh parameter.

Bagian Rencana, Program dan Anggaran menunjukkan tingkat kepuasan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Bagian Pengelolaan Kinerja pada seluruh indikator yang digunakan dalam survei.

EKSPRESI TINGKAT KEPUASAN LAYANAN PER UNIT KERJA ESELON 1

Ekspresi Tingkat Kepuasan Eselon 1 terhadap Layanan Perencanaan



Gambar 12. Grafik tingkat layanan kepuasan berdasarkan Unit Kerja Eselon 1

GRAFIK DI ATAS menunjukkan tingkat kepuasan berdasarkan ekspresi masing-masing Unit Kerja Eselon I. Pengukuran ini untuk mengetahui ekspresi tingkat kepuasan pada masing-masing eselon I terhadap layanan perencanaan yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan.

Ekspresi kepuasan tertinggi terhadap layanan perencanaan ditunjukkan oleh Unit Kerja Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan

Kemitraan Lingkungan dengan angka 4,31 poin dari 5 skala atau sebesar 86,2%. Tingkat kepuasan ini dapat diartikan bahwa Unit Kerja Ditjen PSKL merasa PUAS dengan pelayanan Biro Perencanaan.

Sedangkan ekspresi kepuasan terendah terhadap layanan perencanaan diberikan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar 3,42 poin atau sebesar 68,4% dari 5 skala. Angka ini dapat

diartikan bahwa Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merasa CUKUP PUAS dengan layanan perencanaan.

Ekspresi nilai median (nilai tengah) responden terhadap Biro Perencanaan tahun 2022 adalah 3,89 poin atau sebesar 77,7%. Berdasarkan nilai median, ekspresi ini dapat dikatakan bahwa responden sudah merasa PUAS dengan layanan perencanaan yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan.

TINGKAT KEPENTINGAN LAYANAN PERENCANAAN TAHUN 2022

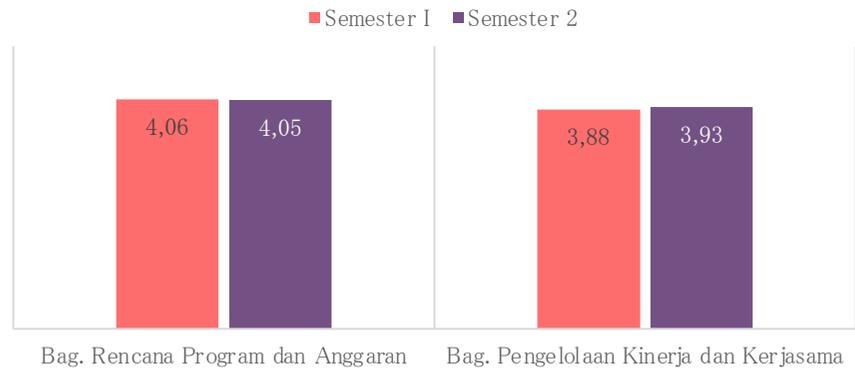
INDEKS KEPENTINGAN LAYANAN digunakan untuk menjangking ekspresi para *stakeholder* akan seberapa penting layanan perencanaan. Tingkat kepentingan layanan ini disusun berdasarkan pedoman kuesioner yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang terbagi menjadi 9 (sembilan) indikator.

Pada tahun 2022 diperoleh hasil survei sebesar 4 poin yang memiliki arti bahwa layanan perencanaan berada pada tingkat “PENTING”. Hasil tersebut diperoleh melalui rerata dari indeks Rencana Program dan Anggaran sebesar 4,05 dan Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri dan Hibah sebesar 3,93 poin.

Nilai capaian tingkat kepentingan ini mencapai 100% dari skala 4 poin. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,1 poin atau 2,5%.

Ekspresi layanan menghasilkan angka modus / paling banyak pada angka 3,37 poin yang masuk dalam kategori baik. Modus ini terdiri atas komponen prosedur dan komponen maklumat pelayanan. Namun demikian, masih terdapat indeks dengan penilaian terendah pada komponen perilaku pelaksana sebesar 3,28 poin. Komponen yang sama juga tercatat sebagai komponen terendah pada survei tahun sebelumnya, sehingga dapat diartikan bahwa belum terdapat perubahan yang signifikan pada komponen ini. Hal ini memerlukan intervensi lebih lanjut dalam komponen tersebut.

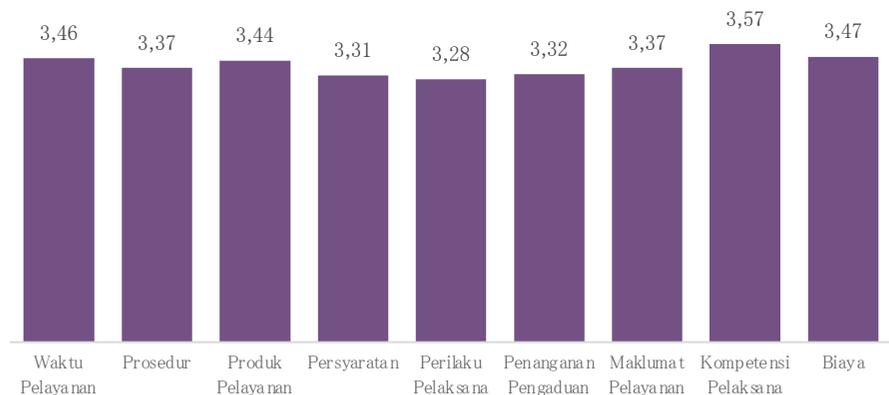
Capaian Indeks Kepentingan Layanan Perencanaan Per Bagian di Biro Perencanaan



*Penilaian menggunakan skala likert, dimana angka 1 menunjukkan sangat tidak puas/sangat tidak penting, dan 5 menunjukkan sangat puas/sangat penting.

Gambar 13. Grafik capaian indeks layanan kepentingan berdasarkan bagian lingkup Biro Perencanaan

Capaian Per Komponen layanan Kepentingan Perencanaan



*Penilaian menggunakan skala Likert, dimana angka 1 menunjukkan sangat tidak puas/ tidak baik/ tidak mampu/sangat lambat, dan 4 menunjukkan sangat puas/sangat penting/sangat cepat.

Gambar 14. Grafik capaian per komponen layanan kepentingan berdasarkan Pedoman Kuesioner MenPan-RB 14/2017



Pilar Birokrasi itu adalah Manusia. Biro Perencanaan senantiasa mengintegrasikan anggaran dan kinerja yang semakin lincah terhadap perubahan jaman. Di nahkodai oleh Kepala Biro, saat layar telah dibentangkan semua Tim Kapal selalu siap sedia menghadapi gelombang dengan solid.

Foto oleh: Erwin Febriyanto

SARAN MASUKAN DAN HARAPAN UNTUK BIRO PERENCANAAN KEDEPAN

MASUKAN DAN SARAN terhadap pelaksanaan suatu layanan publik sangat penting untuk dirangkum guna menjadi bahan perbaikan layanan ke depan.

Dari survei yang telah dilaksanakan, terangkum beragam saran, masukan serta harapan untuk perbaikan layanan perencanaan. Pada umumnya, saran dan masukan yang disampaikan banyak pada tataran manajemen / tata kelola pelaksanaan

perencanaan secara keseluruhan. Dari masukan-masukan tersebut, banyak stakeholder menyampaikan perlunya disusun pedoman / acuan dalam menyusun, mengukur, melaporkan dan mengevaluasi rencana sehingga tidak ada perbedaan persepsi terhadap acuan nasional.

Secara rinci, berikut merupakan saran dan masukan serta harapan ke depan untuk Biro Perencanaan yang didapatkan dari Survei

Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan.

Saran dan masukan serta harapan tersebut dituliskan Unit Kerja Eselon I yang menjadi responden dalam survei tersebut. Saran dan masukan serta harapan ke depan ini sangat bermanfaat dan membantu Biro Perencanaan untuk dapat memperbaiki kekurangan dalam pelayanan dan menjadikan Biro Perencanaan lebih baik untuk ke depannya

Tabel 2. Saran dan masukan yang disampaikan oleh responden

SARAN DAN MASUKAN	HARAPAN KEDEPAN
1. Semakin meningkatkan inovasi dan intensitas terhadap penyediaan metode/sarana dalam koordinasi dan komunikasi	1. Diharapkan Biro Perencanaan menjadi lebih baik dalam mengalokasikan anggaran untuk setiap satker
2. Semoga lebih ramah dalam menjawab pertanyaan dari masing-masing eselon I	2. Segera menerbitkan format RENAKSI dan Perjanjian Kinerja (PK) untuk diimplementasi di lingkungan KLHK
3. Disarankan untuk semakin mampu mengakomodir kebutuhan unit kerja lingkup KLHK	3. Diharapkan dapat melaksanakan Kegiatan/undangan secara <i>hybrid</i> (tatap muka/ <i>online</i>), jika tidak bisa hadir langsung bisa mengikuti via <i>zoom</i>
4. Semakin mengembangkan sistem perencanaan berbasis teknologi digital dan terintegrasi.	4. Diharapkan dapat segera mengalokasikan dana anggaran untuk Latsar CPNS 2022. Info hingga saat ini, Latsar CPNS belum terlaksana karena ketidakterediaan anggaran. Tidak sinkron ketika ada penerimaan, tapi anggaran Latsar tidak ada. Di instansi lain banyak yang sudah dilaksanakan bahkan sudah selesai.
5. Lebih memperhatikan tata waktu dalam menyampaikan permintaan dukungan data dengan deadline	5. Diharapkan lebih proporsional dalam pembebanan pemotongan anggaran
6. Disarankan terdapat <i>reward</i> untuk satker yang berprestasi/dapat merealisasikan target anggaran dan kinerja secara maksimal	6. Dapat menjadi garda terdepan dalam bidang perencanaan dan Evaluasi
7. Semoga dapat memperbanyak pertemuan dengan Unit Kerja terkait, salah satunya dapat berupa rapat atau pelaksanaan bimbingan teknis	7. Diharapkan lebih responsif terhadap saran dan masukan dari satker dan dapat segera menindaklanjuti
8. Semakin meningkatkan mutu pelayanan dan kemampuan SDM	8. Diharapkan tetap semangat dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan selalu menjadi yang terbaik
9. Lebih mempertegas evaluasi terhadap unit kerja yang tidak dapat mencapai target sehingga dapat menentukan solusi dari akar permasalahan untuk kedepannya	

SARAN, MASUKAN DAN HARAPAN YANG TELAH DITINDAKLANJUTI BIRO PERENCANAAN PADA TAHUN 2022

DARI HASIL SURVEI tahun 2021 yang lalu untuk melihat ekspresi kepuasan responden Unit Kerja Eselon I lingkup KLHK terhadap layanan perencanaan, telah dirangkum beberapa masukan, saran dan harapan terhadap Biro Perencanaan untuk selalu melakukan perbaikan dan peningkatan layanan. Berikut ini merupakan tindak lanjut atas saran, masukan dan harapan. Tindak lanjut yang dilakukan diklasifikasikan menjadi

2 (dua), yaitu tindak lanjut sebagai bagian utuh dari pelaksanaan layanan dan tindak lanjut sebagai tahap akhir dari kegiatan evaluasi. Istilah tindak lanjut atas masukan/saran yang merupakan bentuk respons cepat terhadap refleksi yang dilakukan atas permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi selama proses pemberian layanan. Sedangkan tindak lanjut dalam kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang

dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pelayanan atau perwujudan menuju harapan *stakeholder*.

Berikut ini tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap masukan, saran dan harapan yang ditunjukkan responden pada survei layanan kepuasan Biro Perencanaan tahun 2021 yang lalu.

Tabel 3. Saran dan masukan oleh responden pada tahun sebelumnya yang telah ditindak lanjuti

TINDAK LANJUT ATAS SARAN DAN MASUKAN	TINDAK LANJUT ATAS HARAPAN KEDEPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Perencanaan meningkatkan pelayanan dan koordinasi kepada unit kerja KLHK dengan memperbanyak frekuensi pertemuan untuk memantau capaian dan koordinasi setiap triwulan dengan <i>online</i> maupun <i>offline</i>. 2. Dalam rangka percepatan penyebaran informasi, telah ditugaskan petugas untuk lebih aktif merespons pertanyaan di dalam grup <i>whatsapp evaluator</i> maupun perencanaan. Disamping itu, untuk mengkomunikasikan hasil-hasil pembangunan juga telah dibuka media sosial Biro Perencanaan. 3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dan mutu pelayanan juga dilaksanakan dengan mengadakan peningkatan kapasitas seperti pelatihan menulis, presentasi maupun penyampaian pada media sosial. 4. Dalam rangka peningkatan objektivitas terhadap survei pelayanan internal Biro Perencanaan, responden tidak perlu lagi memunculkan profilnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi informasi (eSAKIP) telah diterapkan untuk memudahkan pemantauan dan <i>monitoring (monev)</i>. Hal ini digunakan untuk pemantauan dan pelaporan kinerja utama KLHK, kinerja program UKE I, dan kinerja kegiatan UKE II dalam rangka peningkatan akuntabilitas. 2. Telah tersedia wadah untuk pelaporan tematik yang lebih mudah diakses yaitu menggunakan sistem <i>online</i>.

*Biro Perencanaan
diharapkan
meningkatkan
pelayanan dan
koordinasi kepada
unit kerja KLHK
dengan
memperbanyak
frekuensi pertemuan
untuk memantau
capaian dan
koordinasi setiap
triwulan dengan
online maupun
offline.*

Anonim

(Saran Responden Survei Kepuasan Pelayanan
Biro Perencanaan tahun 2021 yang telah
ditindak lanjuti tahun 2022)

Rapat Monitoring dan Evaluasi TW III
bersama Unit Kerja Eselon I di Bogor

Foto oleh: Rd. M. Darajat Ali

Rapat Monitoring dan Evaluasi TW II
bersama Unit Kerja Eselon I di Gedung
Manggala Wanabakti Jakarta

Foto oleh: Amaliah Kurniasih

Rapat Monitoring dan Evaluasi TW III
bersama Unit Kerja Eselon I di Bogor

Foto oleh: Muhayar

Rapat Monitoring dan Evaluasi TW IV
bersama Unit Kerja Eselon I di Gedung
Manggala Wanabakti Jakarta

Foto oleh: Zamthomi



Rapat Monitoring dan Evaluasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Percepatan Ekonomi Papua dan Papua Barat, serta Padat Karya dengan BPKP di Gedung Manggala Wanabakti

Foto oleh: Siti Rahmatun



Rapat persiapan Lomba SDG's Award dan pengumpulan data dukung seluruh Unit Kerja Eselon I Kementerian LHK

Foto oleh: Lastris Simanjuntak



Monitoring Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian LHK Bersama Unit Kerja Eselon I dan KSP di Manggala Wanabakti

Foto oleh: Yeyen Angraeni



Rapat persiapan Lomba SDG's Award dan pengumpulan data dukung seluruh Unit Kerja Eselon I Kementerian LHK

Foto oleh: Raka Majid

Indikator Kinerja Kegiatan

2 IKK



Nilai SAKIP Kementerian LHK



Data Pendukung
IKK 2 Biro
Perencanaan

IKK 2 NILAI SAKIP KEMENTERIAN LHK



Catatan:

Angka realisasi merupakan LHE AKIP Tahun 2021

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik, diperlukan penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu wilayah perubahan dalam agenda Reformasi Birokrasi. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) menjadi salah satu bentuk representasi akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah.

Evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan untuk melihat sejauh mana penerapan masing-masing komponen SAKIP. Untuk penilaian SAKIP tahun 2021 (yang dilaksanakan pada tahun 2022), Kementerian PAN-RB masih berpedoman pada Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 12 Tahun 2015, sedangkan mulai untuk menilai SAKIP tahun 2022 (yang nilainya baru akan terbit pada 2023) diterapkan Pedoman Evaluasi SAKIP terbaru sesuai Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022, Kepala Biro Perencanaan berkomitmen kepada Sekretaris Jenderal Kementerian LHK untuk dapat mencapai nilai SAKIP KLHK sebesar 76 Poin. Hal ini merupakan target yang akan menjadi fokus dan tanggung jawab Biro Perencanaan untuk melakukan koordinasi terhadap seluruh unit Eselon I beserta seluruh satuan kerjanya untuk menerapkan setiap komponen SAKIP semaksimal mungkin.

Hasil evaluasi SAKIP KLHK tahun 2021 memperoleh nilai 71,98 sesuai dengan surat Menteri PAN&RB Nomor B/59/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022, perihal Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2021. Secara persentase, kinerja IKK2 ini mencapai 94,71% dari target 76 poin. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 0,26 poin dari tahun sebelumnya.

Nilai 71,98 atau predikat BB menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran telah cukup baik jika dibandingkan dengan capaian penyelenggaraan

kinerjanya.

Nilai tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian LHK sudah mulai berjalan dengan baik namun perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut.

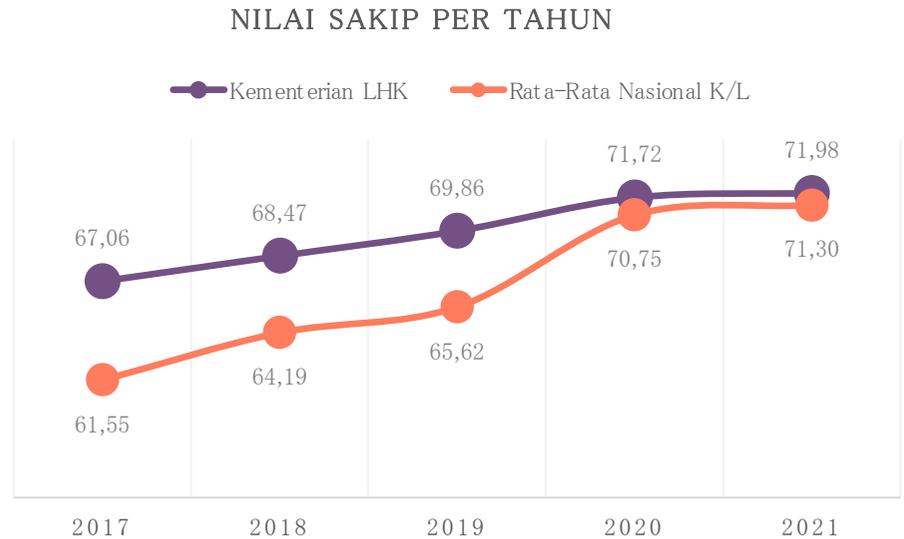
Hasil evaluasi ini juga menyampaikan bahwa Kementerian LHK telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi penilaian AKIP tahun sebelumnya, antara lain: telah melakukan reviu atas cascading (pohon) kinerja, telah dilakukan evaluasi implementasi SAKIP, rencana aksi telah disusun, pelaksanaan dialog kinerja, dan pembangunan aplikasi SAKIP terintegrasi.

Meskipun demikian, Kementerian LHK masih perlu melakukan evaluasi implementasi SAKIP secara konsisten serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

PERKEMBANGAN NILAI SAKIP KLHK

GRAFIK PERKEMBANGAN nilai SAKIP menunjukkan bahwa nilai SAKIP Kementerian LHK terus meningkat setiap tahun, hal ini menggambarkan adanya tren positif dalam perkembangan nilai SAKIP Kementerian LHK. Apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata SAKIP nasional, nilai SAKIP Kementerian LHK melampaui nilai rata-rata nasional setiap tahun.

Nilai SAKIP Kementerian LHK mencapai 71,98 di tahun 2022, lebih besar dari nilai rata-rata nasional sebesar 0,68 poin. Pencapaian nilai SAKIP tahun 2021 sebesar 71,98 poin meningkat 7,34% (YoY) dibandingkan tahun 2018 sebesar 67,06 poin. Capaian Nilai SAKIP tahun 2022 merupakan nilai SAKIP tahun 2021 yang dinilai tahun 2022.



Gambar 15. Grafik nilai SAKIP KLHK per tahun

Tabel 4. Perbandingan komponen nilai SAKIP tahun 2020 dengan tahun 2021

No	Komponen	Bobot	Tahun 2020		2021		Tren (Poin)
			Realisasi (poin)	Capaian Kinerja	Realisasi (poin)	Capaian Kinerja	
1	Perencanaan Kinerja	30	22,42	74,73%	22,50	75,00%	▲ 0,08
2	Pengukuran Kinerja	25	15,08	60,32%	15,28	61,12%	▲ 0,20
3	Pelaporan Kinerja	15	11,36	75,73%	11,54	76,93%	▲ 0,18
4	Evaluasi Internal	10	7,21	72,10%	7,21	72,10%	▬ 0,00
5	Capaian Kinerja	20	15,65	78,25%	15,45	77,25%	▼ 0,20

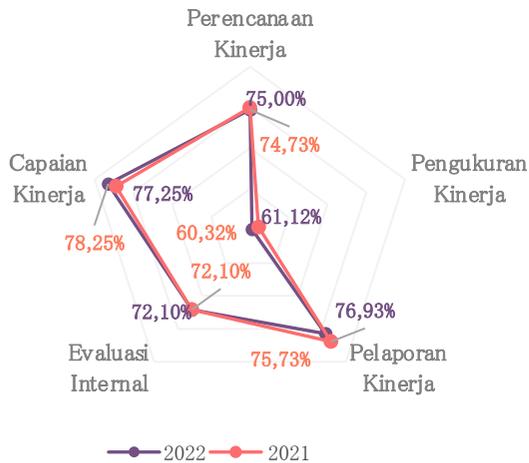
Sebagian besar nilai komponen SAKIP tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun dengan 2020. Nilai

komponen Perencanaan Kinerja meningkat 0,08 poin, nilai komponen Pengukuran Kinerja naik 0,20 poin, nilai komponen Pelaporan

Kinerja naik 0,18 poin, nilai Evaluasi Internal sama dengan nilai tahun sebelumnya, dan hanya nilai komponen Capaian Kinerja yang menurun 0,20 poin.

KOMPONEN NILAI SAKIP

PERBANDINGAN CAPAIAN NILAI KOMPONEN SAKIP PER TAHUN



Gambar 16. Grafik capaian komponen nilai SAKIP

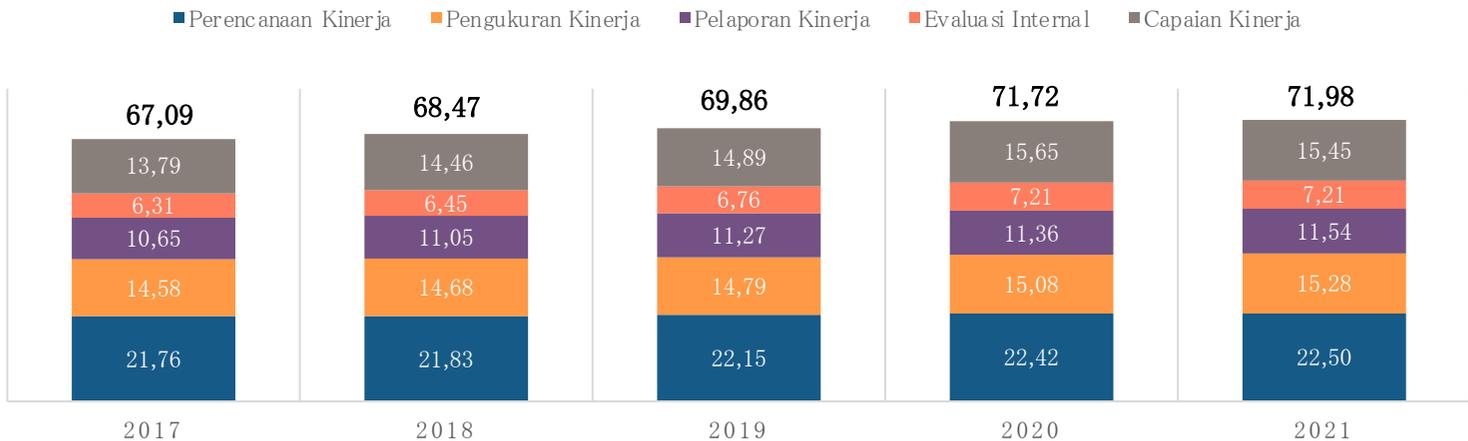
NILAI HASIL EVALUASI SAKIP dipengaruhi 5 (lima) komponen dengan masing-masing bobot, yaitu: Perencanaan Kinerja (30), Pengukuran Kinerja (25), Pelaporan Kinerja (15), Evaluasi Internal (10), Capaian Kinerja (20).

Komponen Perencanaan Kerja memperoleh nilai 22,50 dari bobot 30 (75%), meningkat 0,08 poin dari tahun 2020. Komponen Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 15,28 dari bobot 25, meningkat 0,10 poin dari tahun 2020. Komponen Pelaporan Kinerja dari bobot 15 mendapatkan nilai 11,54, meningkat 0,18 poin dari tahun 2020. Komponen Evaluasi Internal memperoleh nilai 7,21 dari bobot 10, nilai ini sama dengan nilai di tahun 2020.

Komponen Capaian Kinerja mendapatkan nilai 15,45 dari bobot 20, nilai ini menurun 0,2 poin dari penilaian tahun 2021.

Nilai Komponen SAKIP Kementerian LHK cenderung mengalami peningkatan setiap tahun dalam periode 5 (lima) tahun terakhir. Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja mengalami peningkatan setiap tahun. Komponen Evaluasi Internal memiliki nilai yang sama dengan tahun sebelumnya, dan hanya ada 1 (satu) komponen yang mengalami penurunan yaitu Capaian Kinerja. Grafik di bawah menggambarkan perkembangan nilai komponen SAKIP Kementerian LHK selama 5 (lima) tahun berturut-turut yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

PERKEMBANGAN CAPAIAN KOMPONEN NILAI SAKIP



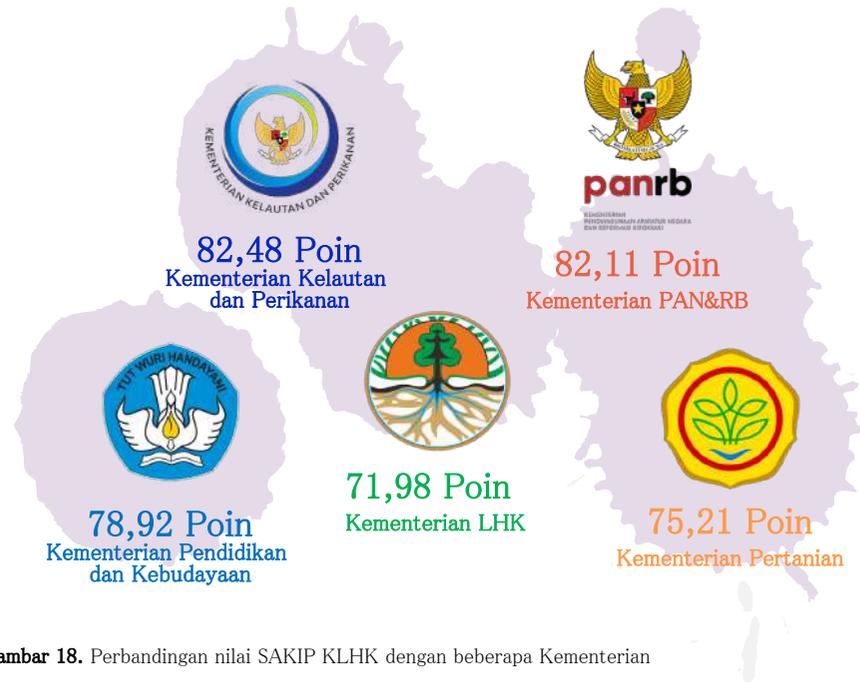
Gambar 17. Grafik capaian komponen nilai SAKIP per tahun

Capaian Nilai SAKIP tahun 2022 merupakan nilai SAKIP tahun 2021 yang dinilai tahun 2022.

BENCHMARKING SAKIP

BENCHMARKING SAKIP dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan penilaian SAKIP K/L lain, sehingga Kementerian LHK dapat mempelajari kelebihan akuntabilitas kinerja K/L lain untuk perbaikan akuntabilitas kinerja tahun selanjutnya.

Pada tahun ini, Kementerian LHK melakukan *benchmarking* dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian PAN-RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Pertanian.



Gambar 18. Perbandingan nilai SAKIP KLHK dengan beberapa Kementerian

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki nilai SAKIP tertinggi yaitu 82,48 poin, kemudian dilanjutkan dengan Kementerian PAN-RB 82,11 poin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 78,92, Kementerian Pertanian 75,21, dan nilai Kementerian LHK mencapai 71,98 poin.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian PNRB sudah tergolong kategori A yang menggambarkan bahwa

instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Pengawas/Sub koordinator. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian LHK mendapatkan kategori BB yang menggambarkan bahwa AKIP sangat baik pada beberapa unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung.

Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level koordinator.

REKOMENDASI PERBAIKAN

KEMENTERIAN PAN-RB telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Kementerian LHK dengan hasil 71,98 poin atau predikat BB. Kementerian LHK mengalami kenaikan nilai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hasil evaluasi ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan capaian kinerja yang cukup baik.

Dalam rangka mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja, Kementerian PAN-RB memberikan beberapa rekomendasi perbaikan perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian LHK tahun 2021 dalam surat Nomor: B/59/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022. Berikut rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian LHK:



Siti Rahmatun dan Erwin Febriyanto tengah memberikan mentoring perihal pengisian capaian kinerja Satker menggunakan aplikasi ESAKIP KLHK. Tahun 2022 pengoperasian ESAKIP mulai diintensifkan, hal ini merupakan salah satu rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan SAKIP KLHK

Foto oleh: Erwin Febriyanto



1

Melaksanakan evaluasi implementasi SAKIP pada seluruh unit kerja baik pada seluruh unit kerja baik pada tingkat unit kerja Eselon I, dan juga pada unit kerja yang ada di daerah sehingga implementasi SAKIP di Kementerian LHK menjadi lebih baik

2

Mendorong setiap unit kerja agar menyusun rencana aksi yang menggambarkan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian kinerja yang diharapkan

3

Mendorong pelaksanaan dialog kinerja untuk peningkatan kinerja organisasi dan kinerja individu, terutama pada unit kerja di daerah

4

Meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian LHK dengan mengoptimalkan sistem informasi yang terintegrasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

5

Memanfaatkan hasil analisis capaian kinerja pada tahun sebelumnya sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategis, salah satunya dalam penetapan target kinerja yang lebih baik (*challenging*) dan merepresentasikan terwujudnya kinerja *outcome*. Selain itu, memberikan *reasoning* yang memadai jika terdapat kondisi tertentu yang memerlukan penyesuaian target

TINDAK LANJUT PERBAIKAN

KEMENTERIAN LHK sudah berupaya menindaklanjuti rekomendasi perbaikan hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN-RB tahun 2021 yang dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu:



RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN TAHUN 2023-2024

Sesuai dengan rekomendasi perbaikan dari hasil evaluasi oleh Kementerian PAN-RB dan dialog kinerja internal tahun sebelumnya, maka Kementerian LHK akan melakukan upaya peningkatan nilai SAKIP sebagai berikut:

1. Melaksanakan dialog kinerja internal secara berkala untuk mendorong implementasi SAKIP
2. Melaksanakan penilaian mandiri SAKIP untuk Entitas Kementerian LHK, Eselon I, Eselon II, hingga unit terkecil (UPT/Balai) dengan *quality insurance*

secara berjenjang.

3. Memanfaatkan aplikasi E-SAKIP untuk pemantauan kinerja utama/program/kegiatan, mengunggah dokumen SAKIP, dan melakukan penilaian mandiri SAKIP
4. Penyusunan Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Implementasi SAKIP.
5. Penyempurnaan aplikasi E-SAKIP untuk pemantauan capaian program tematik lingkup KLHK

Kementerian LHK memiliki target nilai SAKIP 80 poin di tahun 2024, untuk mencapai target

tersebut, maka SAKIP sudah diimplementasikan sampai dengan satuan kerja Kementerian LHK terkecil (UPT/Balai) agar tercapai kinerja berorientasi hasil menuju birokrasi kelas dunia. Kegiatan ini dapat diupayakan dengan seluruh satuan kerja melaksanakan pemantauan kinerja secara berkala, melakukan dialog kinerja untuk evaluasi pelaksanaan implementasi SAKIP dan saran perbaikan, serta mewujudkan adanya *reward* dan *punishment* sebagai pemicu semangat peningkatan nilai SAKIP.

APLIKASI E-SAKIP: PENGUATAN AKUNTABILITAS KEMENTERIAN LHK



APLIKASI E-SAKIP merupakan sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pemantauan kinerja unit kerja Kementerian LHK dalam rangka untuk meningkatkan implementasi SAKIP. Pengembangan aplikasi e-SAKIP Kementerian LHK merupakan salah satu tindak lanjut dari rekomendasi perbaikan dari Menteri PAN-RB atas hasil evaluasi AKIP tahun 2021. Aplikasi e-SAKIP bertujuan untuk akselerasi pengelolaan kinerja Kementerian LHK, pemantauan kinerja utama/program/kegiatan, dan memperluas cakupan penilaian mandiri SAKIP ke seluruh satuan kerja. Aplikasi e-SAKIP ini mulai dimanfaatkan pada tahun 2022.

PENILAIAN MANDIRI E-SAKIP

■ Pengisian dan Konfirmasi Capaian Kinerja

UKE (Unit Kerja Eselon) I dan II melakukan pengisian progres capaian IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) dan IKP (Indikator Kinerja Program) pada e-SAKIP setiap bulan. UKE I melakukan konfirmasi atas pengisian IKK oleh UKE II secara tertib.

■ Unggah dokumen SAKIP

Setiap entitas (UKE I, UKE II, dan UPT) mengunggah dokumen pendukung SAKIP melalui aplikasi e-SAKIP.

■ Penilaian Mandiri SAKIP

Penilaian mandiri SAKIP dilakukan oleh setiap entitas (UKE I, UKE II, dan UPT) melalui aplikasi e-SAKIP. UKE I melakukan konfirmasi atas hasil penilaian mandiri entitas di bawahnya. Selanjutnya Inspektorat Jenderal melakukan penilaian SAKIP UKE I.

FITUR E-SAKIP



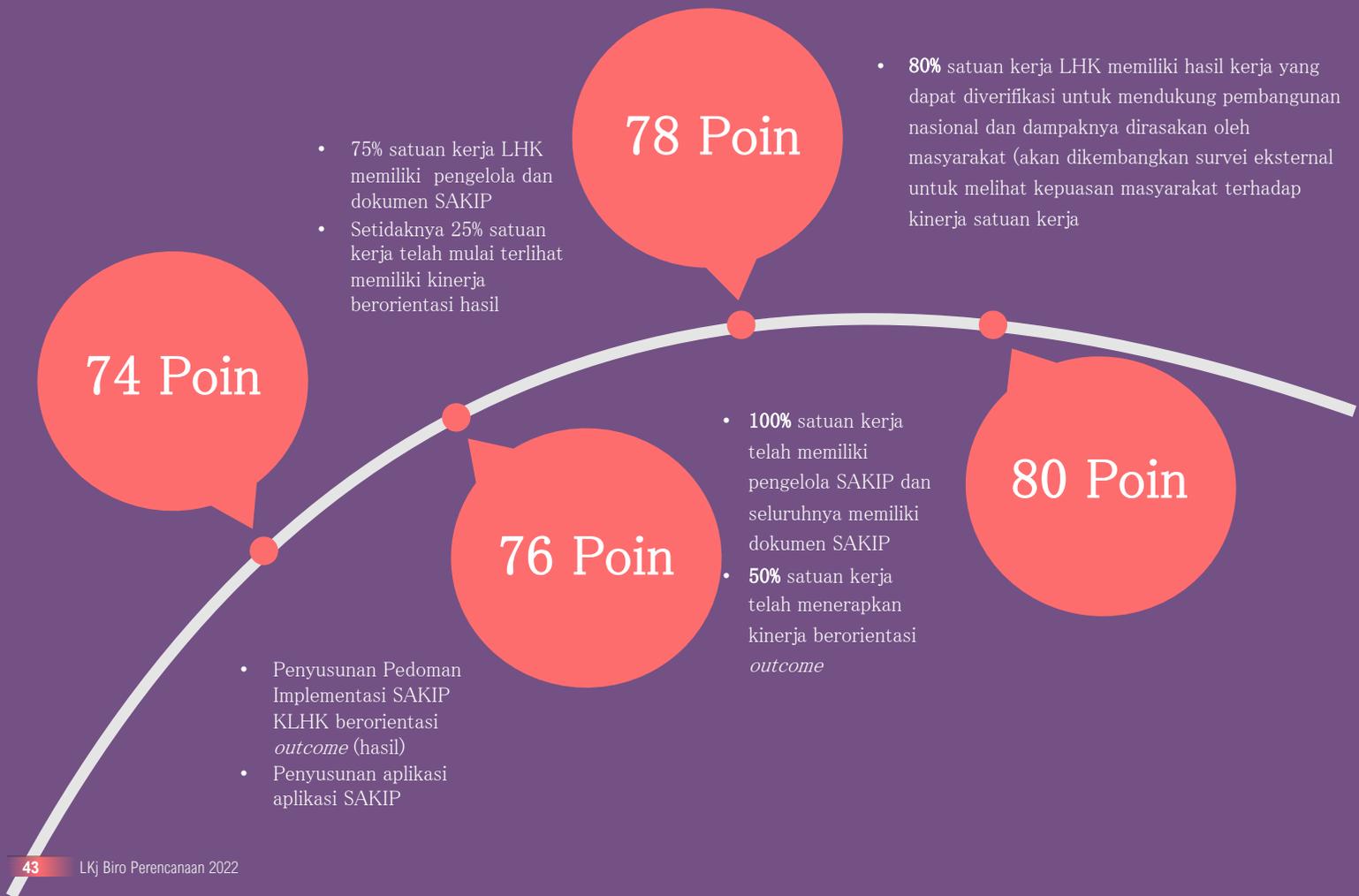
MILESTONE PENGUATAN 2020-2024

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PANRB Nomor 25 Tahun 2020, Reformasi Birokrasi saat ini telah masuk ke dalam periode terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional untuk mencapai karakter birokrasi kelas dunia (*world class*

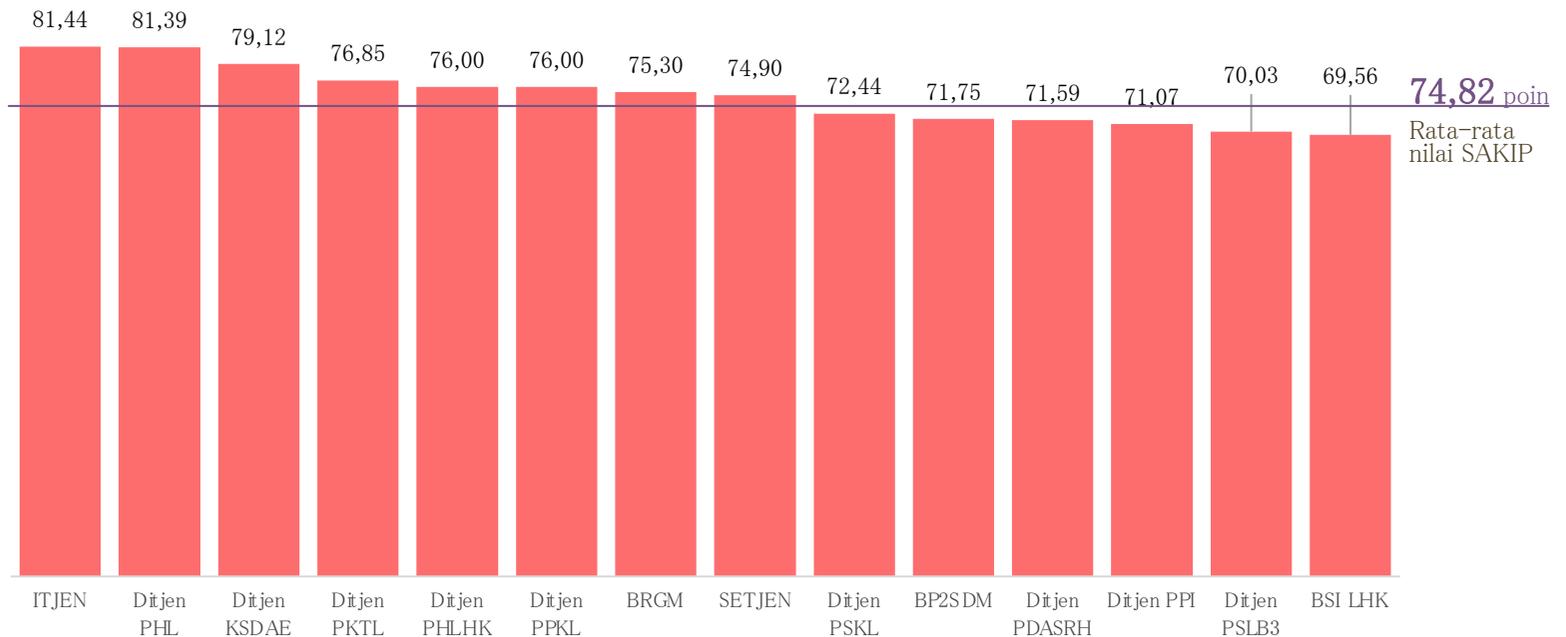
bureaucracy) yang dicirikan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata Kelola yang semakin efektif dan efisien.

Milestone implementasi peningkatan SAKIP disusun untuk mendorong satker untuk

berkinerja tinggi sebagai upaya menuju birokrasi kelas dunia dan mendorong Kementerian LHK mampu menjawab sasaran pembangunan nasional .



HASIL EVALUASI SAKIP PER UNIT ESELON I



Gambar 19. Grafik hasil evaluasi SAKIP Internal per Eselon I

DISAMPING EVALUASI SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, KLHK juga melakukan penilaian secara internal di lingkup Unit Kerja Eselon I yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal / Sekretariat Jenderal.

Khusus untuk entitas Inspektorat Jenderal, evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan oleh tim di bawah Sekretariat Jenderal.

Nilai SAKIP rata-rata UKE 1 sebesar 74,82 poin. Terdapat 8 (delapan) Unit Kerja Eselon I yang memiliki nilai SAKIP di atas rata-rata dan masih ada 6 (enam) Unit Kerja Eselon I

yang masih di bawah nilai rata-rata.

Nilai SAKIP Unit Kerja Eselon 1 tahun 2022 (implementasi SAKIP 2021) dengan nilai tertinggi adalah Inspektorat Jenderal (81,44 poin), dilanjutkan dengan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai 81,39 poin dan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam (79,12 poin).

Jika dilihat per kategori nilai, maka kategori SAKIP Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian LHK berkisar dari A (Memuaskan) sampai dengan B (Baik).

Salah satu yang menyebabkan rentang variabilitas nilai tertinggi dan terendah cukup lebar adalah belum terdapatnya pedoman implementasi SAKIP, sehingga baik pelaksana maupun *evaluator* SAKIP tidak memiliki persepsi yang sama atas suatu kriteria dalam komponen SAKIP.

Pada tahun 2023 dan selanjutnya, akan disusun pedoman implementasi SAKIP ini agar tidak ada lagi perbedaan standar baik dalam implementasi maupun evaluasi SAKIP sehingga nilai SAKIP Unit Eselon 1 KLHK dapat lebih meningkat.

KOMPONEN IMPLEMENTASI SAKIP UNIT KERJA ESELON I

Tabel 5. Komponen Implementasi SAKIP per Eselon I

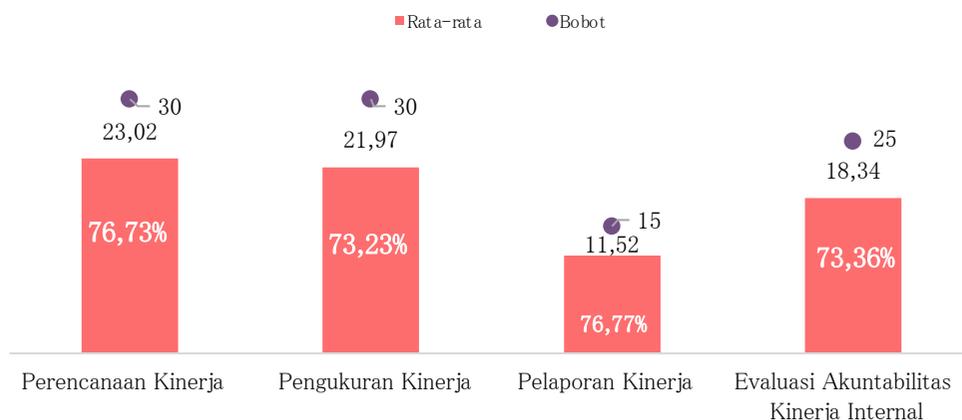
No	Komponen	SETJEN	ITJEN	PKTL	KSDAE	PDASRH	PHL	PPKL	PSLB3	PPI	PSKL	GAKKUM	BP2SDM	BSILHK	BRGM
1	Perencanaan Kinerja	23,21	24,09	24,30	24,18	21,25	23,33	23,70	22,88	21,50	22,70	22,75	23,21	21,20	24,00
2	Pengukuran Kinerja	22,63	26,50	23,08	20,88	19,68	24,00	21,50	21,78	20,85	21,30	22,43	21,38	21,70	19,80
3	Pelaporan Kinerja	11,55	12,98	11,47	10,71	12,09	12,30	11,98	10,60	11,05	10,51	11,16	12,15	10,66	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,50	17,87	18,00	23,33	18,56	21,75	18,88	14,77	17,66	17,92	20,00	15,00	16,00	19,50
Total		74,90	81,44	76,85	79,12	71,59	81,39	76,06	70,03	71,07	72,44	76,35	71,75	69,56	75,30
Kategori		BB	A	BB	BB	BB	A	BB	B	BB	BB	BB	BB	B	BB

EVALUASI AKIP Tahun 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 telah menggunakan pedoman evaluasi terbaru, yaitu Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan

terbaru tersebut, komponen penilaian terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Bobot tertinggi terdapat pada komponen Perencanaan Kinerja dan

Pengukuran Kinerja dengan bobot 30 poin, disusul komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memiliki bobot 25 poin, dan komponen Pelaporan Kinerja memiliki bobot terendah 15 poin

Grafik Nilai Komponen SAKIP UKE I Kementerian LHK



Berdasarkan grafik nilai komponen SAKIP, nilai rata-rata komponen Perencanaan Kinerja menunjukkan angka 23,02 dari bobot angka maksimal 30. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan komponen dengan bobot yang sama (30) yaitu komponen Pengukuran Kinerja sebesar 23,02 poin.

Berdasarkan persentase antara capaian dibandingkan dengan bobot, persentase tertinggi terdapat pada komponen Pelaporan Kinerja sebesar 76,77% (11,52 dari bobot 15) sedangkan persentase capaian terendah yaitu pada komponen Pengukuran Kinerja sebesar 73,23% (21,97 dari bobot 30).

Gambar 20. Grafik hasil evaluasi SAKIP per Unit Kerja Eselon I berdasarkan penilaian Internal

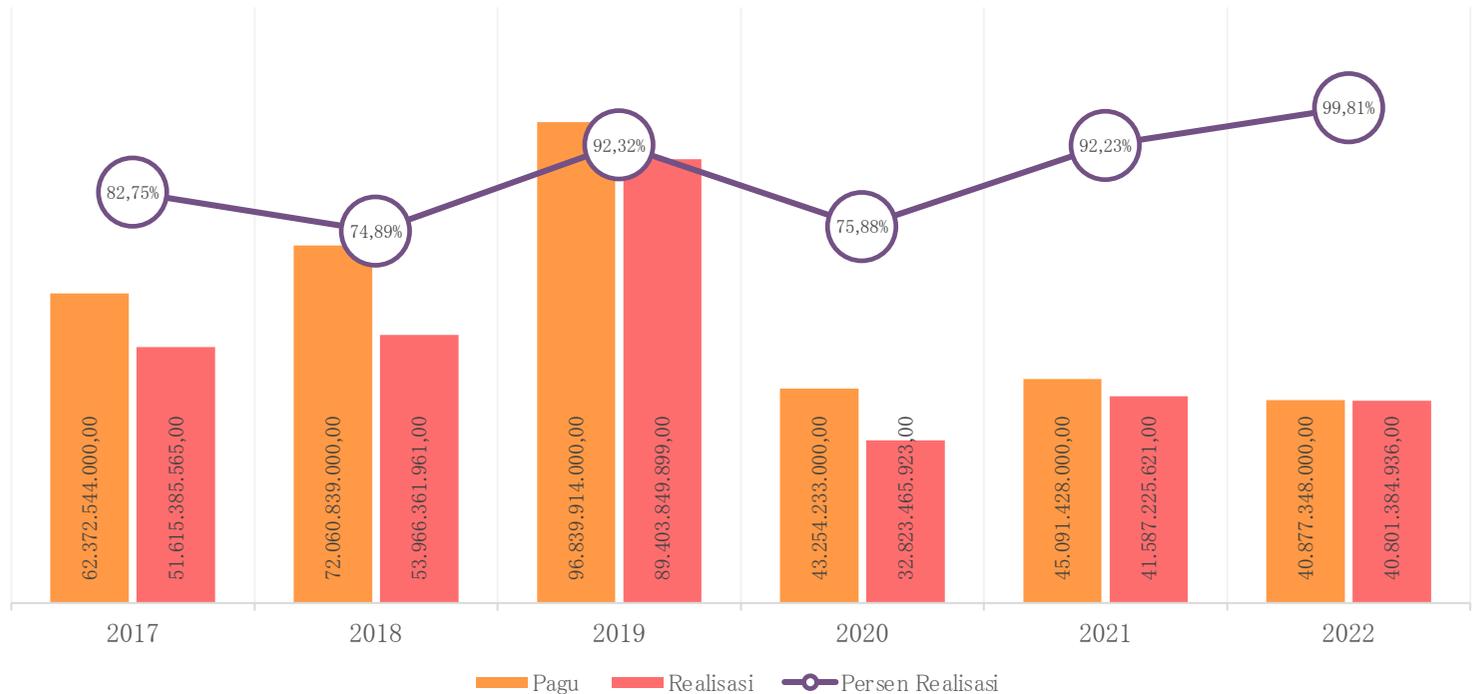


Ketika senja di tepi pantai untuk menyaksikan keindahan bawah laut Pantai Olele, Bone Bolango, Gorontalo

Foto oleh Anny Meilani

APAIAN KINERJA ANGGARAN BIRO PERENCANAAN

PERKEMBANGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PERIODE TAHUN 2017-2022



Gambar 21. Grafik perkembangan pagu dan realisasi anggaran per tahun pada Biro Perencanaan

TREND PAGU Biro Perencanaan dari tahun 2017 sampai tahun 2022 menunjukkan tren peningkatan realisasi anggaran. Dari data di atas, terlihat bahwa anggaran terbesar yang pernah dikelola oleh Biro Perencanaan terdapat pada tahun 2019 dengan pagu sebesar Rp. 96,89 Miliar. Sedangkan pagu paling kecil berada pada tahun 2022 sebesar Rp.40,88 Miliar.

Pada kurun waktu 2017 sampai dengan 2022,

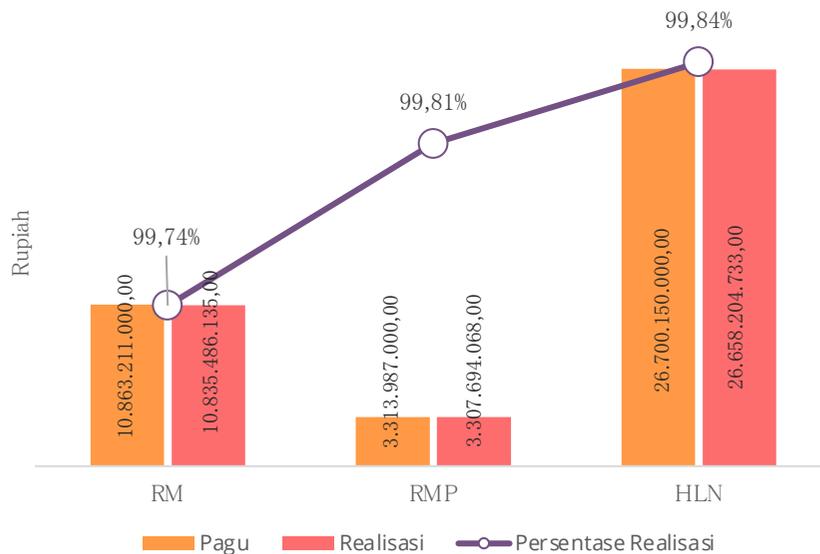
besarnya pagu Biro Perencanaan dikarenakan adanya Project dari sumber dana Hibah Luar Negeri yaitu untuk pendanaan proyek FORCLIME. Proyek ini telah berakhir pada tahun 2022, sehingga untuk tahun anggaran 2023 tidak terdapat lagi alokasi dari sumber dana hibah luar negeri.

Apabila dicermati lebih lanjut, terdapat penurunan pagu yang signifikan pada 3 (tiga) tahun terakhir. Hal tersebut dikarenakan

adanya kebijakan penghematan, *refocusing* anggaran maupun *automatic adjustment* sebagai respons atas pandemi Covid-19.

Berdasarkan persentase realisasi anggaran, pada tahun 2022 realisasi anggaran mencatatkan rekor tertinggi yaitu sebesar 99,81% sedangkan persentase realisasi anggaran terkecil tercatat pada tahun 2018 sebesar 74,89%.

KINERJA ANGGARAN BIRO PERENCANAAN



Pagu : Rp. 40.877.348.000

Realisasi : Rp. 40.801.384.936 (99,81%)

Per jenis belanja



Belanja Barang

Pagu : Rp. 40.390.348.000,00
Realisasi : Rp. 40.314.462.285,00



Belanja Modal

Pagu : Rp. 487.000.000,00
Realisasi : Rp. 486.922.651,00

Gambar 22. Grafik Kinerja Anggaran Biro Perencanaan T.A 2022

BIRO PERENCANAAN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 40,87 M yang bersumber dari Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping dan Hibah Luar Negeri untuk menjalankan tugas dan fungsinya tahun 2022.

Berdasarkan hasil pemantauan pada sistem pemantauan anggaran OMSPAN per tanggal 5 Januari 2023, Biro Perencanaan berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp. 40,8 M atau 99,81%. Persen capaian realisasi anggaran 2022 tersebut meningkat sebesar 8,22% dibandingkan

dengan 2020 (92,23%).

Proporsi anggaran Biro Perencanaan berdasarkan sumber dana tahun 2022 terdiri dari 65% Hibah Luar Negeri (HLN), selanjutnya 27% Rupiah Murni (RM) dan 8% Rupiah Murni Pendamping (RMP). Dari proporsi tersebut, Hibah Luar Negeri dapat terealisasi sebesar 99,84%, Penyerapan Rupiah Murni sebesar 99,74% sedangkan Rupiah Murni Pendamping terealisasi sebesar 99,81%.

Proporsi anggaran Biro Perencanaan berdasarkan jenis belanja tahun 2022 terdiri dari belanja barang

sebesar 98,81% dan belanja modal sebesar 1,19%. Hingga akhir tahun, belanja barang dapat terealisasi sebesar 99,81% dan belanja modal dapat terealisasi sebesar 99,98%.

Hasil capaian kinerja Biro Perencanaan sebesar 96,48% sedangkan penggunaan anggaran sebesar 99,81% sehingga diperoleh efisiensi penggunaan anggaran Biro Perencanaan sebesar 1,03.

PERKEMBANGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022



Gambar 23. Grafik Kinerja Anggaran Biro Perencanaan per Bulan T.A 2022

PAGU ANGGARAN Biro Perencanaan TA. 2022 bulan Januari sebesar Rp. 34,98 Milyar. Selanjutnya pada bulan Februari terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 10,07 Milyar yang bersumber dari *Top Up* dana Hibah luar Negeri sehingga pagu anggaran Biro Perencanaan pada bulan Februari sebesar Rp. 45,06 Milyar.

Dalam rangka *Automatic Adjustment* sesuai dengan memorandum Menteri LHK Nomor M.1/MENLHK/SETJEN/ SET.1/5/2022 yang terbit pada tanggal 30 Mei 2022, sehingga terdapat pengurangan pagu Biro Perencanaan pada bulan November sebanyak Rp.4.15 Milyar sehingga pagu anggaran menjadi Rp.40,88 Milyar.

Hingga akhir tahun 2022, tercatat realisasi anggaran Biro Perencanaan sebesar 99,81% atau Rp.40.8 Milyar.

APAIAN KINERJA BAGIAN BIRO PERENCANAAN

KINERJA BAGIAN BIRO PERENCANAAN

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, Dokumen Rencana Kerja tahunan dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran. Sedangkan dokumen Perjanjian Kinerja Bagian merupakan hasil turunan dari dokumen Perjanjian Kinerja dari Kepala Biro Perencanaan.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan *monitoring*, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah; dan Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, mewujudkan tujuan Perjanjian Kinerja yang berorientasi pada hasil, kepala bagian lingkup biro perencanaan menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Kepala Biro Perencanaan. Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan dituangkan dalam satu lembar kesepakatan berisi sasaran yang akan dicapai melalui beberapa target indikator. Perjanjian Kinerja Bagian Biro Perencanaan

terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Bagian Rencana Program dan Anggaran serta Bagian Pengelolaan Kinerja dan Kerjasama Dalam Negeri.

Kinerja yang diperjanjikan dan capaian oleh Bagian Rencana Program dan Anggaran kepada Kepala Biro Perencanaan antara lain adalah nilai perencanaan kinerja memiliki target sebesar 23 poin tercapai 22,5 poin atau 97,83%; jumlah dokumen perencanaan yang holistik, integratif, dan berbasis spasial memiliki target sebesar 14 dokumen tercapai 14 dokumen atau 100%; persentase jumlah anggaran yang diblokir menurun memiliki target sebesar 8 persen tercapai 0 persen atau 100%; nilai indikator jumlah revisi anggaran seluruh satuan kerja memiliki target sebesar 79 persen tercapai sebesar 35,02 persen atau 44,32% ; nilai indikator deviasi rencana penarikan dana memiliki target sebesar 92 poin tercapai sebesar 98,27 poin atau 100%; tingkat kepuasan layanan perencanaan pembangunan LHK memiliki target sebesar 4 poin tercapai sebesar 3,97 poin atau 99,25% , dan Tingkat kepuasan layanan penyusunan anggaran memiliki target sebesar 4 poin tercapai sebesar 3,97% atau 99,25%. Kinerja yang memiliki capaian tertinggi adalah jumlah dokumen perencanaan yang holistik, integratif, dan berbasis spasial , nilai indikator deviasi rencana penarikan dana, dan jumlah anggaran yang diblokir menurun memiliki target. Rata- rata capaian Bagian Rencana Program dan Anggaran secara keseluruhan adalah sebesar

91,52% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 100%.

Kinerja yang diperjanjikan dan capaian oleh Bagian Pengelolaan Kinerja dan Kerjasama Dalam Negeri kepada Kepala Biro Perencanaan antara lain nilai capaian kinerja memiliki target sebesar 16 poin tercapai 15,45 poin atau 96,56%; nilai pengukuran kinerja memiliki target sebesar 23 poin tercapai 15,28 poin atau 66,43%; nilai pelaporan kinerja memiliki target sebesar 12 poin tercapai 11,54 poin atau 96,17%; nilai evaluasi kinerja memiliki target sebesar 8 poin tercapai 7,21 poin atau 90,13%; jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja yang dapat digunakan untuk Evaluasi AKIP memiliki target sebesar 14 dokumen tercapai 16 dokumen atau 100%; persentase Kerjasama dalam Negeri yang sesuai dengan Renstra KLHK memiliki target sebesar 100 persen tercapai 100%; tingkat kepuasan layanan Evaluasi dan laporan kinerja pembangunan LHK memiliki target sebesar 4 poin tercapai 3,87 poin atau 96,75%; dan tingkat kepuasan internal layanan ketatausahaan Biro Perencanaan memiliki target sebesar 4 poin tercapai 3,56 poin atau 89%. Kinerja yang memiliki capaian tertinggi adalah jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja yang dapat digunakan untuk Evaluasi AKIP dan persentase Kerjasama dalam Negeri yang sesuai dengan Renstra KLHK. Rata- rata capaian Bagian Bagian Pengelolaan Kinerja dan Kerjasama Dalam Negeri secara keseluruhan adalah sebesar 91,88% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,89%.

Tabel 6. Sasaran dan capaian kinerja Bagian Rencana, Program dan Anggaran Biro Perencanaan

NO	SASARAN	KINERJA YANG DIPERJANJIKAN	CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA
I	Terselenggaranya Koordinasi dan Pembinaan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan KLHK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai perencanaan kinerja, 23 poin 2. Jumlah dokumen perencanaan yang holistik, integratif, dan berbasis spasial, 14 dokumen 3. Persentase jumlah anggaran yang diblokir menurun, 8 persen 4. Nilai indikator jumlah revisi anggaran seluruh satuan kerja, 79 poin 5. Nilai indikator deviasi rencana penarikan dana, 92 poin 6. Tingkat kepuasan layanan perencanaan pembangunan LHK, 4 poin 7. Tingkat kepuasan layanan penyusunan anggaran, 4 poin 	<p>22,50 poin</p> <p>14 dokumen</p> <p>0 persen</p> <p>35,02 poin</p> <p>98,27 poin</p> <p>3,97 poin</p> <p>3,97 poin</p>	<p>97,83%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>44,32%</p> <p>100%</p> <p>99,25%</p> <p>99,25%</p>
No.	Komponen (intervensi yang dibutuhkan untuk memenuhi kinerja yang diperjanjikan): Koordinasi dan Pembinaan Rencana Program dan Anggaran			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan program rencana dengan berorientasi pada hasil 2. Meningkatkan kualitas penganggaran yang adaptif dan lentur <p>Dari Anggaran Rp. 4,965 Milyar, Bagian Rencana Program dan Anggaran telah merealisasikan sebesar Rp. 4,965 M atau 100%</p>			
	<p>Pelaksanaan <i>Forclime Forest Climate Change</i> Dari Anggaran Rp. 30,014 Milyar telah merealisasikan sebesar Rp. 29,966 M atau 99,84%</p>			

Tabel 7. Sasaran dan capaian kinerja Bagian Pengelolaan Kinerja Biro Perencanaan

NO	SASARAN	KINERJA YANG DIPERJANJIKAN	CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA
2	Terselenggaranya Koordinasi dan Harmonisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan LHK, Penyiapan Koordinasi, dan Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri, Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai capaian kinerja, 16 poin 2. Nilai pengukuran kinerja, 23 poin 3. Nilai pelaporan kinerja, 12 poin 4. Nilai evaluasi kinerja, 8 poin 5. Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja yang dapat digunakan untuk Evaluasi AKIP, 14 dokumen 6. Persentase Kerjasama dalam Negeri yang sesuai dengan Renstra KLHK, 100 persen 7. Tingkat kepuasan layanan Evaluasi dan laporan kinerja pembangunan LHK, 4 poin 8. Tingkat kepuasan internal layanan ketatausahaan Biro Perencanaan, 4 poin 	<p>15,45 poin</p> <p>15,28 poin</p> <p>11,54 poin</p> <p>7,21 poin</p> <p>16 dokumen</p> <p>100 persen</p> <p>3,87 poin</p> <p>3,56 poin</p>	<p>96,56%</p> <p>66,43%</p> <p>96,17%</p> <p>90,13%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>96,75%</p> <p>89%</p>
No.	Komponen (intervensi yang dibutuhkan untuk memenuhi kinerja yang diperjanjikan): Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Kinerja dan Kerjasama Dalam negeri			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian LHK 2. Meningkatkan pelayanan kerumahtanggaan Biro Perencanaan <p>Dari Anggaran Rp. 10,197 Milyar, Bagian Pengelolaan Kinerja dan Kerjasama Dalam Negeri telah merealisasikan sebesar Rp. 10,186 M atau 99,88%</p>			

INDEKS KEPUASAN INTERNAL LAYANAN KETATAUSAHAAN

SUBBAGIAN Tata Usaha Biro Perencanaan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MenLHK-II/2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtangaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Tata Usaha perlu dilakukan evaluasi pada setiap tahun untuk peningkatan kinerja.

Tingkat kepuasan layanan Biro Perencanaan Tahun 2022, dibentuk dari 4 komponen yaitu:

1. Bidang Kepegawaian
2. Bidang Keuangan
3. Bidang Barang Milik Negara (BMN)
4. Bidang Persuratan/Kearsipan

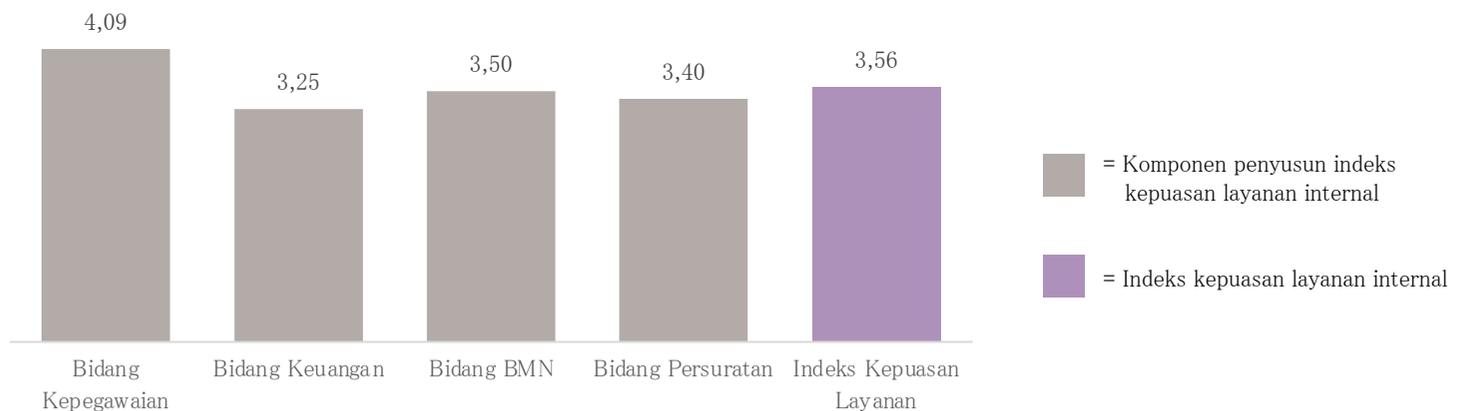
Penilaian yang digunakan adalah *skala Likert* 1-5 (sangat tidak puas - sangat puas) dan dengan responden yaitu seluruh pegawai Biro Perencanaan. Dari 4 komponen yang digunakan diperoleh hasil masing-masing yaitu:

1. Bidang kepegawaian dengan indeks kepuasan layanan senilai 4,09 (puas)
2. Bidang keuangan dengan indeks kepuasan layanan senilai 3,25 (netral)

3. Bidang Barang Milik Negara (BMN) dengan indeks kepuasan layanan senilai 3,50 (netral)
4. Bidang persuratan/kearsipan dengan indeks kepuasan layanan senilai 3,40 (netral)

Untuk nilai Indeks Kepuasan Layanan Ketata Usaha Biro Perencanaan pada TA. 2021 yaitu 3 poin (netral) dan dengan capaian kinerja sebesar 75%. Sedangkan Indeks Kepuasan Layanan Ketata Usaha Biro Perencanaan pada TA. 2022 sebesar 3,56 poin (netral) dengan capaian kinerja sebesar 89%. Hal tersebut menunjukkan nilai YoY meningkat 14%.

Indeks Kepuasan Layanan Internal dan Komponen Penyusunnya



Gambar 24. Grafik nilai indeks kepuasan layanan internal dan komponen penyusunnya



Tahun 2022 Biro Perencanaan memperoleh penghargaan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal yakni sebagai Unit Pengolah kearsipan yang mendapatkan nilai 65,19 dengan kategori BAIK. Penghargaan ini akan menjadikan unit kearsipan khususnya subbagian Tata usaha terus meningkatkan kinerjanya untuk tahun-tahun berikutnya.



Biro Perencanaan telah melakukan Medical Check Up, Vaksin Influenza dan Tes Antibodi Covid 19 serta konsultasi kesehatan dengan tim medis. Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi seluruh staff Biro Perencanaan

Foto oleh: Rifqi Alif Nugraha



Sosialisasi Aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) dengan Biro Humas kepada seluruh staf lingkup Biro Perencanaan untuk mendorong Langkah-Langkah transformasi e-Office

Foto oleh: Chindy Chesarah

PENUTUP

Perjalanan menuju Kawah Demas disugahi barisan Pohon Cantigi (*Vaccinium varingaefolium*) ditemani pemandu wisata yang menceritakan legenda Dayang Sumbi, konon apabila sang wanita memakan pucuk daun Cantigi maka akan abadi kecantikannya.

Foto oleh Ineke Tya Claudya Sarwono Putri

04

PENUTUP

“Tujuan tanpa perencanaan,
hanyalah sebuah harapan.”

Dr. Ir. Apik Karyana, M.Sc

Pelaksanaan kinerja tahun 2022 oleh KLHK adalah tahun ke-tiga dari periode RPJMN 2020 - 2024. Artinya seluruh pencapaian yang diraih pada tahun 2022 ini bisa merefleksikan upaya-upaya yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah, apakah telah berjalan secara baik atau masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki hingga periode RPJMN berakhir.

Catatan penting dari pencapaian 2022 oleh Biro Perencanaan, sebagaimana tertuang dalam hasil penilaian SAKIP KLHK adalah bagaimana agar seluruh hasil monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan dapat secara jujur dan terpercaya menjadi umpan balik dalam menentukan aspek perencanaan ke depan, baik dalam penentuan prioritas kebijakan maupun dalam menjaga kualitas layanan yang diberikan oleh KLHK sebagai instansi pemerintah.

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada prinsipnya sangat bersentuhan dengan seluruh sendi kehidupan masyarakat, menjadi sangat krusial di tengah berbagai perhatian

dan harapan dunia terhadap kualitas lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu, komitmen pemerintah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan harus mampu menjawab semua tujuan-tujuan yang ingin dicapai secara efektif dan efisien.

Biro Perencanaan sebagai salah satu punggawa yang mengawal jalur perjalanan Akuntabilitas Kinerja di KLHK akan terus memberikan layanan perencanaan melalui Program Dukungan Manajemen yang andal dan berkualitas. Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2022 ini, adalah cermin diri bagi instansi agar lebih meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu. Segala masukan dan koreksi perbaikan akan diterima oleh Biro Perencanaan untuk menyederhanakan bisnis proses dan meningkatkan kinerja instansi.

Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam merawat kinerja bersama untuk pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia yang melayani dengan prima, bernilai manfaat dan berkelanjutan.





MENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

bat. Lingkungan Sehat, Sejahtera





Scan Barcode disamping
untuk membaca Risalah
Perjalanan Lapangan
Biro Perencanaan
Bersama Kantor Staf
Presiden tentang
Pengelolaan Taman
Nasional

Kupu-kupu jenis *Troides helena* (betina) salah satu jenis kupu-kupu di Sanctuary kupu-kupu TN. Bantimurung. Biro Perencanaan berkesempatan mengunjungi TN. Bantimurung dalam rangka kunjungan lapangan pengelolaan Taman Nasional bersama Kantor Staf Presiden

Foto Oleh : Ajian Yogo Pratopo

Lampiran

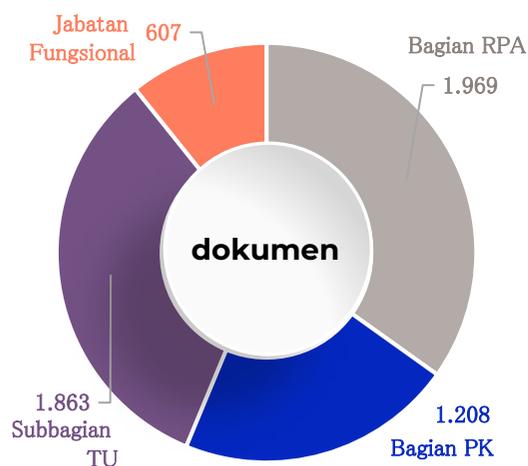
Laporan Kinerja Biro Perencanaan

DAFTAR LAMPIRAN

1. Profil surat masuk
2. Capaian Hibah, Kerjasama, Dana Transfer, dan SPIP
3. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDGs)
4. Pengarusutamaan Gender KLHK

PROFIL SURAT MASUK BIRO PERENCANAAN 2022

SEBARAN DISPOSISI SURAT
BIRO PERENCANAAN



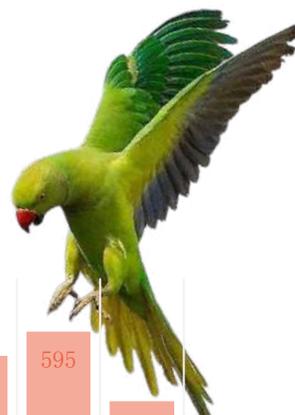
Gambar 25. Grafik sebaran surat masuk setiap Bagian lingkup Biro Perencanaan

5.647 dokumen

Surat Masuk yang diterima oleh Biro Perencanaan dalam 1 Tahun atau rata-rata 466 surat perbulan, sebagai perbandingan surat masuk pada satker Biro Keuangan sejumlah 1.566 pada tahun 2022

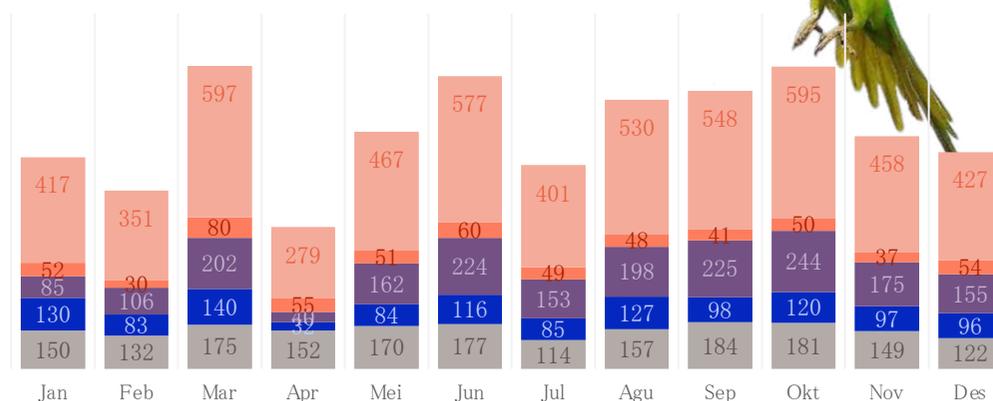
Catatan :

Surat Masuk yang diterima oleh Biro Perencanaan belum termasuk dengan surat sidang kabinet dan rapat internal Menteri LHK



SEBARAN SURAT PERBULAN

■ RPA ■ PK ■ TU ■ JF ■ Jumlah



Gambar 26. Grafik sebaran surat masuk per Bulan di Biro Perencanaan

Bila dilihat dari tren surat masuk per bulan, periode penting bagi Biro Perencanaan terjadi pada bulan Maret, Juni dan Oktober. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada bulan-bulan tersebut perlu dilakukan antisipasi dalam hal penyiapan sumber daya baik SDM, waktu dan anggaran untuk melakukan tindak lanjut terhadap tugas-tugas yang harus diselesaikan.



Data Pendukung
Kerjasama, Hibah
DAK dan SPIP



Capaian Hibah, Kerjasama, Dana Transfer, Dan SPIP Tahun 2022

PROGRAM FORCLIME FC 2022

PENGURANGAN EMISI KARBON

Berdasarkan perhitungan emisi aktual yang dilakukan hingga tahun 2022, dapat dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan telah mencapai target penurunan emisi sebesar 300.000–400.000 tCO₂e. Nilai persentase penurunan emisi rata-rata di DA#7, DA#10, DA#2 dan DA#8 sebesar 65% (Remark Asia, 2022). Persentase ini menunjukkan bahwa program FORCLIME FC telah berhasil melebihi target penurunan emisi dengan bantuan luar negeri yaitu 41%. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh FORCLIME FC untuk mengurangi emisi karbon melalui kegiatan investasi hingga tahun 2021 antara lain:

- Kegiatan investasi yaitu penanaman pohon telah dimulai sejak 2015 di Berau, 2016 di Kapuas Hulu dan Malinau dengan total pohon hidup hingga sekarang 2.620.526 pohon dengan luasan areal penanaman 5.580,67 ha.
- Area kawasan hutan yang telah ter patroli di 3 DPMU adalah 715.036,57 ha
- Tercapainya PLUP tata batas dan tata guna lahan, melalui penerbitan PerBup Tata Batas 25 Desa Kapuas Hulu, 6 Desa di Malinau, 17 Desa di Berau

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

- *Demonstration plot* serta penjualan produk-produk KUPS yang telah difasilitasi oleh FORCLIME FC telah memberikan pendapatan bagi penerima manfaat desa dampingan FORCLIME FC hingga 2022 sebesar Rp 68.391.090.153,- dengan rincian sebagai berikut Kapuas Hulu sebesar Rp62.295.915.406,- Berau sebesar Rp5.905.095.221,- dan Malinau Rp190.079.526,-.
- Indeks Desa Membangun (IDM) yang dinilai oleh masing-masing perangkat desa dan *diupdate* setiap tahun oleh pemerintah kabupaten setempat. Dari data tahun 2016 hingga 2022 grafik IDM di lokasi *Demonstration Activity* terus meningkat dengan rata-rata berkembang hingga maju. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa intervensi FORCLIME FC turut mendorong peningkatan IDM

PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

- Pendampingan Perhutanan Sosial telah dilaksanakan di 19 Hutan Desa dan 1 kemitraan di ketiga Kabupaten, Kapuas Hulu, Berau dan Malinau.
- Setidaknya sebanyak 103 KUPS telah dibentuk oleh Hutan Desa dampingan FORCLIME FC
- Hutan Desa Long Lanuk meraih Juara Harapan III pada penghargaan Wana Lestari
- Program FORCLIME FC telah memfasilitasi **kegiatan PHL pada dua IUPHHK-HA (PT Sumalindo Lestari Jaya IV dan PT INHUTANI I Unit Labanan)** antara lain *Reduced Impact Logging (RIL)*, pengelolaan dan monitoring area nilai konservasi tinggi (NKT), terjalinnya kemitraan kehutanan, dan pelatihan-pelatihan. Pada Januari 2020 PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memperoleh **sertifikat FSC**.
- Pada akhir implementasi, Program FORCLIME FC mampu mendemonstrasikan perlindungan hutan yang efektif melalui keterlibatan penduduk lokal ke dalam kegiatan perlindungan dan pemantauan, terutama di hutan di bawah skema Perhutanan Sosial, yang berpotensi diterapkan di bawah skema pembiayaan publik yang akan datang di Indonesia.

PENURUNAN EMISI

Tabel 8. Tabel penurunan emisi di 3 Kabupaten wilayah kerja FORCLIME

Kabupaten	Lokasi DA	FRL (ton CO ₂ /tahun)			Periode	Rataan Reduksi Emisi	% Reduksi Emisi(%)	Rataan Reduksi Emisi	% Reduksi Emisi(%)
		Hanya DA	DA & Buffer	Hanya DA		DA & Buffer	(tonCO ₂ /thn)	(tonCO ₂ /thn)	(tonCO ₂ /thn)
Berau	6	1990-2012	1.117.346	4.092.076	2016-2021	-312.204	-28,21%	-2.894.176	-70,73%
Berau	7	1990-2012	503.550	1.212.607	2013-2021	297.348	59,05%	-792.377	-65,34%
Berau	10	1990-2012	318.729	468.293	2018-2021	123.453	38,78%	269.310	57,51%
Kapuas Hulu	2	1990-2012	28.166	115.233	2015-2021	22.146	78,63%	102.142	88,64%
Kapuas Hulu	8	1990-2012	91.600	164.492	2016-2021	77.806	84,94%	-17.177	-10,44%
Malinau	3	1990-2012	14.983	174.610	2013-2021	-60.960	-406,85%	-97.125	-55,62%

Dengan persentase di atas, target 300.000-400.000 ton Co₂e telah tercapai. Pengurangan emisi terjadi di 4 lokasi DA,

yaitu DA#7 & DA#10 (Berau), DA#2 & DA#8 (KapuasHulu), sedangkan DA#6 (Berau) dan DA#3 (Malinau) tidak terjadi pengurangan

emisi. Pengurangan emisi yang relatif besar di DA#8 dan DA#2 (85% dan 79%), diikuti DA#7 dan DA#10 (59% dan 39%).

SERTIFIKASI

FORCLIME FC telah memfasilitasi kegiatan *Sustainable Forest Management* (SFM) atau Pengelolaan Hutan Lestari di PT.

Sumalindo Lestari Jaya IV dan PT. INHUTANI I Unit Labanan seperti

1. Reduce Impact Logging (RIL)
2. Pengelolaan dan Monitoring Nilai Konservasi Tinggi (NKT)
3. Kemitraan Kehutanan
4. Peningkatan kapasitas

PERHUTANAN SOSIAL

1. Forclime FC memfasilitasi 19 Desa dan 1 kemitraan di ketiga Kabupaten, Kapuas Hulu, Berau dan Malinau
2. Kegiatan fasilitasi Perhutanan Sosial terdiri dari pelatihan, penelitian, perlengkapan produksi, serta jual beli produk.
3. 103 KUPS terbentuk oleh hutan desa yang menghasilkan beberapa produk Hasil Hutan Bukan Kayu. 65 KUPS terbentuk di Kapuas Hulu, 21 KUPS Berau, dan 17 KUPS di Malinau.

CAPAIAN MILESTONE FORCLIME FC

2021

1. 20 Desa telah difasilitasi pendampingan pada skema perhutanan sosial dan Hutan Desa Long Lanuk mendapatkan penghargaan Wana Lestari
2. Dilakukan strategi percepatan untuk mencapai realisasi anggaran 90%
3. Persiapan pengadaan tender konsultasi FORCLIME FC (kegiatan *movev*, *carbon inventory*, *best practices* dan penyusunan profil desa) pada tahun 2022
4. Dilakukan finalisasi penyusunan *Exit Strategy*

2020

1. Kegiatan investasi *demonstration plot* tetap mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat selama pandemi Covid-19
2. Kegiatan inventarisasi karbon dilaksanakan di tiga Kabupaten dampingan FORCLIME FC
3. Proses pengajuan skema Perhutanan Sosial yang terdiri dari 3 Hutan Desa dan 1 Kemitraan dengan 16 desa lainnya telah mendapatkan SK
4. Pengajuan pemotongan anggaran kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana HLN sebagai dampak pandemi Covid-19

2018

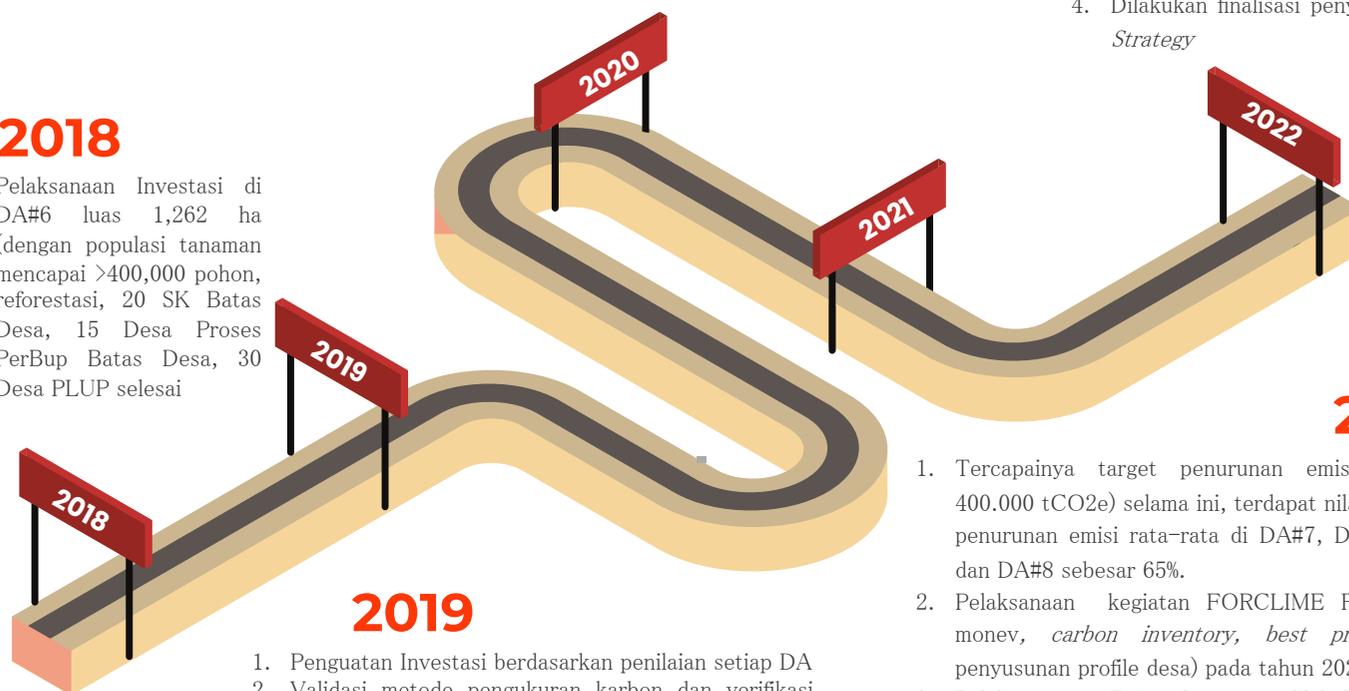
Pelaksanaan Investasi di DA#6 luas 1,262 ha (dengan populasi tanaman mencapai >400,000 pohon, reforestasi, 20 SK Batas Desa, 15 Desa Proses PerBup Batas Desa, 30 Desa PLUP selesai

2022

1. Tercapainya target penurunan emisi (300.000–400.000 tCO₂e) selama ini, terdapat nilai presentase penurunan emisi rata-rata di DA#7, DA#10, DA#2 dan DA#8 sebesar 65%.
2. Pelaksanaan kegiatan FORCLIME FC (kegiatan *movev*, *carbon inventory*, *best practices* dan penyusunan profile desa) pada tahun 2022
3. Pelaksanaan *Exit Strategy* dilakukan dengan *handing-over* dengan lembaga yang sesuai, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, UPT seperti KPH, swasta maupun lembaga non-pemerintah

2019

1. Penguatan Investasi berdasarkan penilaian setiap DA
2. Validasi metode pengukuran karbon dan verifikasi data penurunan karbon
3. Penyiapan program untuk *exit strategy* kepada PEMDA, KPH, Hutan Desa dan Kemitraan, BUMDES, Dilanjutkan oleh Donor Lain, dan Persiapan pengelolaan aset
4. Persiapan pengakhiran/perpanjangan Project FORCLIME FC (T - 1)
5. *Monitoring Program*
6. Dokumentasi *best practices dan lesson learned*



Fordlime FC - Berau



MENGUATKAN SIMPUL KERJASAMA

Salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan ialah terkait layanan koordinasi kerjasama dalam Negeri lingkup KLHK. Pada Tahun 2022, telah terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Dalam Negeri. Peraturan ini merupakan perubahan dan pematapan dari Peraturan Menteri LHK Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup KLHK yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum sehingga perlu di ganti.

Peraturan Menteri LHK Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Dalam Negeri merupakan pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup KLHK mulai dari tata cara permohonan kerja sama hingga evaluasi dan *monitoring* atas kerja sama yang telah berlangsung antara KLHK dengan mitra. Menurut Peraturan ini Kerja Sama Dalam Negeri adalah Kesepakatan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Mitra yang dituangkan dalam bentuk tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

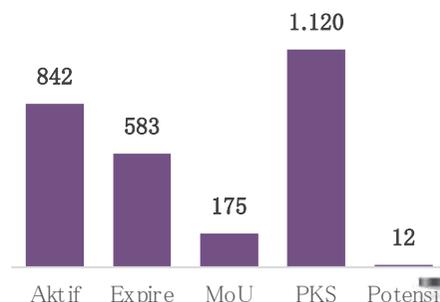
Prinsip Kerja Sama Dalam Negeri diantaranya adalah: Efisiensi, Efektivitas, Sinergi, Saling Menguntungkan, Itikad Baik, Persamaan Kedudukan, Transparan, Keadilan, Kesetaraan Gender, Kepastian Hukum, Akuntabilitas, Saling Percaya.

Kerja Sama Dalam Negeri di Kementerian LHK bertujuan untuk :

1. Meningkatkan koordinasi dalam negeri antara Kementerian LHK dengan pihak eksternal
2. Mendukung IKU, IKP, IKK setiap satuan kerja di KLHK
3. Sebagai *creative financing* dan *filling the gap* untuk program kegiatan yang tidak di danai APBN

Selama tahun 2022, Biro Perencanaan telah memfasilitasi beberapa inisiasi kerja sama KLHK dengan para pihak diantaranya dengan Kementerian, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, dan Organisasi Kemasyarakatan. Hingga tahun 2022 telah teridentifikasi sebanyak 1.436 Dokumen kerja sama. Rincian dokumen yang diketahui tersebut terdiri dari 842 dokumen aktif, 583 dokumen expired, 175 MoU, 1.120 Perjanjian Kerjasama (PKS), dan 12 potensi.

Total Dokumen Kerjasama Per Kategori



APLIKASI SIKERJA

SIKERJA bertujuan untuk menertibkan administrasi pengelolaan kerja sama dalam negeri; update data kerja sama dalam negeri di lingkup KLHK; dan mempermudah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kerja sama (dukungan kerja sama dalam kinerja IKU, IKP, dan IKK), pada tahun 2022 telah dilakukan migrasi server aplikasi SiKerja dan Bimbingan Teknis untuk Peningkatan Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri KLHK melalui Aplikasi SiKerja

SiKerja adalah sebuah Platform / sistem yang menampilkan informasi tentang dokumen kerja sama yang dilakukan oleh seluruh unit kerja baik Eselon I, Eselon II, maupun UPT yang berada di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



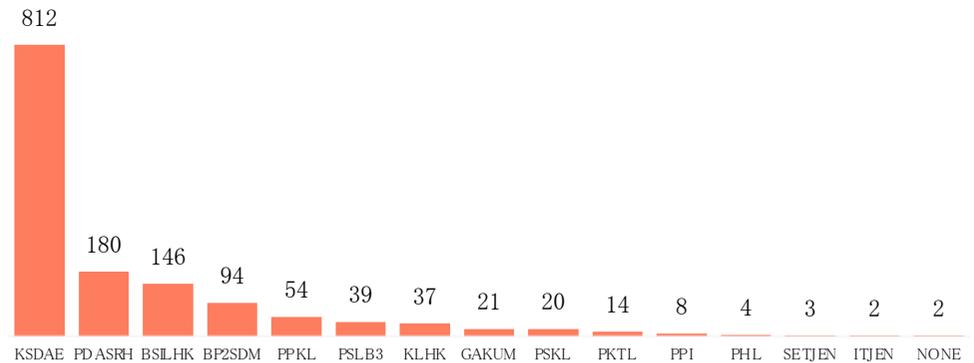
SEBARAN KERJASAMA DI KLHK

Sebaran Kerjasama Setiap Eselon I

Pada bulan November 2022, Biro Perencanaan telah melaksanakan Rapat Peningkatan Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri Per tanggal 31 Desember 2022, tercatat dalam aplikasi Si Kerja ada 1436 dokumen Kerja Sama Dalam Negeri. Dokumen MoU yang tercatat sebanyak 175 dokumen dan PKS sebanyak 1120 dokumen. 842 dokumen dengan status aktif, 583 dokumen dengan status *expired* dan 12 status potensi yang ada pada *Gambar Tabel Kerja Sama Dalam Negeri No.1*.

Dokumen kerja sama yang *expired* menjadi bahan evaluasi apakah akan dilakukan kerja sama yang dimaksud perlu dilakukan perpanjangan atau tidak.

Sebaran Kerja Sama Lingkup KLHK



Gambar 27. Grafik sebaran kerjasama di Unit Kerja Eselon I

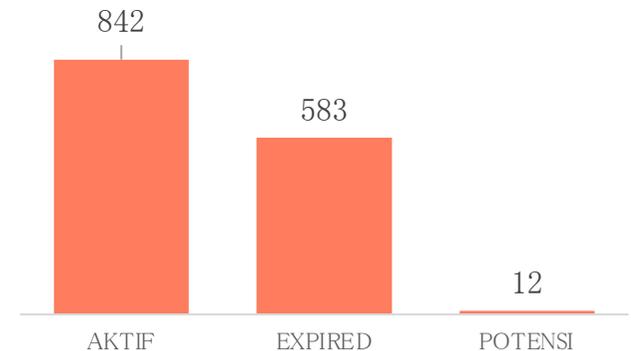
Sebaran Kerjasama Berdasarkan Keaktifan Dokumen

Sebaran Kerja Sama Dalam Negeri lingkup KLHK paling banyak ada di Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, tercatat sebanyak 559 Dokumen aktif dan 245 dokumen yang *expired*. Hal ini dikarenakan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem paling banyak di KLHK dan banyak melakukan kerja sama dengan berbagai mitra. Sedangkan sebaran Kerja Sama Dalam Negeri paling sedikit ada di Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari. Hal ini dikarenakan Sekretaris Jenderal

merupakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Inspektorat Jenderal merupakan kegiatan Pengawasan Internal.

Sebaran dokumen MoU (Nota Kesepahaman) paling banyak dari Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan yaitu sebanyak 65 Dokumen yang sudah tercatat dalam aplikasi Si Kerja. Untuk dokumen PKS (Perjanjian Kerja Sama) paling banyak dari Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Dokumen Kerjasama



Gambar 28. Grafik status dokumen kerjasama KLHK



Pada Tahun 2022, Biro Perencanaan telah memfasilitasi berbagai Kerja Sama Dalam Negeri dengan berbagai mitra luar KLHK diantaranya dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Badan Usaha serta Organisasi Masyarakat. Melalui layanan koordinasi kerja sama ini, Biro Perencanaan harus memastikan bahwa seluruh kerjasama yang ada harus selaras dengan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis KLHK.

Foto oleh : Agustina Sandrasari

KOORDINASI DAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER

Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. DAK bidang LHK bertujuan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan dari limbah cair, pemantauan penggunaan merkuri pada tambang emas rakyat, pengelolaan sampah untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan; dan untuk memulihkan kesehatan dan/atau meningkatkan daya dukung dan daya tampung Daerah Aliran Sungai, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui skema hutan sosial ataupun pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui pembentukan Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian LHK.

Dana Alokasi Khusus 2022 dilaksanakan oleh 203 OPD yang terdiri atas 178 OPD penerima DAK subbidang lingkungan hidup dan 25 OPD penerima DAK subbidang kehutanan. Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 688,20 miliar dengan volume target sebesar 24.706 satuan volume (unit/paket).

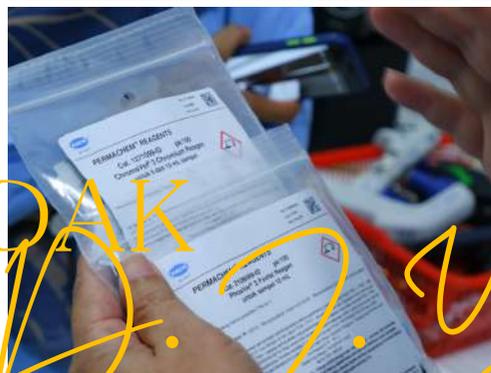
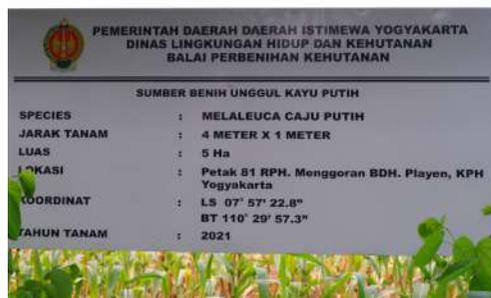
Subbidang Lingkungan Hidup memperoleh anggaran sebesar Rp. 343,42 miliar dengan volume target sebesar 886 satuan volume. Proporsi pagu subbidang lingkungan hidup terhadap pagu total DAK tahun 2022 sebesar 49,90%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan dua kegiatan dengan 10 rincian kegiatan.

Sementara subbidang Kehutanan memperoleh anggaran sebesar Rp. 344,78 miliar dengan volume target sebesar 23.820 satuan volume. Proporsi pagu subbidang kehutanan terhadap pagu total DAK tahun 2022 sebesar 50,09%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 kegiatan dan 7 rincian kegiatan.



Kunjungan lapangan bersama DLH Prov. DI Yogyakarta perihal monitoring dan evaluasi program DAK subbidang Kehutanan dan subbidang Lingkungan hidup

Foto oleh : Marwedhi Nurratyo



DAK
DIY
Yogyakarta

DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2022

Kegiatan Subbidang Lingkungan Hidup

1. Pengelolaan sampah serta sarana dan prasarana pendukungnya

- Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU)
- Pembangunan Bank Sampah Induk (BSI)
- Penyediaan Mesin *Press* Hidrolik
- Penyediaan Mesin Pencacah Organik
- Pengadaan Kontainer Sampah
- Penyediaan alat angkut sampah *Arm Roll*
- Penyediaan Alat Angkut Sampah
- Pembangunan Rumah Kompos

2. *Early warning system* pengendalian bencana lingkungan

- Pengadaan Sistem pemantauan kualitas air secara *online* dan otomatis di DAS yang mendukung Food Estate (bangunan dan alat)
- Pengadaan peralatan uji kualitas air dan merkuri

Kegiatan Subbidang Lingkungan Hidup

1. Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif

- Sarpras ekonomi produktif KTH Madya, KUPS Gold dan/atau Silver

2. Rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan

- Rehabilitas mangrove
- Penanaman hutan rakyat
- Pembuatan DAM penahan
- Pembuatan Gully plug
- Pembuatan sumur resapan
- Pembangunan sumber benih unggul (5 ha/ unit)

Lingkungan Hidup



178 OPD

OPD Penerima DAK
subbidang lingkungan hidup
(DLH Prov/Kab/Kota)



Rp. 343,42 M

Pagu anggaran
subbidang lingkungan
hidup



886

Satuan volume
subbidang LH
(unit/paket)



Kehutanan



25 OPD

OPD Penerima DAK
subbidang Kehutanan
(Dishut Provinsi)



Rp. 344,78 M

Pagu anggaran
subbidang kehutanan



23.820

Satuan volume
subbidang kehutanan
(unit/paket)

REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2022

KINERJA DAK 2022 berdasarkan realisasi anggaran adalah 42,17% atau sebesar Rp. 290,21 miliar dengan pagu total sebesar Rp. 688,20 miliar.

Realisasi anggaran subbidang kehutanan yakni sebesar 49,55% atau sebesar Rp 170,85 miliar dari pagu Rp. 344,78 miliar. Sedangkan capaian realisasi anggaran subbidang

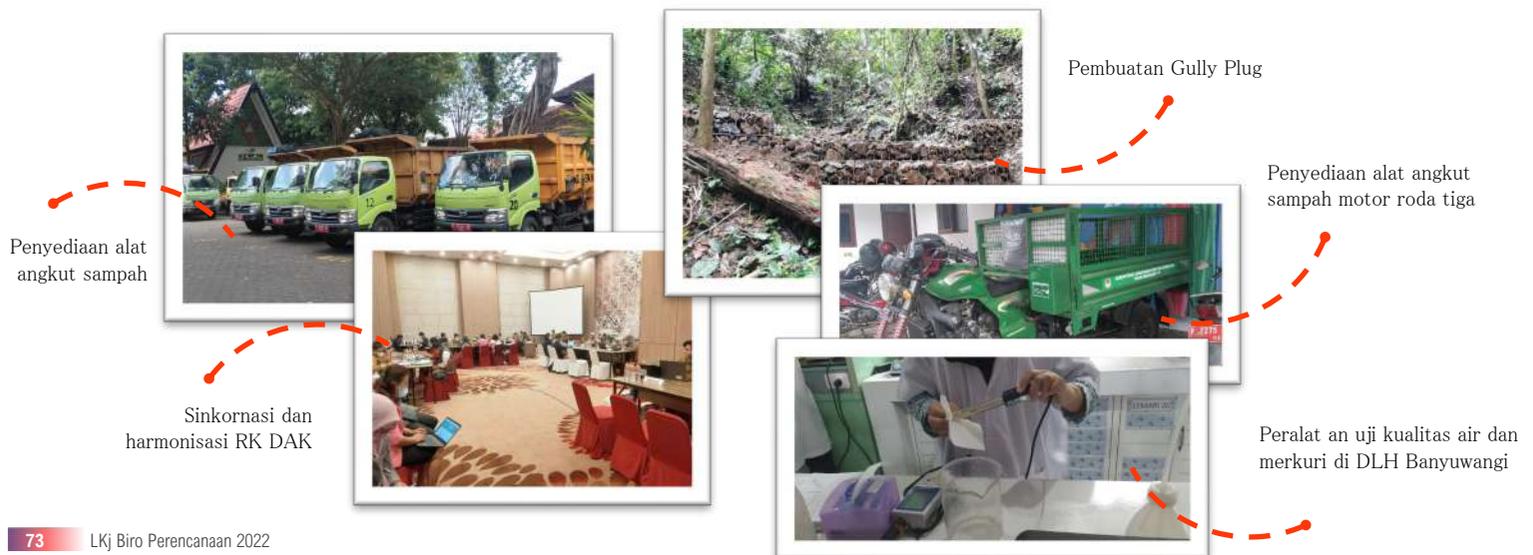
lingkungan hidup tercatat sebesar 34,76% atau Rp. 119,36 miliar dari pagu Rp. 343,42 miliar. Kinerja DAK 2022 berdasarkan capaian fisik sebesar 48,37%, atau sebesar 11.950 satuan volume dari target 24.706 satuan volume. Capaian fisik tersebut terdiri atas capaian subbidang kehutanan sebesar 11.586 satuan volume atau 48,64% dari target 23.820 satuan

volume dan capaian subbidang lingkungan hidup sebesar 364 satuan volume atau 41,08% dari target 886 satuan volume.

Persentase realisasi anggaran dan capaian fisik ini merupakan data sementara. Batas akhir pelaporan DAK hingga tanggal 13 Januari 2023

Sumber: MONEVDAK-LHK Update 12 Januari 2023

No	Subbidang	Pagu (Rp.)	Realisasi anggaran (Rp.)	% Realisasi	Volume	Capaian Volume	% Capaian
1	Kehutanan	344.780.040.580	170.849.023.244	49,55%	23.820	11.586	48,64%
2	Lingkungan Hidup	343.422.118.500	119.362.676.505	34,76%	886	364	41,08%
TOTAL		688.202.159.080	290.211.699.749	42,17%	24.706	11.950	48,37%

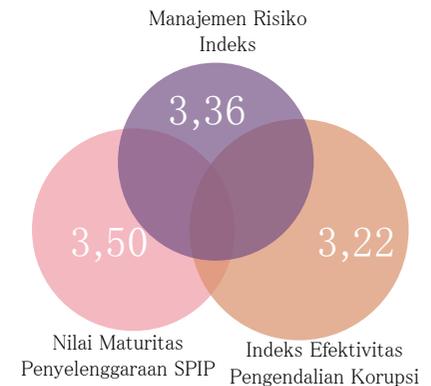


KOORDINASI PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI SPIP TERINTEGRASI 2022

SESUAI DENGAN PERATURAN Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi., mengamanatkan bahwa Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi dilakukan Manajemen Kementerian yaitu Sekretariat Jenderal. Selanjutnya dibentuk Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan

Menteri Nomor SK. 875/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2022 tanggal 12 Agustus 2022.

Biro Perencanaan mengkoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Lingkup Kementerian LHK Tahun 2022. Hasil Penilaian Mandiri tersebut telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat dan dievaluasi oleh Tim BPKP melalui Surat Tugas Nomor ST-306.1/D102/2/2022.



PENILAIAN MATURITAS MANDIRI SPIP PER ESELON 1 KLHK



Gambar 29. Grafik Penilaian Mandiri Maturitas SPIP berdasarkan unit kerja eselon 1

Nilai Maturitas SPIP Kementerian LHK Tahun 2022 adalah 3,50 poin atau level 3 dengan karakteristik *terdefenisi* yang artinya telah terdapat praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa

dokumentasi yang memadai. Target SPIP Kementerian LHK Tahun 2022 adalah Level 3, sehingga capaian kinerja indeks maturitas SPIP tercapai 100%. Nilai Indeks Maturitas SPIP tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP.

Masing-masing Unit Kerja Eselon I melakukan penilaian mandiri sebelum proses penjaminan kualitas oleh Inspektorat. Unit Kerja Eselon I dengan PM tertinggi sebesar 4,3 yaitu Ditjen PSKL sedangkan Unit kerja Eselon I terendah adalah Ditjen PDASRH dan Ditjen PSLB3.



Data Pendukung
Capaian Kinerja
TPB/ SDGs



engarusutamaaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)



Tujuan TPB/SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola.

SDGs telah menjadi kerangka bersama *stakeholders* untuk mencapai kesejahteraan bersama yang berkelanjutan. Pelaksanaan TPB/SDG di Indonesia diatur melalui Perpres 59 Tahun 2017, yang selanjutnya di *update* kembali melalui Perpres 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres ini mengatur mengenai penetapan ditetapkan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nasional Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB Tahun 2030 dan sasaran nasional rencana pembangunan jangka nasional Tahun 2020–2024.

Merujuk pada Metadata Indikator SDGs Nasional Jilid II, yang telah diselaraskan dengan RPJMN 2020 - 2024, diketahui bahwa dari 289 indikator SDGs global, terdapat 40 indikator SDGs nasional yang datanya bersumber dari KLHK, utamanya pada pilar lingkungan. Namun demikian, kontribusi kegiatan yang dipetakan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs nasional bersifat *interlinked*, setiap Rincian Ouput kegiatan KLHK berkontribusi baik pada pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan dan pilar tata kelola di SDGs.

Pelaksanaan TPB/SDGs di KLHK pada prinsipnya ialah upaya pencapaian kinerja dari seluruh program yang ada, karena nilai yang diusung dalam pembangunan LHK ialah pembangunan berkelanjutan. Keselarasan dengan SDGs terlihat mulai dari 13 sasaran strategis pada Renstra KLHK 2020 - 2024.

Biro Perencanaan, sebagai pengawal layanan perencanaan pada Program Dukungan Manajemen di KLHK secara rutin melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pemantapan pengarusutamaan SDGs di KLHK. Pada tahun 2022 telah dilakukan *virtual meeting* untuk membahas pencapaian SDGs 2021, penyusunan buku infografis capaian SDGs 2021, *monitoring* pencapaian SDGs bersama Sekretariat Nasional di Bappenas dan Kemenkomarvest, serta koordinasi persiapan keikutsertaan KLHK pada *Indonesia's SDGs Action Awards 2022*.

Indonesia's SDGs Action Awards 2022 merupakan ajang penghargaan yang digagas oleh Bappenas sebagai apresiasi kepada berbagai pihak yang telah menunjukkan kinerja terbaiknya dalam memberikan aksi nyata untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ajang penghargaan ini pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2022. Pada saat pembukaan *SDGs Annual Conference* tahun 2022 (SAC 2022) dilaksanakan di Golden Ballroom Hotel Sultan Jakarta tanggal 1 - 2 Desember 2022, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Suharso Monoarfa, memberikan penghargaan *SDGs Action Awards* dan *I-SIM for Cities* kepada para pemenang dalam 11 kategori, pada 1 Desember 2022. Kategori itu meliputi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Pelaku Usaha Besar, Pelaku usaha Kecil dan Menengah, Organisasi Masyarakat Sipil,

Organisasi Filantropi, Usaha Kecil dan Organisasi Orang Muda, Media, serta Pemerintah Kota dengan Penghargaan *Integrated-Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Cities*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meraih peringkat pertama *Indonesia's SDGs Action Awards 2022* kategori kementerian/lembaga. KLHK dipilih menjadi pemenang pertama oleh dewan juri karena dinilai konsisten dan terus berinovasi dalam implementasi pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs atau agenda 2030.

Beberapa *Best Parctice* dan kegiatan inovatif yang dilakukan KLHK dalam mendukung pencapaian SDGs digambarkan melalui 3 kegiatan yang meliputi (1) Perhutanan Sosial untuk Pengentasan Kemiskinan (Goals 1: Tanpa kemiskinan, Goals 2: Tanpa kelaparan, Goals 5: Kesetaraan gender, Goals 8: Penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, Goals 10: Pengurangan kesenjangan (gini ratio). Kemudian (2) Program Kampung Iklim sebagai Aksi Para pihak dalam Penanganan Perubahan Iklim (Goal 13: Penanganan Perubahan Iklim), dan (3) Sistem Monitoring Hutan Nasional/SIMONTANA sebagai Instrumen Pencapaian Ekosistem Daratan Berkelanjutan (Goals 15: Ekosistem daratan berkelanjutan). Ke semua *best practice* dan inovasi-inovasi KLHK dilakukan juga dalam rangka mendorong aksi nyata ekonomi hijau untuk mencapai SDGs.

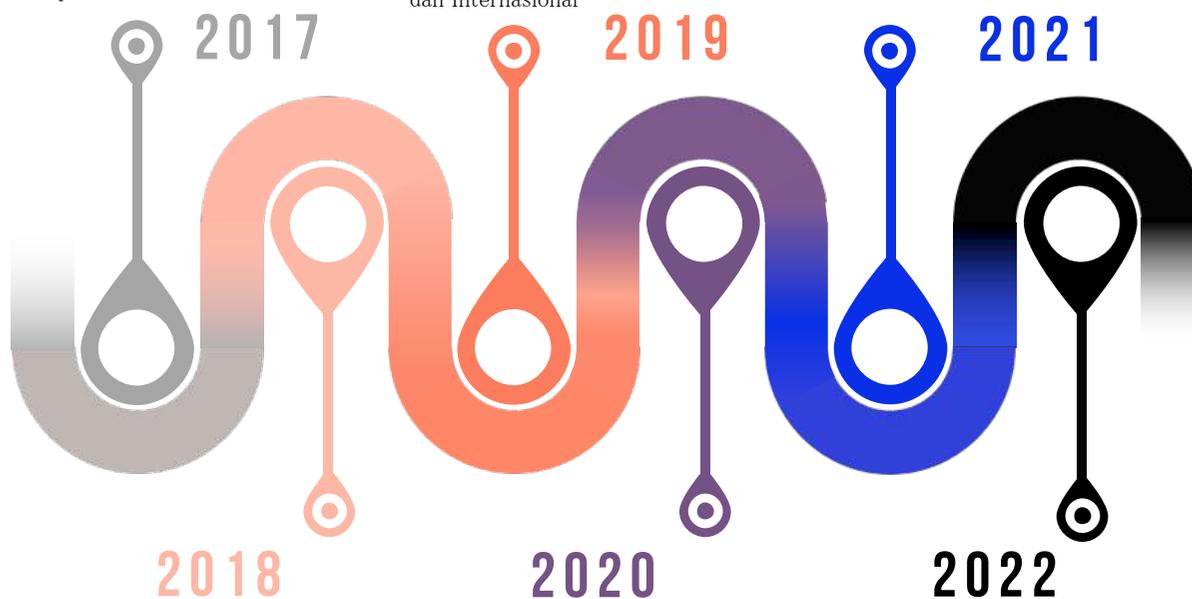
MILESTONE TPB/SDGs KLHK

Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan TPB/SDGs

- Identifikasi awal indikator Kinerja dalam Renstra KLHK yang selaras dengan Indikator SDGs
- Penyusunan RAN SDGs 2015-2019
- Indonesia Voluntary National Review 2017 oleh Sekretariat Nasional. SDGs
- Analisis kontribusi kegiatan lingkup KLHK terhadap TPB SDGs

- Aktif dalam DELRI untuk APFSD di Thailand serta dalam penyusunan dokumen VNR Indonesia untuk HLPF New York 2019
- Integrasi SDGs dengan Renstra Teknokratik KLHK 2020 - 2024
- Sosialisasi TPB/SDGs ke Satker di Daerah
- Aktif mengirimkan narasumber atau delegasi KLHK dalam berbagai seminar/konferensi SDGs baik Nasional dan Internasional

- Turut serta dalam penyusunan dokumen VNR Indonesia untuk HLPF 2021
- Diskusi SDGs Internal KLHK
- Review Pencapaian SDGs Bersama MenkoMarves dan KSP
- Penyusunan RAN SDGs 2020 - 2024 Bersama Bappenas
- Sosialisasi SDGs
- Lomba Karya Tulis SDGs



- Penyelarasan Program/Kegiatan dengan Target SDGs
- Serial Diskusi SDGs bersama Setiap Program Eselon I (Target dan Capaian)
- Pembentukan Tim Pelaksana dan Pokja SDGs KLHK
- Penyusunan Peta Jalan SDGs lingkup KLHK

- Diskusi SDGs Internal KLHK dan Review Pencapaian TPB/SDGs (virtual meeting)
- Penyusunan Bahan SDGs; Sosialisasi SDGs
- Pengintegrasian SDGs dalam Renstra 2020 - 2024
- Penyusunan publikasi SDGs (buku, poster, jurnal dll)
- Pemantapan PUG (Goals 5)

Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan TPB/SDGs

- APFSD 2022; Diskusi SDGs Internal KLHK; Infografis SDGs KLHK
- Mengikuti monitoring pencapaian SDGs oleh Bappenas dan KemenkoMarves
- Sosialisasi SDGs
- Pemantapan Kerja Sama Dalam Negeri dengan berbagai Perguruan Tinggi
- Indonesia SDGs Action Award



Kementerian LHK meraih peringkat pertama Indonesia's SDGs Action Award 2022 kategori Kementerian/lembaga. Penghargaan diserahkan oleh Kepala PPN/Bappenas kepada Sekretaris Jenderal KLHK mewakili Menteri LHK pada pembukaan SDGs Annual Conference 2022. KLHK dinilai sebagai Kementerian yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam upaya mainstreaming SDGs melalui Program dan Kegiatan yang dilakukan sejak SDGs disepakati sebagai agenda global pada tahun 2015.

Foto oleh : Khulfi M. Kalwani





Data Pendukung
PUG KLHK



Pengarusutamaan Gender Kementerian LHK 2022

Mengubah budaya netral gender menjadi *nature* atau budaya responsif gender tidak mudah. Tahun 2021, Kementerian LHK untuk kedua kalinya mendapatkan Anugerah Parahita Eka Praya (APE) kategori Mentor. Prestasi ini perlu diapresiasi dan sekaligus menjadi tantangan untuk senantiasa menjadi PUG bukan sekedar kegiatan formalitas melainkan telah menjadi budaya organisasi. MENTOR, istilah itu selalu menjadi alasan untuk terus berpikir besar (BIG THINK) dan berpikir strategis terhadap upaya-upaya bagaimana mendorong serta mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kementerian LHK.

PUG harus menjadi topik pembicaraan inklusif di semua unit kerja di KLHK dan sebanyak 15.800 ASN harus memperbincangkan nilai-nilai gender secara benar dan sukarela, bahkan tidak ada paksaan. Situasi ini tentunya harus didorong bagaimana ke depan perbincangan gender yang tadinya netral menjadi *nature*, dan bahkan menjadi sebuah kebiasaan bagi ASN bagaimana mempunyai pola pikir serta pola tindak yang sudah mencerminkan nilai-nilai gender dalam kehidupan sehari-hari.

TRANSFORMASI DARI NETRAL GENDER

MENJADI NATURE GENDER :

awal mula memperkuat pengetahuan dan kapasitas.

FESTIVAL GENDER 2021 dipercaya membawa perubahan sistemik, masif dan berkelanjutan. Kondisi tersebut tercapai apabila PUG menjadi percakapan besar bagi semua ASN di lingkup KLHK.

Language creates reality. Bahasa menciptakan realitas. Karenanya, bagaimana konsep dan praktik PUG menjadi percakapan sehari-hari pada semua jenjang eselon hingga staf di lapangan. Karena Festival Gender 2021 dirancang untuk menjangkau dan merawat komunikasi dengan sebanyak mungkin pegawai. Selain itu, bagaimana percakapan dirancang lebih ringan, sering dan menyenangkan tetapi dengan konten yang tetap berbobot.

Melalui rangkaian kegiatan ini, telah melahirkan 40 Gender Leaders dan 1.000 Gender Champions. Dalam 4 tahun mendatang, ketika ini rutin dilakukan setiap tahun, maka akan ada 160 Gender Leaders dan 5.000 Gender Champions. Sehingga setidaknya 30% ASN KLHK akan memperbincangkan gender dalam kehidupan sehari-hari baik di kantor maupun di rumah, dan jika semakin banyak yang memperbincangkan gender maka tidak menutup kemungkinan kedepan akan terbentuk sebuah “Gender Community” di Kementerian LHK.

Ada 4 kegiatan besar dalam Festival Gender yang telah dilakukan yaitu :

1. Kelas Inspiratif GLEADS (*Gender Leadership*)
2. TEACH (*Training For Eco Gender Hub*)
3. GENERATION (*Gender Competition*)
4. PESTA (Pekan Eco Gender dan Pelestarian Alam)

Gender Leadership (GLEADS)

Pertemuan bulanan yang dilaksanakan sebanyak 5–6 kali secara virtual melalui zoom meeting, spotify dan youtube dari bulan Juni s.d Oktober 2021, diikuti oleh 40 peserta yaitu Pejabat Eselon II dan Kepala Balai Besar, peserta bergiliran menjadi pembicara dan inspirator serta bercerita tentang berbagai inisiatif PUG di unit kerja masing-masing, kemudian diperkaya oleh perspektif narasumber. Selain pertemuan-pertemuan rutin secara virtual, GLEADS juga mempersiapkan Strategic Gender Action Program (SIGAP) untuk dipresentasikan di Pekan Ekogender dan Pelestarian Alam (PESTA).

Training Eco Gender for Activating Hub (TEACH)

Pembelajaran online melalui youtube dan zoom meeting, dengan jumlah peserta adalah 1.000 orang pegawai KLHK perwakilan dari seluruh unit kerja Eselon II Pusat dan UPT dan mitra kerja KLHK, peserta akan dibagi menjadi 5 (lima) kelas dan akan dilatih untuk melakukan *creative thinking* dan *design thinking* tentang PUG dalam bidang LHK, berbeda dengan kelas gender biasa karena dalam kelas Eco-Gender juga belajar tentang hubungan antara manusia juga belajar bagaimana menjaga bumi. Pada akhir proses pembelajaran, peserta merancang ide, inovasi dan aksi sederhana untuk mendukung inisiatif TEACH, setiap peserta aktif belajar dan membuat inovasi.

Gender Mainstreaming Competition (GENERATION)

Lomba PUG antar Unit Kerja di Kementerian LHK. Tahun 2020, lomba ini pertama kali dilakukan untuk unit kerja di pusat saja dan dinilai cukup efektif sebagai langkah nyata

dalam mendorong percepatan PUG di tingkat pusat. Namun disadari bahwa inovasi tidak hanya ada dan lahir di pusat saja, di daerah justru lebih banyak praktik dan inovasi dalam pelaksanaan PUG. Sehingga sebagai upaya untuk mendorong dan mengalirkan lebih deras ke tingkat tapak, serta memantapkan pijakan gender di tingkat tapak, maka pada tahun 2021 Kementerian LHK melakukan lomba PUG di seluruh unit kerja baik di pusat maupun daerah.

Pekan Ecogender dan Pelestarian Alam (PESTA)

PESTA adalah puncak kegiatan Festival Gender 2021, diramaikan dengan beberapa kegiatan yaitu: pasar inovasi untuk para teach untuk menawarkan ide dan gagasan mereka, webinar gender, festival film, festival video foto, dan puncak acara.

Dan pada akhirnya, Festival Gender menjadi salah satu pengungkit yang efektif, karena nuansanya lebih soft dan ramah apabila dibandingkan dengan workshop, webinar dan kegiatan lain yang dinilai kaku. Jika Festival gender ini terlaksana dengan baik maka akan semakin banyak supporter gender yaitu Gender leader dan Gender Champion yang memperbincangkan gender dan aksi-aksi nyata di lapangan. Selain itu dengan lahirnya para pemimpin yang sudah responsive terhadap gender dan berkomitmen tinggi untuk percepatannya, maka kebijakan dan implementasi PUG juga akan berjalan dengan optimal, melalui beberapa perubahan dalam hal regulasi, program/kegiatan, sarana dan prasarana bahkan cara berinteraksi/perbincangan antara ASN Kementerian LHK dan stakeholder lebih inklusif dan sudah mencerminkan atau mengintegrasikan gender.



TRANSFORMASI MENJADI NAT

Dua dasawarsa pelaksanaan PUG



Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang "Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional"



Terbentuknya Tim Pokja PUG Dephut



- Diterbitkan Panduan Pelaksanaan PUG
- Dephut Pelatihan leadership staf senior perempuan



- Anugerah Parahita Ekapraya : MADYA
- Buku Pedoman Penyusunan Data Terpilah Gender
- Buku Pedoman Monev Kegiatan Responsif Gender



- TOT PPRG dan Teknik fasilitasi PUG
- Pembekalan Audit PPRG
- Pengembangan konsep gender dalam Perubahan Iklim
- Pembuatan Website PUG



- Training of Trainer (TOT) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
- FGD PUG Bidang LHK



- Sosialisasi PUG Ekoregion Sulawesi Maluku, Jawa, Ditjen PPI, Ditjen PSKL, dan dengan Widyaiswara
- Anugerah Parahita Ekapraya: MENTOR



- Refreshment fasilitator PUG
- Rakor PUG KLHK Tahun 2019



PENGHARGAAN APE PRATAMA, MADYA, UTAMA, DAN MENTOR





NETRAL GENDER URE GENDER

di klhk

50
TAHUN

1972

- 2012

 - Penerbitan buku saku PUG Dephut
 - Sosialisasi PUG di 7 Provinsi
 - Penyusunan data terpilih bidang kehutanan
 - Anugerah Parahita Ekapraya : MADYA
- 2011

 - Anugerah Parahita Ekapraya : PRATAMA
 - PUG sebagai strategi pada Pemetaan dokumen PUG
- 2016

 - Penyusunan Policy Brief
 - Anugerah Parahita Ekapraya: UTAMA
- 2020

 - Pengembangan konsep gender dalam perubahan iklim
 - Pengembangan E-Learning bersama Kemen PPPA
 - Revisi Panduan Pelaksanaan PUG Bidang LHK
 - Lomba PUG KLHK antar Eselon I
 - Sosialisasi PUG Eselon I
 - Rakor PUG KLHK 2020
- 2021

 - Lomba PUG tingkat Eselon II hingga UPT lingkup KLHK
 - Lomba Video Storytelling PUG
 - Festival Gender 2021





Gleads goes to campus adalah sebuah forum dialog refreshment yang membantu optimalisasi pelaksanaan Komitmen GLEADS dan sebagai apresiasi terhadap komitmen dan konsistensi bagi para Gleaders. Gleads goes to campus dilaksanakan di Universitas Sebelas Maret pada 17-18 September 2022

Foto oleh: Rifqi Alif Nugraha



Scan barcode di samping untuk membaca Risalah Perjalanan Lapangan Biro Perencanaan Bersama DLH Provinsi Banten tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus.

Bibit *Avicennia* sp ditanem oleh warga Kramatwatu, Serang, Banten. Penyediaan bibit dan biaya penanaman mangrove menjadi salah satu mata anggaran Dana Alokasi Khusus bidang Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten. Bibit yang terus bertumbuh menandakan harapan seiring menguatnya sari kehidupan bibir pantai.

Foto oleh: Dyastri Intan Pratiwi Prayoga

GLOSSARIUM

A	AKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
	APE	Anugerah Parahita Ekapraya
	ASN	Aparatur Sipil Negara
B	B04-B12	Bulan ke-04 (April) sampai ke-12 (Desember)
	Bimtek	Bimbingan Teknis
	Birocan	Biro Perencanaan
	BMN	Barang Milik Negara
	BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
	BSI	Bank Sampah Induk
C	BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
	COVID-19	Corona Virus Disease 2019
D	D3	Diploma
	DA	Demonstration Activities
	DAK	Dana Alokasi Khusus
	DAS	Daerah Aliran Sungai
	DBH	Dana Bagi Hasil
	DLH	Dinas Lingkungan Hidup
	DPMU	District Programme Management Unit
	DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat
	DR	Dana Reboisasi
	Dukman	Dukungan manajemen
	F	FORCLIME FC
FRL		Forest Reference Level
FSC		Forest Stewardship Council
G	GENERATION	Gender Mainstreaming Competition
	GLEADS	Gender Leadership
	HLN	Hibah Luar Negeri
	IDM	Indeks Desa Membangun
	IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
	IKP	Indikator Kinerja Program
	IKU	Indikator Kinerja Utama
	IUPHHK-HA	Izin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam

J

Jabalnusra
JF

Jawa Bali Nusa Tenggara
Jabatan Fungsional

K

KKI
KKN
KKP
KPH
KTH
KUPS
LHK
LKj

Kongres Kehutanan Indonesia
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kesatuan Pemangku Hutan
Kelompok Tani Hutan
Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Laporan Kinerja

M

MoU
NKT
NPMU
NSPK

Memorandum of Understanding
Nilai Konservasi Tinggi (HCV)
National Programme Management Unit
Norma Standar Prosedur Kriteria

P

P3E
P3HH
P3SEKPI

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Perubahan Iklim
Penyusunan Anggaran
Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
Peraturan Bupati
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Pengendalian Kawasan Gambut
Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka
Pengendalian Kerusakan Perairan Darat
Penjualan Langsung Berjenjang Syariah
Participatory Land Use Planning
Pegawai Negeri Sipil
Pengendalian Pencemaran Air
Pengendalian Perubahan Iklim
Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
Pengaduan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administrasi
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

PA
PDASHL
PerBup
PHPL
PKG
PKLAT
PKPD
PLBS
PLUP
PNS
PPA
PPI
PPIKHL
PPKL
PPKPL
PPNPN
PPPSA
PSKL
PSLB3
PTKL



Suasana tepi pantai Pulau Rubiah di ujung Indonesia sebelah Barat. Pohon Ketapang dan Pandan tumbuh di tanah berpasir putih.

Foto oleh Agustina Sandrasari

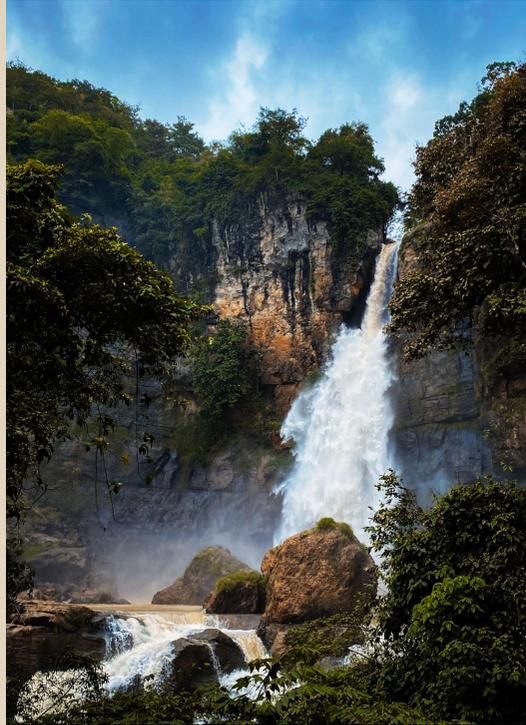
GLOSSARIUM

	PUG	Pengarus Utama Gender
	Pusdik SDMLHK	Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Lingkungn Hidup dan Kehutanan
	Puslatmas dan PGL	Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan
R	RB	Reformasi Birokrasi
	RP	Rencana Program
	Renja	Rencana Kinerja
	Renstra	Rencana Strategis
	RIL	Reduce Impact Logging
	RKA-K/L	Rincian Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
	RKP	Rencana Kerja Program
	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
S	SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	Satker	Satuan Kerja
	SDM	Sumber Daya Manusia
	Setditjen	Sekretariat Direktorat Jenderal
	Setjen	Sekretariat Jenderal
	SK	Surat Keputusan
	SMKN	Sekolah Menengah Kehutanan Negeri
	SPSS	Statistical Package for the Social Sciences
T	Tapkin	Penetapan Kinerja
	TN	Taman Nasional
	TWA	Taman Wisata Alam
U	UKE	Unit Kerja Eselon
	UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	UPT	Unit Pelayanan Teknis
W	WA	Whatsapp
	YoY	Year on Year
Y		



Gugusan kepulauan tersebar di permadani lautan Papua, Raja Ampat selalu menjadi magnet pariwisata baik nasional maupun internasional. Biro Perencanaan beruntung dapat mengabadikan momen perahu wisatawan yang melintas di antara gugusan kepulauan tersebut dalam kunjungannya perihal percepatan pembangunan kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Foto oleh: Asriyanto



Dinamisnya perubahan lingkungan dan kemajuan teknologi khususnya informasi dan komunikasi yang demikian pesat, serta tuntutan persaingan global yang semakin ketat, membuat masyarakat sangat peka terhadap kinerja Birokrasi pemerintahan dan sangat peduli terhadap peningkatan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, Pemerintah dituntut untuk mampu menciptakan birokrasi yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BIRO PERENCANAAN sebagai Koordinator Layanan Perencanaan di lingkup Kementerian LHK memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong modernisasi Birokrasi dari aspek Akuntabilitas dan Peningkatan Kinerja pembangunan LHK yang efektif dan efisien.

